



LKj

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kinerja yang diukur dalam laporan ini didasarkan atas Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Untuk Tahun Anggaran 2024 capaian Keuangan Sekretariat Daerah sebesar **92,93** % dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang didukung oleh **3** (tiga) Program, **18** (delapan belas) Kegiatan dan **57** (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang disusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun yang akan datang.

Pelaihari, 20 Januari 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

ISMAIL FAHMI, SE, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731128 199803 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyajikan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD), perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja, serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang dilengkapi dengan identifikasi faktor - faktor yang mendukung keberhasilan dan atau kegagalan.

Di samping itu LKj ini juga melaporkan tingkat pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk Tahun 2024 Sekretariat Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar **Rp 112.696.491.964,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 104.722.942.552,- (92,92%)** sebagaimana tabel dibawah ini :

Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran Bagian-bagian lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 :

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	2.125.390.545	1.842.604.623	86,69%
2	Hukum	2.936.715.053	2.363.734.913	80,49%
3	Organisasi	759.104.607	660.472.055	87,01%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	943.744.634	756.966.858	80,21%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.911.783.582	1.822.447.228	95,33%
6	Kesejahteraan Rakyat	43.308.751.106	41.314.461.726	95,40%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.491.878.833	2.324.209.429	93,27%
8	Umum	33.013.021.639	30.269.391.256	91,69%
9	Perencanaan dan Keuangan	25.206.101.965	23.368.654.464	92,71%
	JUMLAH	112.696.491.964,00	104.722.942.552,00	92,92%

**Sumber/Pengolah Data Bagian Perencanaan dan Keuangan*



Sedangkan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2026	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6
Eselon II					
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	80	-	97.92	97.92%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor LPPD	3.100	-	2,900	93.54%
Terwujudnya stabilitas perekonomian	Indeks Harga Konsumen	106.16	-	99,56	106,63
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	79	80,83	82.60	104%
Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General	Nilai komponen rencana aksi	2.3	-	Belum rilis oleh KemenpanRB	-
Meningkatnya Kualitas Pelaporan SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP	11	-	11,05	100,45
Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82.5	82	82.45	99.93%
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81	89,98	91.78	113.30%

Diharapkan LKj ini telah mempresentasikan kinerja nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sekaligus sebagai perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat memberikan informasi pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja organisasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	24
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	32
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	40
I. Sistematika Penyajian	46
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Tujuan Sasaran Kabupaten	47
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	51
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	61
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	71
1. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)	151
1.1 Bagian Umum.....	151
1.2 Bagian Pemerintahan	194
1.3 Bagian Organisasi.....	254
1.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan	284
1.5 Bagian Pengadaan Barang/Jasa.....	361
1.6 Bagian Hukum	386
1.7 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	402
1.8 Bagian Kesejahteraan Rakyat	421



1.9 Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA.....	473
2 Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	491
3 Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.....	495
B. Akuntabilitas Keuangan	504
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	504
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	406
3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	513
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	525

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Sekretariat Daerah Eselon II dan Eselon III Tahun 2024
2. Pernyataan Hasil Reviu SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ber tanda tangan
4. Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024
5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024
6. Matriks Keselarasan Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Disamping itu Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban instansi serta tekad seluruh PNS Sekretariat Daerah untuk mencapai Misi tujuan organisasi yang transparan guna mendukung tercapainya *Good Governance*.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK* (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**) dan *Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2024 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang mendasari Kegiatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



D. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, Sasaran, dan Indikator Eselon II sampai dengan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah memiliki 5 (Lima) Tujuan Strategis dengan 5 (Lima) Indikator Tujuan.
2. Sekretariat Daerah memiliki 8 (Delapan) Sasaran Strategis Eselon II dengan 10 (Sepuluh) Indikator Sasaran Eselon II.
3. Sekretariat Daerah memiliki 32 (Tiga Puluh Dua) Sasaran Strategis Eselon III dengan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Indikator Sasaran Eselon III.
4. Sekretariat Daerah memiliki 16 (Enam Belas) Sasaran Strategis Eselon IV dengan 16 (Enam Belas) Indikator Sasaran Eselon IV.

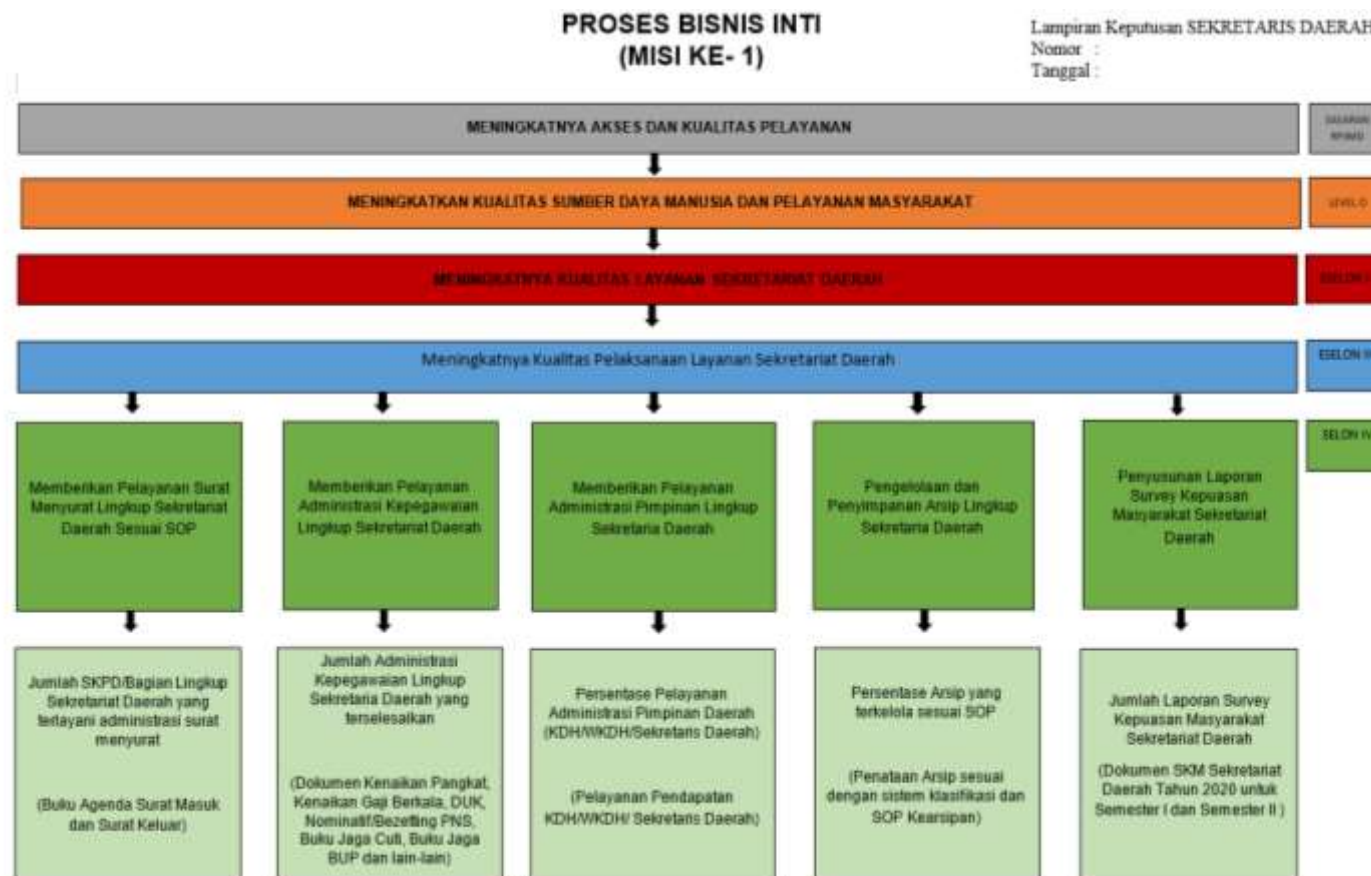


E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Peta Proses Bisnis

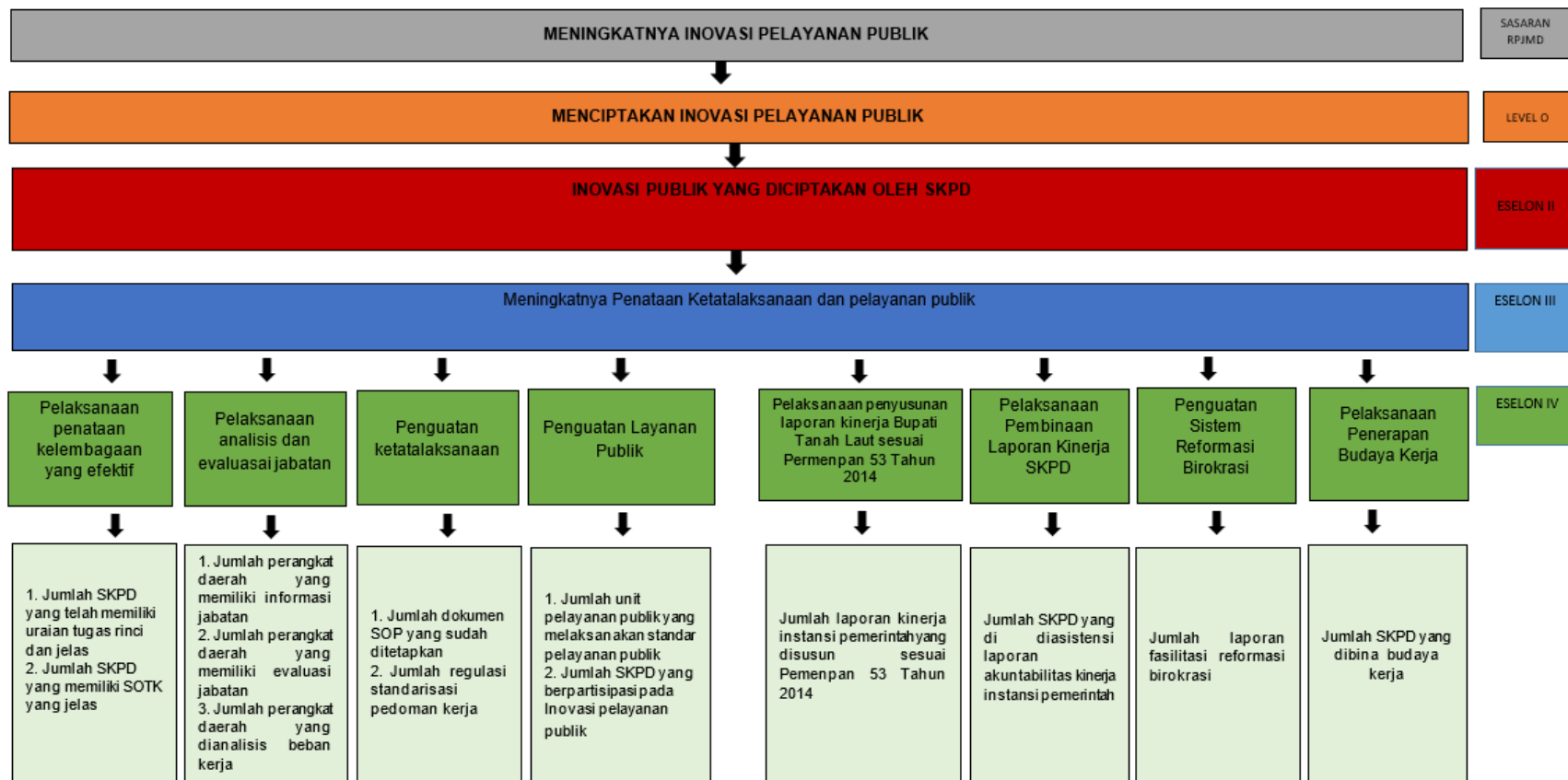
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 33/KEP-SEKDA/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut , Sekretariat Daerah telah menyusun Peta Proses

Bisnis dengan gambaran sebagai berikut :



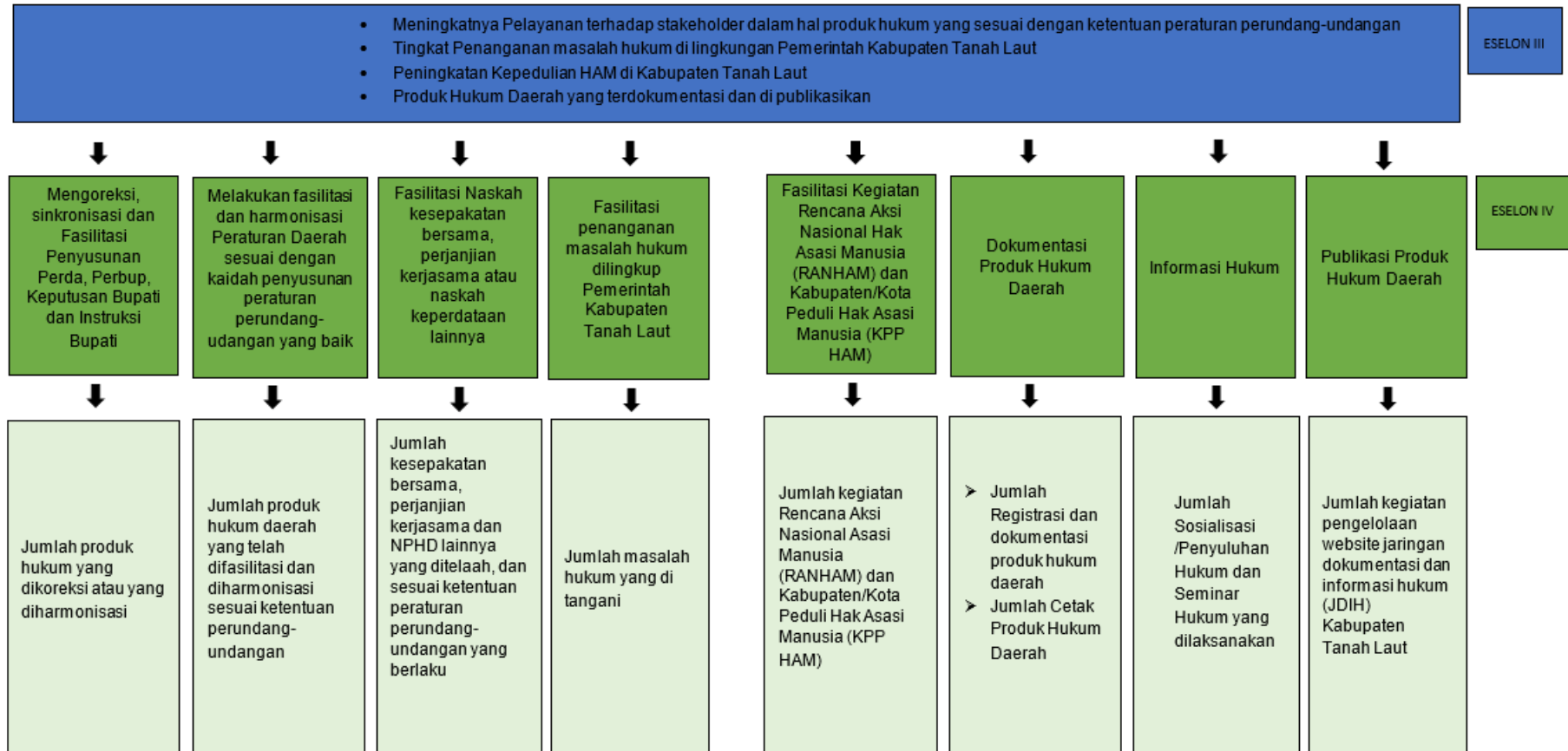


PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 2)



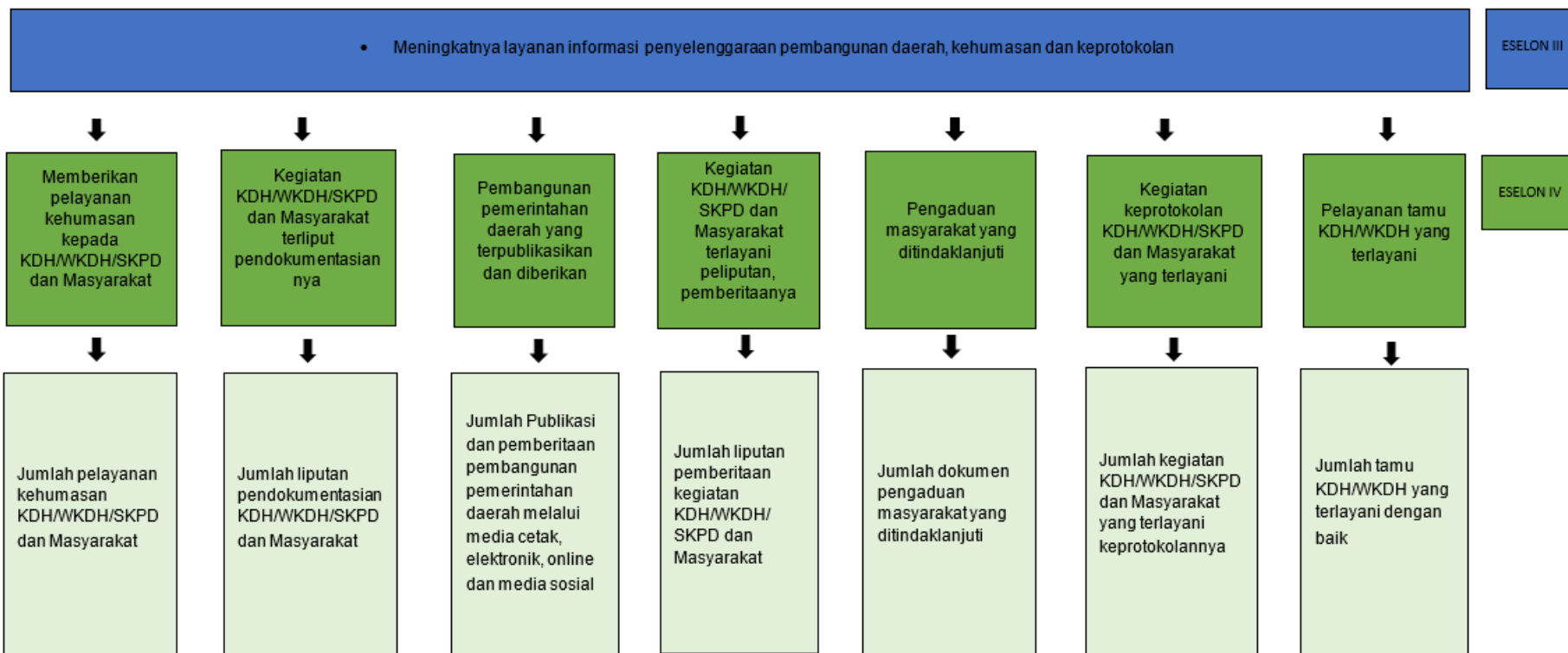


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)



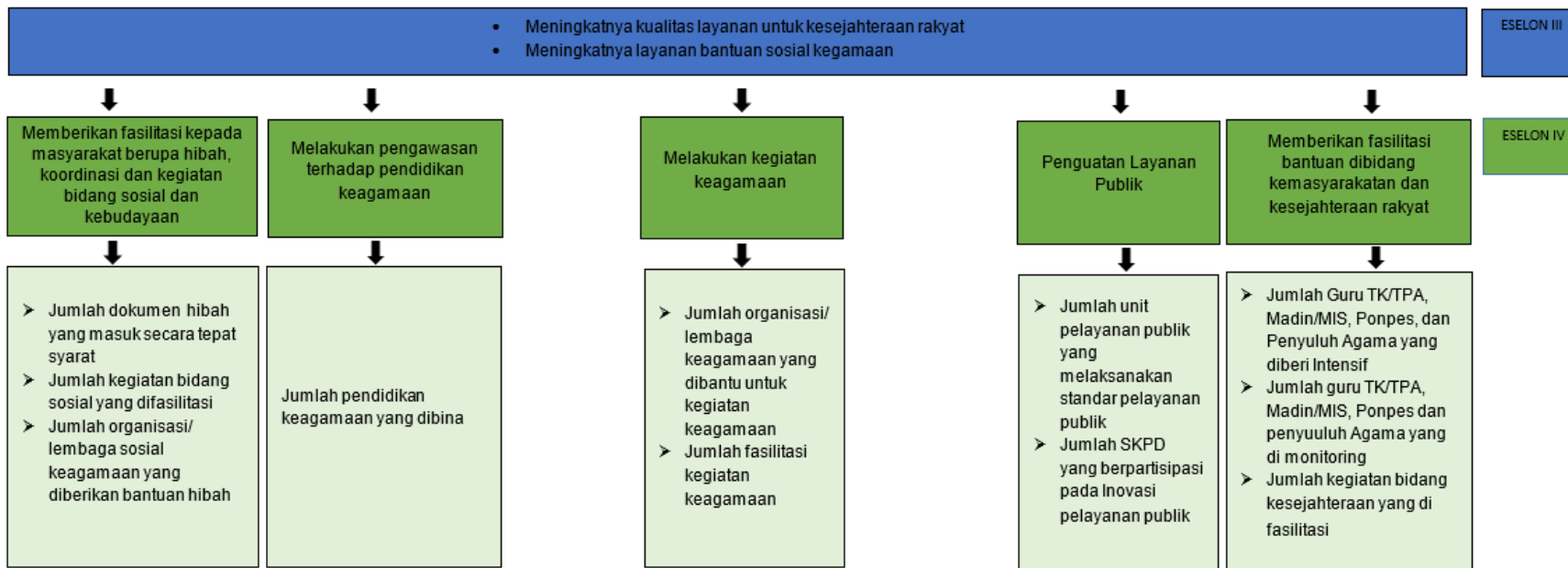


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)



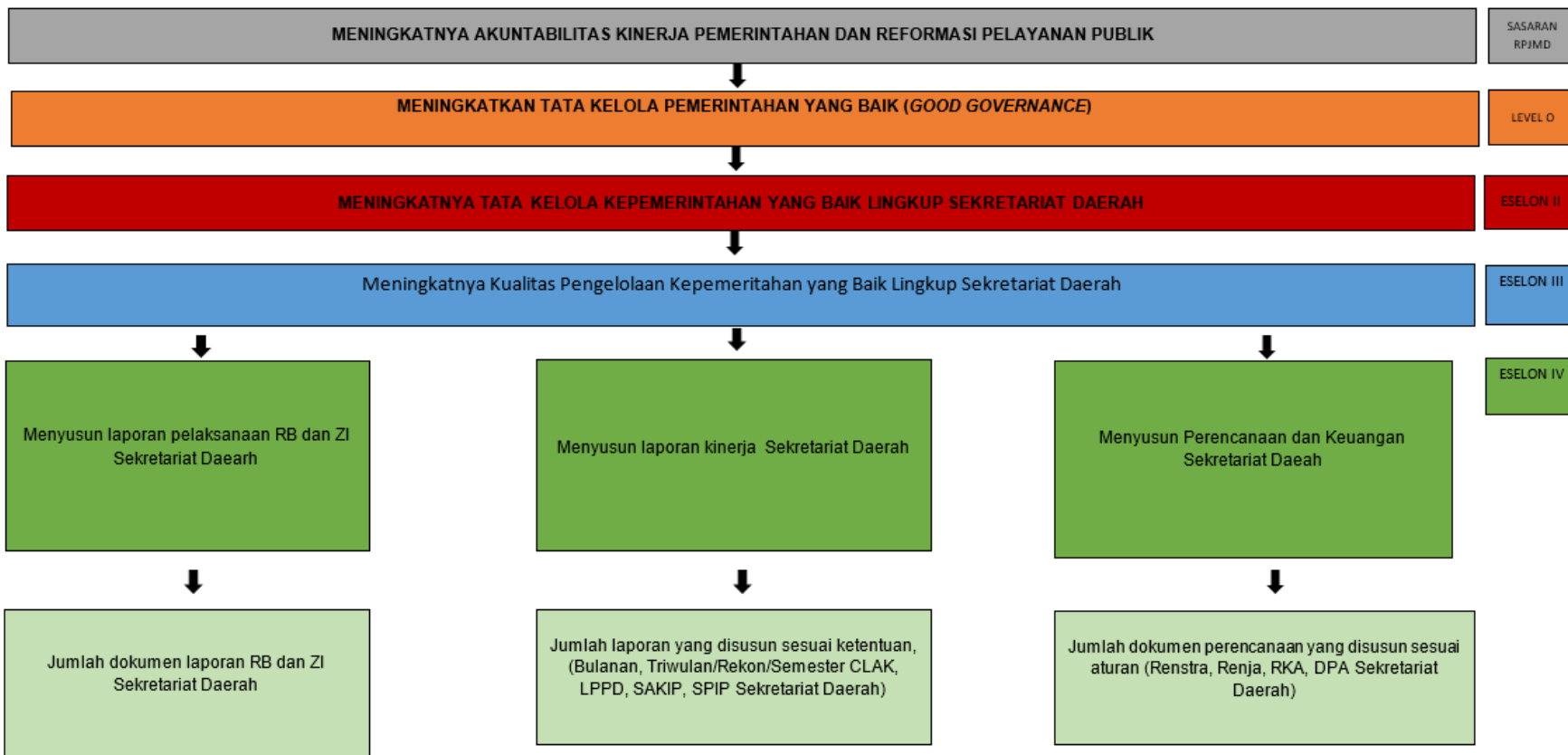


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)



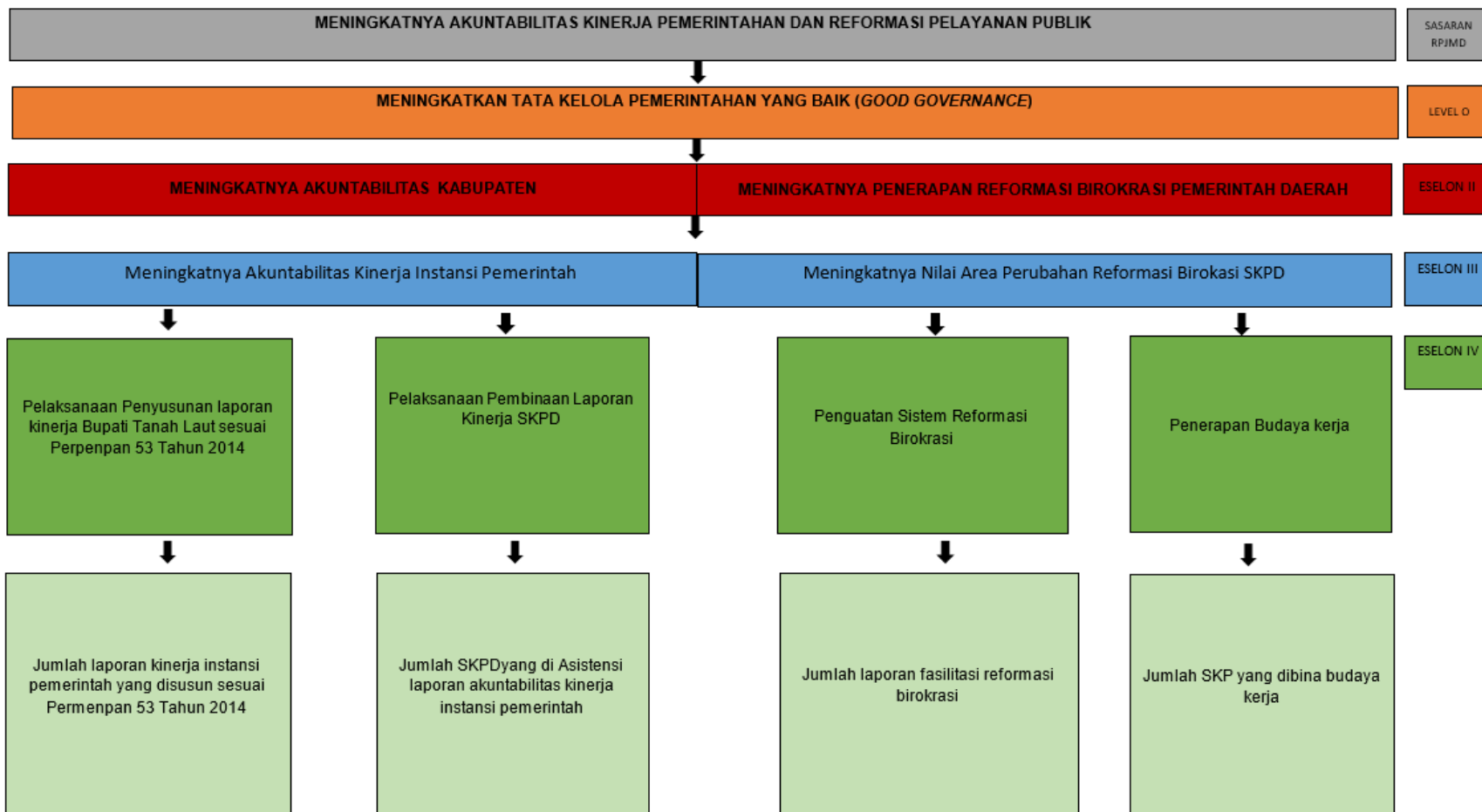


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)





PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)





PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)



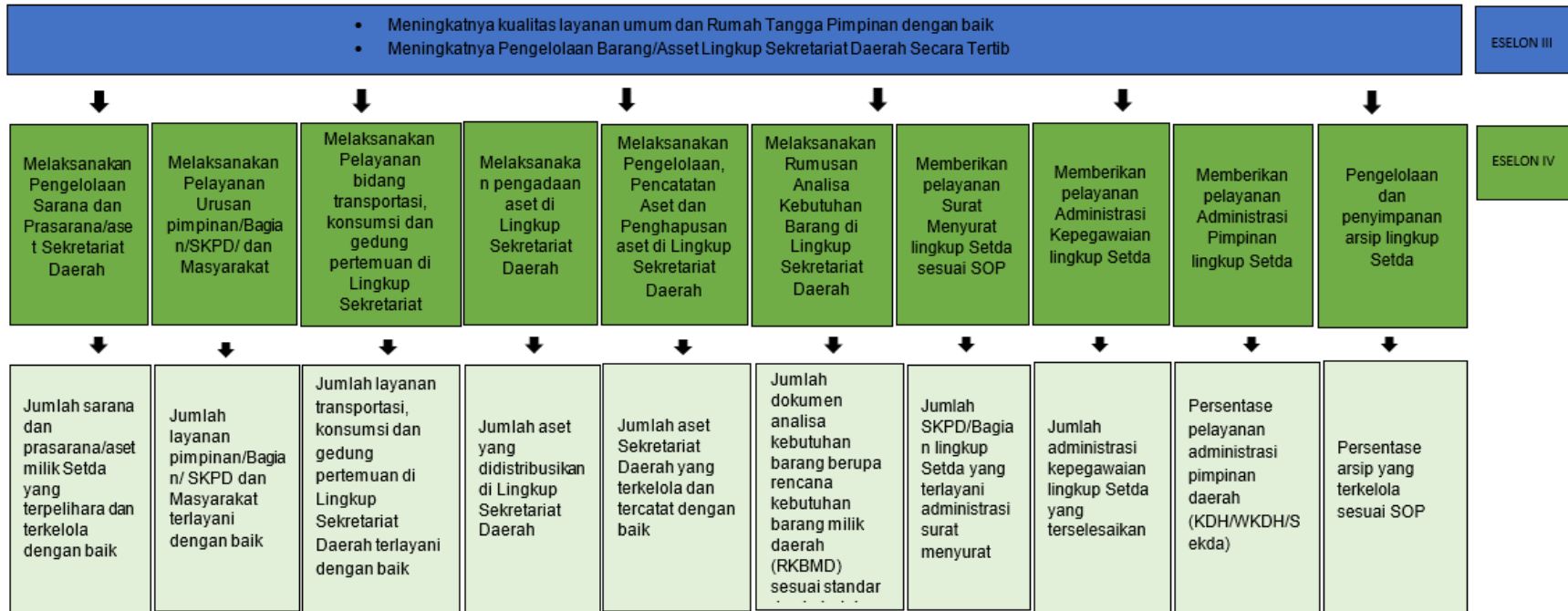


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)



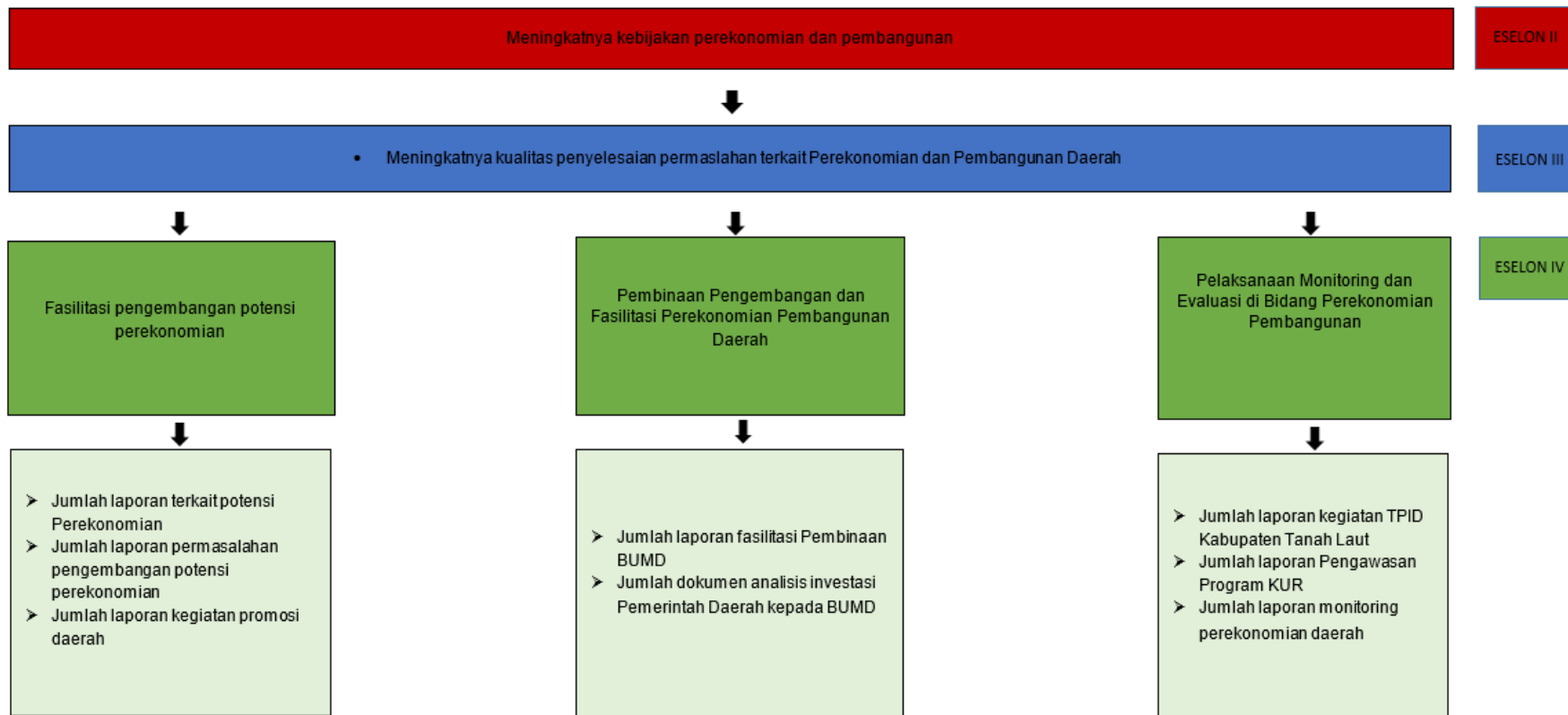


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 3)



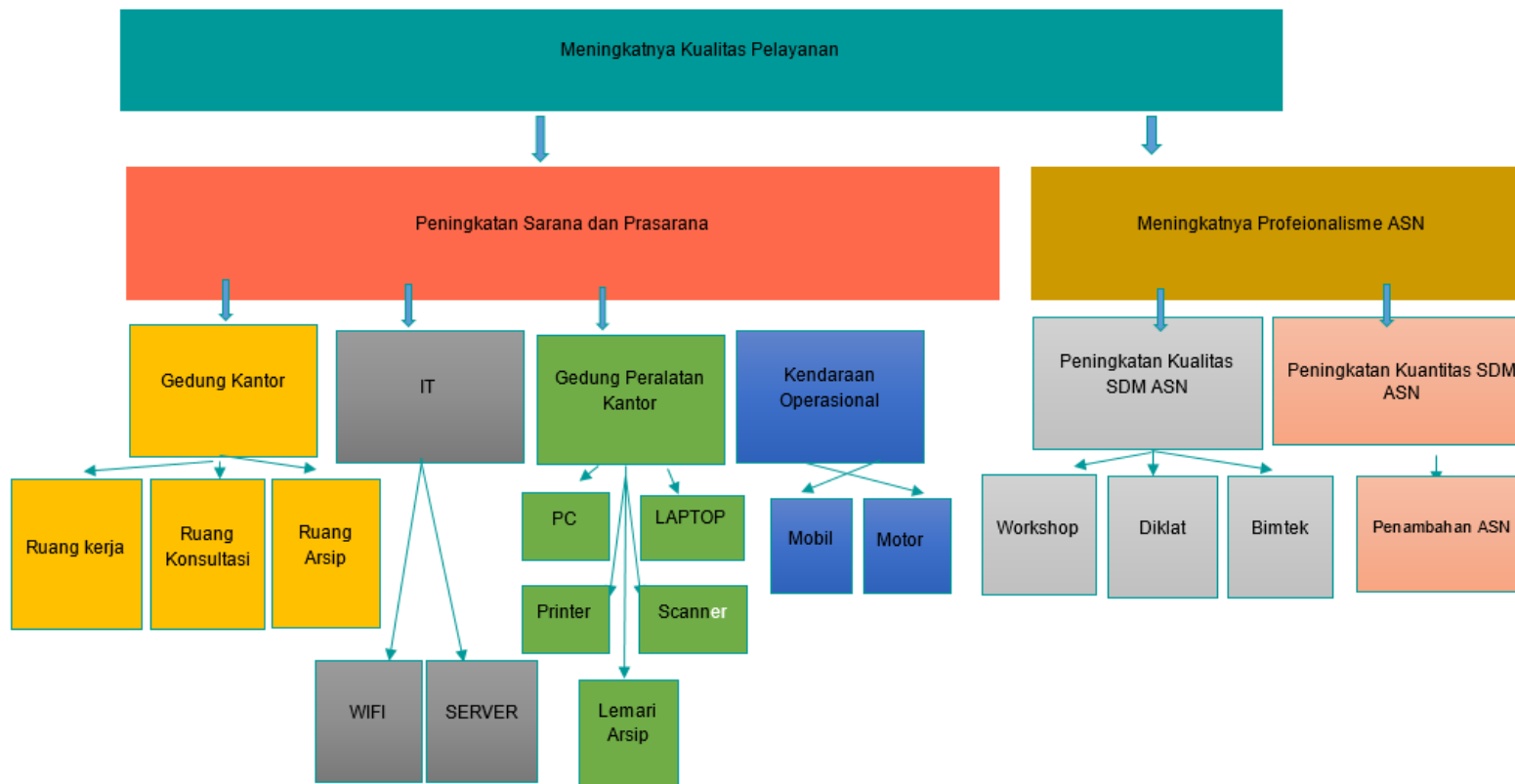


PROSES BISNIS INTI (MISI KE- 5)





PROSES BISNIS PENDUKUNG





2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.



Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
- c. Bagian Organisasi; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.



Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Pengadaan Barang/Jasa;
- e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) **Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,



pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.

- 2) **Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) **Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) **Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- 2) **Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:



- 1) **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) **Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) **Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pendidikan dan Golongan Ruang sebagai berikut :

Aspek Strategis Organisasi

Sumber Daya SKPD

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2024 berdasarkan Jabatan Struktural, JFT,JFU/Pelaksana dan PPPK berjumlah 104 orang, dan 136 orang Non PNS/PTT, yang meliputi :

1.	Sekretaris Daerah	:	0	Orang
2.	Asisten	:	2	Orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	1	Orang
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5.	Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7.	Kepala Bagian Perekonomian, Adminstrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	0	Orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9.	Kepala Bagian Umum	:	1	Orang
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1	Orang
11.	Kepala Bagian Organisasi	:	1	Orang
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	0	Orang
27.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	:	1	Orang
29.	Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	:	1	Orang
30.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	0	Orang
33.	Kepala Sub Bagian Protokol	:	1	Orang
37.	JFU/ JFT/Pelaksana/PPPK		90	Orang
38.	Non PNS		136	Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :



Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2024

NO	BAGIAN	GOLONGAN																		
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	IX	JML	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Sekretaris Daerah																			0
2	Asisten Sekretaris Daerah		2																	2
3	Staf Ahli		1																	1
4	Pemerintahan			1		1	1	1	1	2								1		8
5	Hukum			1		1	2	2										1		7
6	Kesejahteraan Rakyat			1		2		1	3									1		8
7	Pengadaan Barang/Jasa				3	10	1	3	5	1								1		24
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam					2	1		1									1		5
9	Umum			1		1	2	3	5	6			3		1					22
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1	1		1	4	1								1		9
11	Organisasi			1		2		3	2									1		9
12	Perencanaan dan Keuangan					2		1	3	2								1		9
JUMLAH		-	3	5	4	22	7	15	24	12	-	-	3	-	1	-	-	8		104

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2024

Aspek SDM Sekretariat Daerah

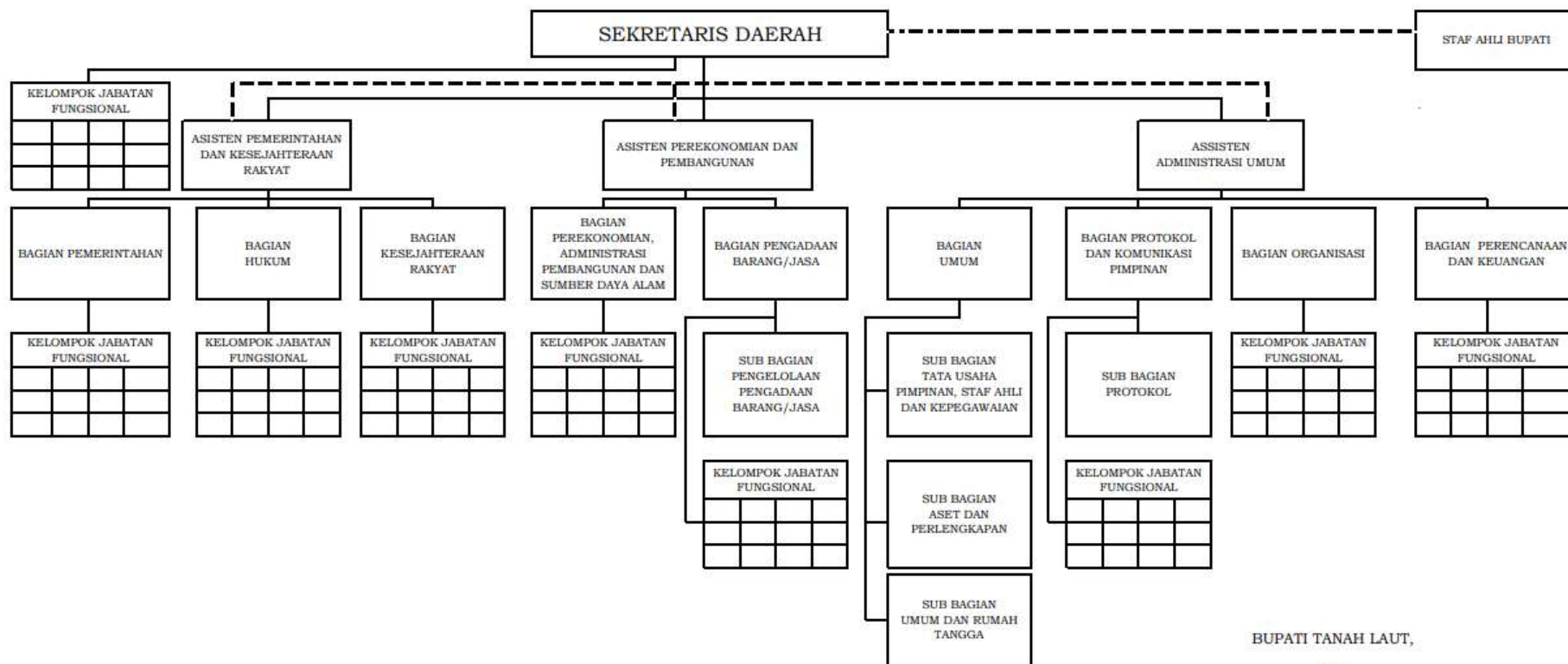
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Sekretaris Daerah										0
2	Asisten Sekda		2								2
3	Staf Ahli			1							1
4	Pemerintahan		2	4		1		1			8
5	Hukum		2	4		1					7
6	Organisasi			9							9
7	Pengadaan Barang Jasa		4	16		3		1			24
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA		2	2		1					5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	4		2		1			8
10	Umum		2	2		2		12	1	3	22
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9



12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan			5				4			9
JUMLAH		-	15	52	-	11	-	22	1	3	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2024*



KETERANGAN
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TANAH LAUT,
 Ttd
 H. SUKAMTA



F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu Strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

i. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.



Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 82.60** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
a.	SiRUP	10.00
b.	<i>E-Tendering/E-Seleksi</i>	5.00
c.	<i>E-Purchasing</i>	2.00
d.	<i>Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing</i>	3.32
e.	E-Kontrak	3.97
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	17.31
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00
	TOTAL	82.60

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarakan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;
- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).



ii. Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	9 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	15 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

G.

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 11 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS



atau PPPK untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

3) Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja (LKj) Seluruh Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan semakin baik pula pembangunan yang dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, yang dilakukan melalui kegiatan utama diantaranya penyederhanaan birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan public. Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Laut

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat 4 komponen penting yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. dalam rangka memastikan efektifitas dan efisiensi atas penggunaan anggaran maka ke kualitas empat komponen tersebut harus ditingkatkan. sekretariat daerah sebagai penanggung jawab komponen pelapora maka beban peningkatan kualitas pelaporan kinerja menjadi tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. permasalahan Utama dalam pelaporan kinerja adalah:

1. Masih kurangnya Informasi yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh PD belum secara spesifik menyampaikan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja yang sudah diperoleh dengan target akhir dokumen perencanaan. Sehingga data perbandingan untuk melihat sejauh mana posisi kinerja yang ada dalam mendukung kondisi akhir perencanaan belum andal dan transparan;
2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya maupun, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya



1) Belum Maksimalnya Kinerja BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Memberikan Kontribusi PAD kepada Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang luas dalam mengembangkan dan mengelola kekayaan daerahnya dan dituntut kemandiriannya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam sistem pemerintah daerah.

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki empat BUMD yaitu:

- 1) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)
- 2) PD. Baratala Tuntung Pandang



- 3) PT. BPR Tanah Laut, dan;
- 4) PT. Tanah Laut Manuntung.

Dari empat BUMD tersebut yang beroperasi ada tiga dan satu belum operasional. Dari empat BUMD tersebut yang dapat berkontribusi memberikan PAD kepada daerah hanya 2 yaitu PD. Baratata dan PT BPR Tanah Laut, namun pada tahun 2024 ini yang dapat menyetorkan dividen hanya PT. BPR Tanah Laut.

Berikut data setoran dividen BUMD kepada Daerah

No	Nama BUMD	Dividen di Setor			
		2021	2022	2023	2024
1	PD. Baratata Tuntung Pandang	Rp.374.935.018	Rp.479.277.014	Rp.150.000.000	-
2	PT. BPR Tanah Laut (Perseroda)	Rp 106.005.337	Rp 461.308.674	Rp 500.205.886	Rp 544.509.968
3	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)	-	-	-	-

Minimnya penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan BUMD disebabkan permasalahan – permasalahan antara lain :

- A.** Tata kelola dan kinerja BUMD belum memadai, sehingga BUMD belum dapat melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada publik secara optimal;
- B.** Pemerintah daerah tidak menjabarkan peran dan arah pengembangan BUMD dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tidak ada pedoman untuk merumuskan langkah pengembangan dan pembinaan BUMD;
- C.** Ketidakjelasan visi dan misi pemerintah daerah terkait tujuan pembentukan BUMD, sehingga BUMD sulit untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya BUMD tidak dapat memenuhi tujuan penyediaan barang/jasa kepada masyarakat daerah, sekaligus mendapatkan untung dari usaha BUMD tersebut;
- D.** Rekrutmen Dewan Komisaris/Badan Pengawas, direksi dan karyawan BUMD yang tidak melalui proses terbuka dan transparan, sehingga banyak yang meragukan kompetensinya;



- E. Respons atau izin pemerintah daerah atas keputusan bisnis seringkali lambat, sehingga BUMD tidak mampu bersaing dengan sektor swasta yang pada gilirannya akan mengalami kerugian;
- F. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam aspek permodalan BUMD.

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan dalam pengelolaan BUMD antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan analisa kemampuan organisasi BUMD tersebut dan mengkaji potensi dan peluang bidang bisnis yang lain.
- 2) Mengusulkan untuk dilakukan audit secara menyeluruh kepada manajemen BUMD sebagai langkah awal dalam mendiagnosis organisasi, untuk mengetahui sejauh mana resources yang dimiliki BUMD tersebut untuk mendukung efektivitas strategi dan sejauh mana kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang potensial menghambat kinerja BUMD.
- 3) Menambah jumlah investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan barang.
- 4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
- 5) Memastikan proses rekrutmen organ kepengurusan utama BUMD (Dewan Direksi dan Komisasris) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6) Melakukan perubahan badan hukum BUMD dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku.



G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Pelaksanaan Indikator Kinerja Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Anggaran Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
1.	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.936.715.053,0 0	Rp.2.363.734.913,0 0	80,49%	12	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (3 orang)
			- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp.599.993.727,00	Rp.463.045.536,00	77,18%	5	
			- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.936.715.053,0 0	Rp.2.363.734.913,0 0	80,49%	12	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (1 orang) -PTT (1 orang)
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp.1.091.543.825,0 0	Rp.920.109.651,00	84,29%	3	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang)



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
								- Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (1 orang) -PTT (1 orang)
			- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.936.715.053,00	Rp.2.363.734.913,00	80,49%	12	- Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang) - Penyuluh Hukum Ahli Pertama (1 orang) - PTT (2 orang)
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.1.245.177.501,00	Rp.980.579.726,00	78,75%	4	- Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang) - Penyuluh Hukum Ahli Pertama (1 orang) - PTT (2 orang)
2.	Skor LPPD	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	701.786.404	647.182.652	92,22	4 (empat) orang	
			- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	299.994.634	229.790.320	76,60	4 (empat) orang	
			- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	803.268.682	658.038.455	81,92	4 (empat) orang	
			- Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah					
			- Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	320.340.825	307.593.196	96,02	4 (empat) orang	
3.	Indeks Harga Konsumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	436.847.263	406.095.065	92,96%	4 Orang	1 PNS dan 3 PTT
			- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	257.711.714	147.669.012	57,30%	2 Orang	1 PNS dan 1 PTT
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	192.697270	160.098.881	83,08%	4 Orang	2 PNS, 1 PPPK dan 1 PTT
			- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	56.488.387	43.103.000	76,30%	4 Orang	2 PNS, 1 PPPK dan 1 PTT
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
			- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	662.038.082	616.256.832	93	1 Kasubbag, 15 JF PPBJ, 2 Perancang Kebijakan PBJ dan 1 Pengelola ULP	3 PTT



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
			- Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	811.951.500	787.945.000	97	1 (Sub Koordinator) dan 3 Staf LPSE	2 PTT
			- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
			- Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	437.794.000	418.245.396	95,5	1 (Sub Koordinator) dan Bendahara Pembantu.	3 PTT
5.	Nilai Komponen Rencana Aksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA A	- Kegiatan Penataan Organisasi					
6.	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.824.591	136.658.107	90,61	3 orang	
			- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	234.368.269	195.825.090		4 orang	
			- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	373.911.747	327.988.858	87,72	3 orang	
7.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA A	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Perencanaan - Pengelola Perencanaan - Perencana Ahli Pertama - PTT (1 Orang)	
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.462.800	19.446.600	76,37%		
			- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
							<ul style="list-style-type: none"> - Sub Koordinator Keuangan - Verifikator Keuangan - Bendahara Pengeluaran - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Penerimaan PTT (3 Orang) 	
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	24.499.942.676	22.711.891.636	92,70%		
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	23.999.839	20.687.500	86,20%		
			- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	636.700.000	601.380.000	94,45%		
			- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Pelaporan - PTT (1 Orang) 	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.792.064	320.735.000	87,92%	3 Orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
		KABUPATEN/ KOTA	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.323.104	89.393.140	78,88%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	18.000.000	17.900.000	99,44%		
			- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.649.903.000	2.267.500.000	85,57%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.567.701.640	3.263.379.000	90,71%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	501.831.708	442.765.000	88,23%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.539.879.359	1.409.100.000	91,51%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0%	3 Orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.623.920.000	1.397.859.592	86,08%	3 Orang	
			- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	850.000.000	774.250.000	91,09%	3 Orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.617.500.000	1.367.547.300	84,55%	3 Orang	
			- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	252.079.738	241.573.700	95,83%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	249.960.691	239.910.500	95,98%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	9.650.000	19,30%	3 Orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621.540.000	394.845.700	63,53%	3 Orang	
			- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.000.000	151.537.781	73,92%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.073.473.476	1.596.975.362	77,02%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	53.280.000	53.280.000	100%		



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	288.428.400	269.348.000	93,38%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.269.202.601	2.926.109.320	46,67%	3 Orang	
			- Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah					
			- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.573.000.000	4.987.679.592	89,50%	3 Orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.969.868.608	3.402.263.190	85,70%	3 Orang	
			- Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah					
			- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	50.000.000	29.300.000	58,60%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	168.137.250	166.315.000	98,92%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	0	0%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.000.000	43.890.000	29,45%	3 Orang	
			- Kegiatan Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.200.000	110.000.000	98,04%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	0	0%	3 Orang	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/KOTA	- Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	595.638.960	557.684.653	93,63	6	
			- Sub Kegiatan Fasilitas Dokumentasi	837.784.579	770.155.096	91,93	10	
			- Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	1.058.455.294	996.369.680	94,13	8	
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	43.308.751.106	41.393.550.726	95,58%		
			- Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.223.341.951	10.177.212.198	99,55%	4	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	28.472.070.645	27.359.672.310	96,09%	5	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.613.338.510	3.856.666.218	83,60%	6	



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/172-INSP/IV/2024 Tanggal 4 April 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2023 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

MATRIK TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
I	Perencanaan Kinerja					
1	Agar Pohon Kinerja yang telah disusun sebagai acuan dalam menyusun perencanaan	Telah disusun Pohon Kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan	8 Bulan	Mei-Juni	Penanggungjawab Perencanaan	Masih dalam proses
2	Dalam Penyusunan Perencanaan Kinerja agar mempedomani laporan kinerja Tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi Tahun berjalan	Penyusunan Perencanaan Kinerja berpedoman pada Laporan Kinerja Tahun sebelumnya dan hasil Monev Tahun berjalan	1 Tahun	1 Tahun	Penanggungjawab Perencanaan	Masih dalam proses
3	Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas	Pimpinan telah memberikan umpan balik (feedback) pada penilaian SKP Bulanan dan Tahunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Pimpinan pada Sekretariat Daerah yang memberikan penilaian bawahannya	Dilaksanakan setiap bulan penilaian



II Pengukuran Kinerja						
1	Agar Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan Anggaran yang dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan) dipertahankan dan lebih ditingkatkan kualitasnya	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi berkala (triwulanan)	1 Tahun	1 Tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam proses
2	Semua program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan pengurangan/pergeseran/pemindahan anggaran yang masuk perubahan renja, agar berdesarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	Dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi berkala (triwulanan) terkait Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam proses
3	Dalam Penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang berkelanjutan	Pimpinan telah memberikan umpan balik (feedback) pada penilaian SKP Bulanan dan Tahunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Pimpinan pada Sekretariat Daerah yang memberikan penilaian bawahannya	Dilaksanakan setiap bulan penilaian
III Pelaporan Kinerja						



1	Laporan Kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah dibuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala (triwulanan)	1 Tahun	1 Tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam proses
2	Laporan Kinerja yang disusun agar di gunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah dibuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala (triwulanan)	1 Tahun	1 Tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam proses
IV Evaluasi Kinerja						
1	Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal Tahun 2023, dengan melakukan input dokumen tindaklanjut pada aplikasi Sakuntala	Telah disusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Internal Tahun 2023	1 Tahun	1 Tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Selesai
2	Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja pertriwulan Tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi Sakuntala	Terus dilakukan monitoring secara berkala dalam rangka pencapaian kinerja dengan cara berjenjang Tahun 2024 pada masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang kedepannya dokumen akan di input pada aplikasi Sakuntala	1 Tahun	1 Tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam proses



I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Dokumen Perencanaan pembangunan lainnya pada Periode Tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan rumusan Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2024 - 2026 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”**.

Adapun Sasaran Strategis Kabupaten yang dapat dicapai sesuai dengan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD), yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki 2 (Dua) Tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki 8 (Delapan) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya stabilitas perekonomian
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa
5. Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General
6. Meningkatnya Kualitas Pelaporan SAKIP Kabupaten



7. Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel
8. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan.
2. Meningkatnya Penyelesaian Kasus/Perkara Hukum di Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan.
4. Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan.
5. Meningkatnya Pemenuhan IKK.
6. Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah.
7. Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
8. Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
9. Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan.
10. Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Keagamaan Masyarakat.
11. Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian.
12. Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat.
13. Meningkatnya Kualitas Monev Kebijakan Perekonomian.
14. Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat
15. Meningkatnya Kematangan UKPBJ.
16. Meningkatnya SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi RB General Dengan Baik
17. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja SKPD.
18. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten.
19. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Yang Benar dan Tepat Waktu
20. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah Yang Sesuai Dengan Sistem AKIP.
21. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah.
22. Meningkatnya Layanan Publikasi Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah.
23. Meningkatnya Layanan Informasi Dokumentasi Pimpinan Daerah
24. Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tamu Kepala Daerah



25. Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan Dengan Baik.
26. Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib.
27. Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.



Tabel Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA			KET
					2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4.57	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	80	82	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum
			Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan	Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Meningkatnya Penyelesaian Kasus/Perkara Hukum di Pemerintah Daerah	Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang Difasilitasi	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Skor LPPD	3.100	3.125	3.150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan	Presentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan	Presentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan



			Meningkatnya Pemenuhan IKK	Presentase Pemenuhan IKK	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati	50 Dokumen	52 Dokumen	56 Dokumen	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Presentasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten Yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Presentasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
				Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81	82	83	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan Dengan Baik	Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP	100%	100%	100%	Bagian Umum
			Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda	100%	100%	100%	Bagian Umum
			Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP	100%	100%	100%	Bagian Umum



			Meningkatnya Layanan Publikasi Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Meningkatnya Layanan Informasi Dokumentasi Pimpinan Daerah	Persentase Kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH Yang Terlayani Sesuai SOP	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tamu Kepala Daerah	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah Yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan	Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan	100%	100%	100%	Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	100%	100%	100%	Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya stabilitas perekonomian dan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks Harga Konsumen	106.16	107.66	109.16	Sekretariat Daerah dan Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
			Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
			Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat	Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Menghasilkan PAD	75%	100%	100%	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA



			Meningkatnya Kualitas Monev Kebijakan Perekonomian	Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	79	80.5	81	Sekretariat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level 3	Level 3	Level 3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat	Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik	80%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	80.01	Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General, Pelaporan SAKIP Kabupaten, Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel dan Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Nilai komponen rencana aksi	2.3	2.4	2.5	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
			Meningkatnya SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi RB General Dengan Baik	Persentase SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
				Nilai Komponen Pelaporan SAKIP	11	11.5	12	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
			Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja SKPD	Persentase SKPD Dengan Nilai Komponen Pelaporan Minimal 11	90%	100%	100%	Bagian Organisasi



			Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	80%	100%	100%	Bagian Organisasi
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82.5	82.6	83	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Yang Benar dan Tepat Waktu	Nilai Komponen Perencanaan AKIP Sekretariat Daerah	24	24	24	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Nilai Komponen Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Daerah	20	20	20	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah Yang Sesuai Dengan Sistem AKIP	Nilai komponen Pelaporan AKIP Sekretariat Daerah	11	11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drh. SUPARMI, M.S.

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SYAMSIR RAHMAN

Pelaihari, 19 September 2024
Pihak Pertama

drh. SUPARMI, M.S
NIP. 19680911 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	80
		Skor LPPD	3,100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81
2.	Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General, Pelaporan SAKIP Kabupaten, Kinerja Sekretariat Daerah yang Akuntabel dan Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Nilai Komponen Rencana Aksi	2,3
		Nilai Komponen Pelaporan SAKIP	11
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82,5
3.	Meningkatnya Stabilitas Perekonomian dan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks Harga Konsumen	106,16
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	79

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 45.459.450,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 24.523.942.515,-
		3. Administrasi Kepegawaian	Rp 368.137.250,-



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

		Perangkat Daerah	
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.621.155.597,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 8.289.315.707,-
		6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 6.215.328.608,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 8.889.384.477,-
		8. Administrasi Keuangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 798.900.000,-
		9. Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Rp 2.467.500.000,-
		10. Penataan Organisasi	Rp 759.104.607,-
		11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 2.491.878.833,-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 1.805.049.720,-
		2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 43.308.751.106,-
		3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 2.936.715.053,-
		4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 320.340.825,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 887.256.247,-



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 56.488.387,-
	3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.911.783.582,-

Pj. Bupati Tanah Laut,


SYAMSIR RAHMAN

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. Sekretaris Daerah,


drh. SUPARNI, M.S.
NIP. 19680911 199503 2 003

**D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

Dalam mendukung Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.462.800	25.462.800	19.446.600	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.996.650	19.996.650	15.885.000	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	25.655.942.676	24.499.942.676	22.711.891.636	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	23.999.971	23.999.839	20.687.500	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	121.192.575	168.137.250	166.315.000	Umum
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	50.000.000	50.000.000	29.300.000	Umum
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	1.000.000	0	Umum
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150.000.000	149.000.000	43.890.000	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	89.985.629	252.079.738	241.573.700	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.963.458	364.792.064	325.225.000	Umum
		- Penyedia Peralatan Rumah Tangga	199.972.181	249.960.691	239.910.500	Umum
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	86.999.112	113.323.104	89.393.140	Umum
		- Penyedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	17.900.000	Umum
		- Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	50.000.000	39.650.000	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.173.000.000	5.573.000.000	5.313.637.482	Umum
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.649.903.000	2.649.903.000	2.267.500.000	Umum
		- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.282.701.604	3.597.701.640	3.263.379.000	Umum
		- Pengadaan Mebel	317.168.512	501.831.708	442.765.000	Umum
		- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	840.145.746	1.539.879.359	1.409.100.000	Umum
		- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	3.400.000.000	0	0	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.439.920.000	1.623.920.000	1.402.767.310	Umum
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.996.000	621.540.000	542.835.700	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.969.868.608	3.969.868.608	3.695.739.114	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.000.000	205.000.000	183.649.781	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.398.538.076	2.073.473.476	1.793.049.399	Umum
		- Pemeliharaan Mebel	39.960.000	53.280.000	53.280.000	Umum
		- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	199.028.400	288.428.400	269.348.000	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.831.008.285	6.269.202.601	6.041.760.965	Umum
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	718.576.548	636.700.000	601.380.000	Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.100.000	112.200.000	102.158.000	Umum
		- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	50.000.000	0	Umum
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	850.000.000	850.000.000	845.250.000	Umum
		- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.500.000.000	1.617.500.000	1.450.014.165	Umum
		Kegiatan Penataan Organisasi				Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	171.524.591	150.824.591	136.658.107	Organisasi



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	234.368.269	234.368.269	195.825.090	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	374.529.747	373.911.747	327.988.858	Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	979.336.729	1.058.455.294	996.369.680	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	444.147.664	595.638.960	557.684.653	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	481.514.954	837.784.579	770.155.096	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	199.979.119	803.268.682	658.038.455	Pemerintahan
		- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	299.994.634	299.994.634	229.790.320	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	549.947.838	701.786.404	647.182.652	Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah				Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	249.985.025	320.340.825	307.593.196	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	10.726.341.951	10.223.341.951	10.098.123.198	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	28.083.650.645	28.472.070.645	27.359.672.310	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.417.275.164	4.613.338.510	3.856.666.218	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum				Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	573.773.396	1.091.543.825	920.109.651	Hukum
		- Fasilitas Bantuan Hukum	686.503.779	1.245.177.501	980.579.726	Hukum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	479.131.300	599.993.727	463.045.536	Hukum
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	324.256.714	257.711.714	147.669.012	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan distribusi perekonomian	130.973.270	192.697.270	160.098.881	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	293.147.263	436.847.263	406.095.965	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	49.738.387	56.488.387	43.103.000	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	662.150.082	662.038.082	616.256.832	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	811.951.500	811.951.500	787.945.000	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	437.794.000	437.794.000	418.245.396	Pengadaan Barang/Jasa



A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81	91,78	113,30 %

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dengan tersedianya data penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan hasilnya dapat bermanfaat sebagai :

1. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya pemenuhan kinerja pelayanan.
2. Diketuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Diketuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
5. Diketuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya.
7. Diketuinya Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit kerja yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan responden menurut tugas dan fungsi Bagian tersebut, hasil Survey tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. IPKP Sekretariat Daerah Triwulan I

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	557	570	544	601	548	553	561	565	582	
NRR Per Unsur	3,59	3,68	3,51	3,88	3,54	3,57	3,62	3,65	3,75	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,40	0,41	0,39	0,43	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	
IKM Per Unsur	9,97	10,20	9,74	10,76	9,81	9,90	10,04	10,12	10,42	
IKM Unit Pelayanan										90,97

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	557	570	544	601	548	553	561	565	582	
NRR Per Unsur	3,59	3,68	3,51	3,88	3,54	3,57	3,62	3,65	3,75	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,40	0,41	0,39	0,43	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	
IKM Per Unsur	9,97	10,20	9,74	10,76	9,81	9,90	10,04	10,12	10,42	
IKM Unit Pelayanan										90,97

Link Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan I Tahun 2024: <https://forms.gle/ZbnDAMIwD3YA42Kd6>

Atau scan BARCODE dibawah ini



Kepala Bagian Umum,

LATIF KAMARUDIN, S.P.
Pembina (T/ia)
NIP. 19740705 199403 1 004

Tabel. IPKP Sekretariat Daerah Triwulan II

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	552	548	534	589	556	556	547	539	587	
NRR Per Unsur	3.63	3.61	3.51	3.88	3.66	3.66	3.60	3.55	3.86	



Link Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan III Tahun 2024: <https://forms.gle/dqZYpCAYtaD8mLDv8>

Atau scan BARCODE dibawah ini

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nilai Per Unsur	543	548	543	574	547	555	558	547	558	
NRR Per Unsur = (R)	3,63	3,69	3,62	3,83	3,64	3,70	3,71	3,63	3,72	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x (1/9)	0,40	0,41	0,40	0,42	0,40	0,41	0,41	0,40	0,41	
IKM Per Unsur	10,06	10,14	10,05	10,22	10,06	10,21	10,20	10,12	10,22	
IKM Unit Pelayanan										10,26

<ul style="list-style-type: none"> - U1 & U8 - NRR - NRR - NRR - NRR 	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur/unsur pelayanan - Nilai rata-rata - Indeks Kepuasan Masyarakat - Jumlah NRR WM tertimbang - Jumlah NRR Tertimbang x TTS - Jumlah nilai per unsur (dikali jumlah kuadrat nilai skor) - NRR per unsur x 0,711 	<ul style="list-style-type: none"> - U1 Persewaan - U2 Prosedur - U3 Waktu Pelayanan - U4 Biaya Tarif - U5 Prilaku Staf/Baru Jasa Pelayanan - U6 Kompetensi Petawakan - U7 Perilaku Petawakan - U8 Material Pelayanan - U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
---	---	---

IKM UNIT PELAYANAN :	10,26
-----------------------------	--------------

Nilai Pelayanan :	88,21 - 100,00
A (sangat baik)	75,01 - 88,20
B (baik)	60,00 - 75,00
C (cukup baik)	45,00 - 60,00
D (tidak baik)	25,00 - 45,00

Kepala Bagian Umum,
LATIF KAMARUDIN, S.AP
Pembina (T/Wa)
NIP. 19740705 199403 1 004



Tabel. IPKP Sekretariat Daerah Triwulan IV

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	557	560	554	559	559	557	556	553	559	
NRR Per Unsur	3,71	3,73	3,69	3,73	3,73	3,71	3,71	3,69	3,73	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	
IKM Per Unsur	10,3	10,3	10,2	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2	10,3	
IKM Unit Pelayanan	0	6	5	4	4	0	9	3	4	92,76



NO/NO RESPONDEN	NILAI SURVEI PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unit	317	340	316	319	330	337	316	313	318	
NRH Per Unit = (Σ Nilai Per Unit ÷ Jml Responden) x 100	3,71	3,73	3,88	3,73	3,73	3,71	3,71	3,68	3,71	
NRH Rata-rata Per Unit = NRH Per Unit s.d. 111	6,41	6,42	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	
IKM Per Unit	90,30	91,36	91,25	91,34	91,34	91,30	91,29	91,23	91,34	
IKM Unit Pelayanan										92,76

-U1 s.d. U9	= Unit-unit pelayanan	U1	Pelayanan
-NRH	= Nilai rata-rata	U2	Prilaku
-NRH	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Status Pelayanan
-T	= Jumlah RHR KM terdistribusi	U4	Stapel Tarif
-T	= Jumlah RHR Terdistribusi x 170	U5	Proyek Apresiasi Jema'at Pelayanan
NRH Per Unit	= Jumlah nilai per unit dibagi Jumlah kuesioner yang telah	U6	Kompartemen Pelayanan
NRH Rata-rata per unit	= NRH per unit x 0,111	U7	Prilaku Pelayanan
		U8	Maklumat Pelayanan
		U9	Pemantauan/ Pengabdian, saran dan Masukan

IKM UNIT PELAYANAN : 92,76

Metrik Pelayanan :

A (Sangat Baik)	80,31 - 100,00
B (Baik)	65,81 - 80,30
C (Cukup Baik)	51,30 - 65,80
D (Tidak Baik)	36,80 - 51,29

Kepala Bagian Umum,

LATIF HAMASUDDIN, S.P.
 Pembina (V/III)
 NIP. 19740705 190403 1 004

Link Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan IV Tahun 2024: <https://forms.gle/ExYVMpTIV7v4k6>

Atau scan BARCODE dibawah ini



Gambaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada Triwulan I dengan nilai 90,97, Triwulan II dengan nilai 91,43, Triwulan III dengan Nilai 91,96 sedangkan Triwulan IV dengan nilai 92,76. Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I s.d IV masuk dalam kategori “SANGAT BAIK”. Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV sudah menggunakan fitur google formulir, dimana link dari google formulir tersebut akan disebarakan kepada para responden. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien, karna responden dapat mengisi kuisisioner lebih fleksibel dan hasil akan langsung terhubung dengan google drive sehingga dapat menghemat kertas.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Bagian Umum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						



NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan Dengan Baik	Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP	100%	100%	100%	

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan Dengan Baik dengan Indikator Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP**

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Pada tahun ini pengadaankendaraan dinas jabatan dilaksanakan dengan dengan pengadaan mobil dinas sebanyak 1 unit.



Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan kendaraan dinas sebanyak 27 unit yang akan digunakan oleh kassubag/subkoor pada masing-masing bagian untuk menunjang pekerjaan yang bersangkutan.



Pengadaan Sepeda Motor Operasional

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Pengadaan Peralatan dan Mesin

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib dengan Indikator Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda**

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pada tahun ini difokuskan pada pendataan kembali aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik pada instansi vertikal maupun instansi horizontal. Hal ini untuk tertibnya pencatatan aset yang dimiliki. Pada tahun sebelumnya terdapat 99 buah aset yang tidak ditemukan, untuk itu pada tahun ini penelusuran aset dilakukan secara masif dan berkala untuk menemukan aset tersebut.



Menginventarisasi Aset di KODIM 1009 Tanah Laut serta POLRES Tanah Laut

Pengecekan aset yang dimiliki secara berkala juga didampingi oleh BPK RI untuk kemudian dilakukan inventarisasi.



Pemeriksaan aset Kendaraan Dinas Beserta BPK RI

Untuk aset yang tidak terpakai maka akan disimpan pada gudang yang telah disediakan sesuai dengan SOP yang ada.



Penyimpanan Aset di Gudang

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dengan Indikator Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP**

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

**NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023**

**NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**



Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
89,44	89,81	89,94	90,07	90,97	91,43	91,96	92,76

Sub kegiatan bimbingan teknis dan implementasi perundang-undangan terealisasi pada bulan desember tahun 2024, kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM terkait implementasi E-Katalog versi 6 yang akan berlaku pada tahun 2025.



Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6

Penyediaan pakaian dinas untuk KDH sesuai dengan keperluan untuk menunjang kegiatan KDH, hal ini dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari KDH dengan anggaran yang tersedia.



Pengadaan baju PSL, PDU dan PDH Kepala Daerah



Untuk kegiatan pemulangan jenazah yang meninggal dalam melaksanakan tugas terealisasi untuk 1 orang yang meninggal pada saat bertugas pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Untuk kegiatan *Medical Chek Up* Kepala tidak direalisasi karena kondisi Pimpinan dalam keadaan sehat dikarenakan kendala yang ada dalam pelaksanaannya adalah kendala non teknis sehingga semua sudah berjalan sebagaimana aturan dalam pelaksanaannya. Untuk pengadaan pakaian dinas yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan pimpinan guna menunjang tugas dan meningkatkan wibawa Kepala Daerah.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum
terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2024	
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-Rata Capaian						



Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor LPPD	3.100	2,900	93,54%

Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan Visi dan misi pemerintah Daerah secara terukur, sebagai yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Capaian kinerja di sajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dinilai melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD). EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai sumber inovasi utama. Berdasarkan hasil EPPD tahun 2022 yang rilis oleh tim EPPD Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1-6646 Tahun 2023 tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota Tahun 2023, Kabupaten tanah Laut berada di peringkat 175 dari 414 kabupaten se-Indonesia dengan nilai 2,9275 dengan katagori sedang. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan katagori pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan dengan Indikator Presentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah**

Bahwa untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2024 terbitnya peraturan Daerah tentang pemekaran kecamatan, akan tetapi terjadi tidak di temukannya kesepakatan antara pansus I DPRD dan Pemerintah daerah terkait titik lokasi ibu kota kecamatan, sehingga tidak dapat terealisasi target dalam capaian kinerja. Kegiatan Otonomi Daerah menjadi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu



Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2024 adalah 75% sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 75%.

Bahwa untuk mendukung Indikator Sasaran Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Pembinaan Kecamatan
- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut
- Pengecekan batas desa pemekaran dilapangan dengan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan instansi/SKPD terkait.
- Melaksanakan rapat koordinasi Kecamatan.
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait pemekaran kecamatan.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan
- Menyiapkan kajian kebijakan untuk tahun 2025

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya permasalahan dilapangan diantaranya perbedaan persepsi penentuan titik batas desa pemekaran kecamatan.
- Pengumpulan data dukung pemekaran kecamatan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Desa dan Camat yang berbatasan serta instansi terkait agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin seluruh camat dan SKPD terkait.
- Mengoptimalkan kinerja Tim Batas Desa dan SKPD terkait inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan
- Melaksanakan koordinasi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut
- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dokumentasi kegiatan pemekaran kecamatan





❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan dengan Indikator Presentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah**

Bahwa untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Persentase kelurahan yang memiliki Administrasi Batas Wilayah antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah 100 % dari target dan capaian. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100%.

Bahwa untuk mendukung Indikator Sasaran Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Pembinaan Kecamatan
- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut
- Pengecekan batas desa pemekaran dilapangan dengan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan instansi/SKPD terkait.
- Melaksanakan rapat koordinasi Kecamatan.
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait pemekaran kecamatan.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya permasalahan dilapangan diantaranya perbedaan persepsi penentuan titik batas desa pemekaran kecamatan.
- Pengumpulan data dukung pemekaran kecamatan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Desa dan Camat yang berbatasan serta instansi terkait agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin seluruh camat dan SKPD terkait.

- Mengoptimalkan kinerja Tim Batas Desa dan SKPD terkait inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan
- Menyiapkan kegiatan kajian pemekaran wilayah kecamatan
- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Kecamatan :





❖ Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan IKK dengan indikator Persentase Pemenuhan IKK

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat telah dilaksanakan kegiatan:

- Tim Penyusun LPPD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut
- Melakukan pengumpulan Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari IKK Outcome yang berjumlah 123 IKK melalui e-LPPD Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung IKK LPPD.
- Penyampaian permintaan review IKK LPPD di SILPPD ke Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atau Tim Review Kabupaten / APIP .

Bahwa untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2022 tidak ada target dan capaian dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur dari yang semula terdapat di Kegiatan Otonomi Daerah menjadi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2022 adalah 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 100%.

Bahwa untuk mendukung Indikator Sasaran Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Pembinaan Kecamatan
- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut
- Pengecekan batas desa pemekaran dilapangan dengan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan instansi/SKPD terkait.
- Melaksanakan rapat koordinasi Kecamatan.
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait pemekaran kecamatan.



- Melakukan inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya permasalahan dilapangan diantaranya perbedaan persepsi penentuan titik batas desa pemekaran kecamatan.
- Pengumpulan data dukung pemekaran kecamatan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Desa dan Camat yang berbatasan serta instansi terkait agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin seluruh camat dan SKPD terkait.
- Mengoptimalkan kinerja Tim Batas Desa dan SKPD terkait inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan
- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.



Rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten Tanah Laut

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati**

Bahwa untuk mendukung sasaran meningkatnya kerja sama pemerintah daerah dengan capaian indicator jumlah perjanjian kerja sama yang berhasil di tindaklanjuti telah mencapai sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga dengan indikator Persentase Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Koordianasi kerja sama daerah (TKKSD).
- Fasilitasi pembahasan draft kerja sama daerah.
- Pemetaan Kerja sama Daerah.
- Penandatanganan kerja sama daerah.
- Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi kerja sama daerah.

Hambatan yang di temui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran:

- Pembahasan draf kerja sama yang mendadak /tidak terjadwal
- Belum terbitnya sk Pemetaan Kerja sama
- Sosialisasi yang massif
- Pemahaman akan pentingnya kerja sama daerah
- Belum sepenuhnya perangkat daerah melaksanakan kerja sama
- Selalu bergantung dengan anggaran



- Inovasi kerja sama yang masih kurang yang dilakukan perangkat daerah.

Solusi/upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut:

- Sosialisasi tentang pentingnya Kerjasama daerah
- Identifikasi data sebagai dasar untuk pemetaan kerja sama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten tanah Laut
- Melaksanakan pemetaan kerja sama daerah melalui Fokus Group Discussion (FGD) dan
- membangun kemitraan untuk Program Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan indikator Presentasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti**

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*) yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebanyak 11 Kali namun hanya terealisasi 8 kali (75%) hal ini dikarenakan terbenturnya dengan kegiatan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Penentuan jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) yang menyesuaikan jadwal pimpinan.
- Kehadiran Kepala SKPD yang diwakilkan oleh Sekretaris atau Kepala Bidang atau bahkan Kepala Seksi / Sub coordinator.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang sudah di agendakan agar tidak saling berbenturan, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu agenda lainnya.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) agar tidak terbentur dengan jadwal agenda pimpinan.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan indikator Presentasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten Yang diselenggarakan**

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan telah dilaksanakan kegiatan diantaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan membentuk Panitia Pelaksanaan hari besar tersebut. Persentase capaian pada Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan Tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan koordinasi SKPD dan dukungan seluruh stake holder di Kabupaten Tanah Laut terkait pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Nasional/Kabupaten yaitu Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79

Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 terlaksana dengan baik sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat terealisasi sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 berjalan sesuai dengan jadwal yang rencana dan telah di siapkan, sehingga kendala yang di hadapi telah bisa diselesaikan dari tahun sebelumnya ini menjadi perhatian dan diharapkan akan menambah peningkatan di athun yang akan dating. dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Secepatnya/lebih awal mengkoordinasikan terkait jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang sudah dilakukan adalah :

- Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.





Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Analisa Capaian Sasaran Strategis Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan	Presentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	100%	75%	75%	
		Presentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pemenuhan IKK	Persentase Pemenuhan IKK	100%	95%	95%	
3	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati	100%	108%	108%	
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Presentasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti	100%	75%	75%	
		Presentasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten Yang diselenggarakan	100%	100%	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Pemerintahan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
 Bagian Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2024		
			2022	2023	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Presentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	%	-	83,67%	100%	75%	75%
2	Presentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	%	-	-	100%	100%	100%
3	Persentase Pemenuhan IKK	%	95%	100%	100%	95%	95%
4	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati	%	100%	114%	100%	108%	108%
5	Presentasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti	%	76%	83%%	100%	75%	75%
6	Presentasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten Yang diselenggarakan	%	100%	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							

Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General	Nilai komponen rencana aksi	2,3	Belum rilis oleh KemenpanRB	
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP	11	11,05	100,45

1. Nilai komponen rencana aksi

Nilai komponen rencana aksi tahun 2024 belum rilis oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 2,29 dari total bobot sebesar 3.

Penajaman Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

Penyusunan rencana aksi yang berkualitas akan menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas pula. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 ada sebanyak 20 SKPD yang terlibat secara langsung baik pada implementasi reformasi birokrasi general maupun tematik.

Pada Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan utama reformasi birokrasi yaitu Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile, Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi, Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima, Pelaksanaan Core Values ASN.

Beberapa kegiatan utama pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi)

Penyederhanaan birokrasi merupakan upaya untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang dinamis dan agile; mewujudkan profesionalitas ASN; fokus pada pekerjaan fungsional; percepatan sistem kerja dan mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja.

Penyederhanaan birokrasi itu sendiri melalui tahapan: 1) Penyederhanaan Struktur Organisasi (berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Organisasi) dimana terjadi penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level; perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari Jabatan Administrasi tersebut dan berkoordinasi dengan Kemndagri; 2) Penyetaraan Jabatan (berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan



Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional) yakni pengalihan pejabat Jabatan Administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi Pejabat Jabatan Fungsional yang bersesuaian, pengembangan Jabatan Fungsional dan penyetaraan penghasilan; dan 3) Penyesuaian Sistem Kerja (berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja) yaitu penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital.

Tingkat capaian persentase penyederhanaan struktur organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah 88,41% berdasarkan perbandingan antara jumlah jabatan yang disederhanakan dengan jumlah jabatan yang seharusnya disederhanakan. Adapun rumus memperoleh capaian persentase sebagai berikut :

$$\text{PSO} : \frac{\text{A-B}}{\text{A-C}} \times 100\%$$

- A : Jumlah Jabatan Administrasi (Jabatan Administrator + Jabatan Pengawas)**
- B : Jumlah Jabatan Administrasi yang tersisa**
- C : Jumlah struktur yang dipertahankan sesuai kriteria PermenpanRB 25 Tahun 2021**

$$\text{PSO} : \frac{623-417}{623-390} \times 100\%$$

$$: \frac{206}{233} \times 100\%$$

$$: 88,41\%$$



Adapun proses pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) (asesment terhadap struktur organisasi perangkat daerah).

1) Tahap I (Penyederhanaan Struktur Organisasi)

- a) Surat Hasil Identifikasi Jabatan Administrasi yang berpotensi disederhanakan
 - Surat Bupati Tanah Laut kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 061/1820/Org pada 22 Juni 2021 perihal Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- b) Surat hasil Identifikasi Jafung yang dapat mewedahi uraian tugas dan fungsi Jabatan Administrasi yang disederhanakan
 - Surat Bupati Tanah Laut kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 061/1820/Org pada 22 Juni 2021 perihal Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- c) Penyampaian hasil identifikasi, verifikasi ke Provinsi untuk dibahas secara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Surat Bupati Tanah Laut kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 061/1820/Org pada 22 Juni 2021 perihal Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- d) Surat Penyampaian hasil verifikasi bersama hasil identifikasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional kepada Mendagri untuk direviu
 - Usulan PSO secara kolektif melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lewat surat Sekretaris Daerah Nomor 061/0460/ORG tanggal 24 Juni 2021 Hal Penyerahan Berkas Penyederhanaan



Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-
Provinsi Kalimantan Selatan

- e) Rekomendasi persetujuan Mendagri atas usulan dari Gubernur dan atau hasil penyempurnaan dari kabupaten/kota
- Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01428/ORG tanggal 13 Oktober 2021 Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4249/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal Pertimbangan Penyederhaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

2) Tahap II (Penyetaraan Jabatan)

- a) Hasil Pemetaan dan Analisis Penyetaraan jabatan Administrasi ke Jafung yang memiliki kesamaan karakteristik
- Surat Bupati Tanah Laut kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 061/1821/Org pada 22 Juni 2021 perihal Usulan Penyetaraan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- b) Surat Penyampaian usul penyetaraan jabatan dari Penjabat Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Mendagri
- Surat Bupati Tanah Laut kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 061/2839/Org pada 15 Oktober 2021 perihal Usulan Penyetaraan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- c) Pertimbangan teknis dari Gubernur
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8159/OTDA tanggal 10 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan



- d) Rekomendasi persetujuan dari Mendagri
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8159/OTDA tanggal 10 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- e) Penerbitan Peraturan Kdh (Gubernur/Bupati/Walikota) tentang SOTK
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
- f) Pelantikan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional Penyederhanaan Struktur Organisasi
 - Pelantikan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821/147-SI/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



b. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan Masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengeluarkan surat Bupati Tanah Laut Nomor : 000.8.3.4/584/ORG Tanggal 13 Maret 2024 Hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan bimbingan teknis serta pendampingan kepada beberapa SKPD khususnya yang

belum pernah melaksanakan SKM, serta mengingatkan seluruh SKPD terkait batas waktu pelaporan SKM.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 40 SKPD telah menyampaikan laporannya walaupun ada sebagian SKPD yang terlambat menyampaikan ke Bagian Organisasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, secara umum mencerminkan Tingkat kualitas yang baik dengan nilai IKM rata-rata yaitu 87,81, Nilai ini menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun (5 tahun terakhir), dapat dilihat melalui grafik berikut:



Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). PEKPPP dilaksanakan untuk:

1. Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan.
2. Mendapatkan nilai IPP.
3. Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala, dan



- 4. Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut memperoleh IPP 4,23 dengan kategori A- (Sangat Baik).

Untuk Tahun 2024 ini unit pelayanan yang dijadikan lokus penilaian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, RSUD Hadji Boejasin dengan perolehan nilai sebagai berikut:

- 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IPP : 4,64 dengan predikat A
- 2. Dinas Sosial IPP : 3,62 dengan predikat B
- 3. RSUD H. Boejasin IPP : 4,43 dengan predikat A-

Selain itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, Dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik), Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori A (Kualitas Tertinggi) dengan Nilai 92,91 (zona hijau). Adapun 6 Unit Layanan yang telah dilakukan penilaian oleh Ombudsman memperoleh nilai sebagai berikut:

NO	UNIT LAYANAN	DIMENSI PENILAIAN				NILAI
		INPUT (21,85)	PROSES (32,37)	OUTPUT (24,24)	PENGADUAN (21,54)	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,28	31,54	23,27	21,54	97,63



2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21,13	30,80	23,27	21,54	96,74
3	Dinas Sosial	19,61	30,80	23,27	21,54	95,22
4	Puskesmas Bati-Bati	19,63	28,86	23,27	21,54	93,30
5	Puskesmas Takisung	19,25	26,44	23,27	21,54	90,49
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18,58	23,49	23,11	18,88	84,07
Nilai Akhir dan Zona		92,91				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Adapun rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai antara 78,00 – 100, sebagaimana tercantum pada rekapitulasi hasil. Salah satu bentuk apresiasi dapat berupa diberikannya prioritas anggaran untuk unit tersebut, agar dapat terus meningkatkan serta menyempurnakan pelayanan publik, sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan penurunan mutu akibat keterbatasan anggaran.
2. Melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai antara 0 – 77,99, sebagaimana tercantum pada rekapitulasi hasil, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan konsep pelayanan publik.
3. Berkoordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia setempat guna memperkuat upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Nilai Komponen Pelaporan SAKIP

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented program).

Pada tahun 2024 SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh predikat BB dengan nilai 70,16 dengan nilai komponen pelaporan sebesar 11,01 atau dengan capaian sebesar 100,45% dari target yang ditetapkan sebesar 11.

Dilihat dari penilaian per komponen, dari ke 4 (empat) komponen penilaian SAKIP sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.3

Nilai Komponen SAKIP tahun 2022-2024

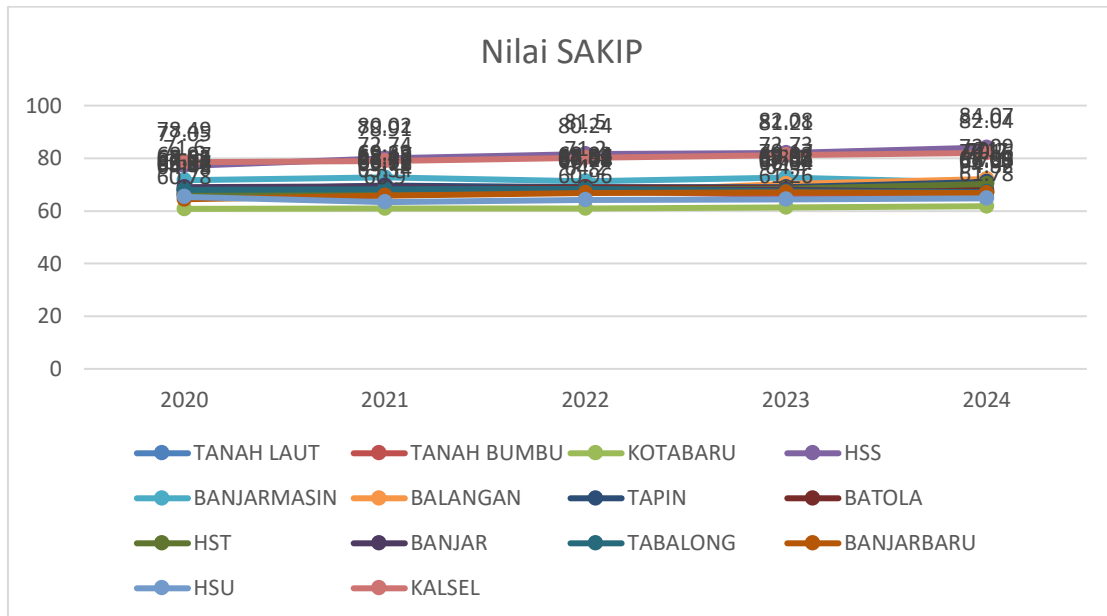
Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,59	22,59	23,46
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,50	19,50	20,21
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,67	11,01
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,76	14,76	15,46
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,28	67,52	70,16
Tingkat akuntabilitas kinerja			B	B	BB

Sumber: diolah

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nilai komponen pelaporan Kabupaten Tanah Laut masih jauh berada di bawah, dimana nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah A (81,21).

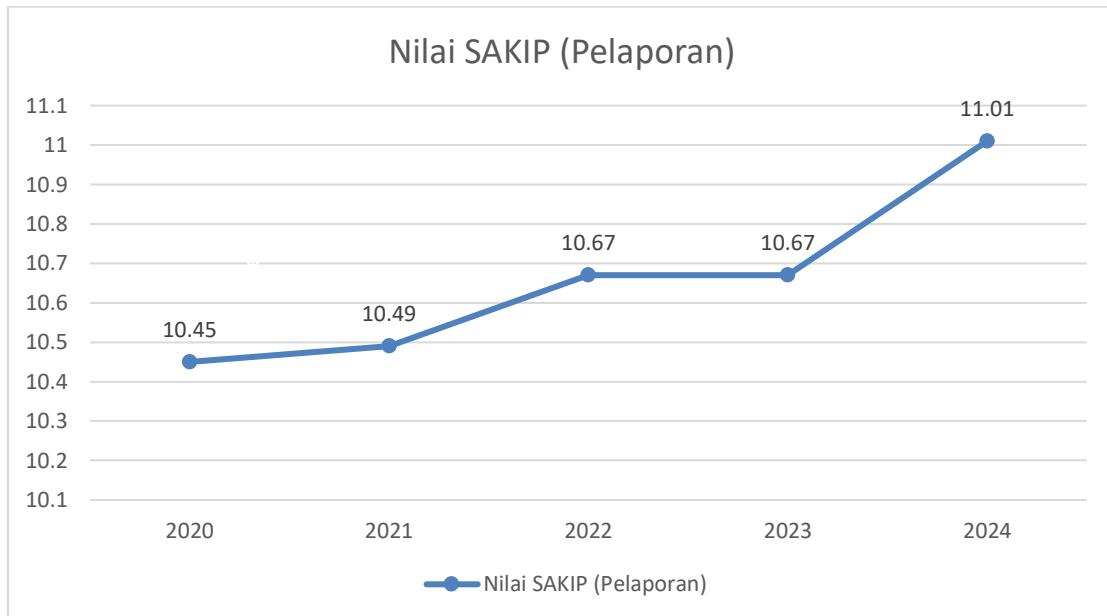
Grafik 3.3.1

Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nilai komponen pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tetapi pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan nilai yang signifikan sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3.2**Nilai SAKIP tahun 2019– 2024**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Kenaikan nilai yang agak signifikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya dipengaruhi salah satunya oleh kualitas Laporan Kinerja SKPD, dimana hasil evaluasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja, ada 35 SKPD dengan nilai di atas 11 dan 5 SKPD dengan nilai di bawah 11 atau sebesar 87,5%. Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa kualitas laporan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah berkualitas sangat baik. Pelaporan kinerja merupakan tahap akhir pelaporan SAKIP. Apabila kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berjalan baik maka bisa dikatakan pelaporan kinerja juga akan baik.



Tabel.....

NO	NAMA SKPD	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI	PREDIKAT
1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	25,50	24,60	13,05	20,75	83,90	A
2	Dinas Perhubungan	24,60	24,00	13,05	21,25	82,90	A
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25,20	24,60	12,30	20,75	82,85	A
4	Sekretariat Daerah	24,60	24,60	12,75	20,50	82,45	A
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	26,10	24,00	12,00	20,00	82,10	A
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	24,60	24,60	12,30	20,50	82,00	A
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24,60	24,60	12,30	20,50	82,00	A
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25,20	24,00	12,00	20,75	81,95	A
9	Dinas Pariwisata	25,20	24,00	12,00	20,75	81,95	A
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	24,60	24,60	12,75	20,00	81,95	A
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,50	24,00	11,55	20,75	81,80	A
12	Inspektorat Kabupaten	25,20	24,60	12,00	20,00	81,80	A
13	Dinas Kesehatan	25	24,60	12,30	20,00	81,50	A
14	Badan Pendapatan Daerah	24,60	24,60	12,30	20,00	81,50	A
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24,60	24,00	12,30	20,50	81,40	A



16	Sekretariat DPRD	25,20	24,00	12,00	20,00	81,20	A
17	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,70	24,00	12,75	20,75	81,20	A
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23,70	24,60	12,30	20,50	81,10	A
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	24,60	24,00	12,00	20,00	80,60	A
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23,70	23,10	12,00	20,75	79,55	BB
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	23,70	24,00	12,00	19,50	79,20	BB
22	Dinas Sosial	24,60	22,50	12,00	20,00	79,10	BB
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24,60	22,50	12,00	20,00	79,10	BB
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24,60	24,60	11,10	18,75	79,05	BB
25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	23,70	22,50	10,35	22,50	79,05	BB
26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	24,60	24,00	12,00	18,25	78,85	BB
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,70	24,60	11,10	19,25	78,65	BB
28	Kecamatan Takisung	24,60	23,10	10,80	20,00	78,50	BB
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,70	24,00	12,00	18,75	78,45	BB
30	Kecamatan Bajuin	23,10	23,10	11,25	20,00	77,45	BB
31	Kecamatan Pelaihari	23,10	24,00	11,25	18,75	77,10	BB
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,50	22,50	12,00	20,00	77,00	BB



33	Kecamatan Panyipatan	22,50	21,60	12,00	20,00	76,10	BB
34	Kecamatan Tambang Ulang	23,10	21,60	11,25	20,00	75,95	BB
35	Kecamatan Jorong	22	22,20	11,55	20,50	75,85	BB
36	Kecamatan Bati bati	22,50	23,10	11,25	18,75	75,60	BB
37	Kecamatan Batu Ampar	24,00	24,00	12,00	15,50	75,50	BB
38	Kecamatan Bumi Makmur	21,60	21,00	10,50	19,00	72,10	BB
39	Kecamatan Kurau	22,20	21,00	8,85	16,25	68,30	B
40	Kecamatan Kintap	20,10	15,90	8,40	19,25	63,65	B

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan kualitas laporan kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan pendampingan dan perbaikan Logical Frame Work pada level Kabupaten dan SKPD sesuai dengan PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja dimana pohon kinerja disusun dengan memperhatikan Critical Success Factor (CSF) dalam
2. Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang telah diperbaiki sebelumnya;
3. Melakukan reviu atas dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) seluruh SKPD dengan melihat pohon kinerja yang sudah dilakukan perbaikan dan dijadikan bahan evaluasi persiapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra seluruh SKPD;
4. Melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi E-SAKIP Tanah Laut sebagai aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja.



5. Melakukan pembinaan penyusunan dan penyeragaman format serta kategori informasi yang akan dituangkan dalam laporan kinerja kepada seluruh SKPD.
6. Memberikan punishment bagi SKPD yang tidak menyampaikan laporan kinerja tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
7. Melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja seluruh SKPD dalam memastikan kualitas akhir dari laporan kinerja yang telah disusun
8. Melakukan peningkatan kompetensi kepada evaluator internal terkait mekanisme dan pola evaluasi AKIP internal;
9. Seluruh SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator internal melalui laporan hasil evaluasi AKIP internal dengan mewajibkan setiap SKPD mengimplementasikan rencana aksi yang disusun terhadap tindak lanjut hasil evaluasi AKIP internal;
10. Memanfaatkan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari pemberian reward and punishment kepada PD dengan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Tanah Laut.
11. Penerapan penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja individu yang dikaitkan dengan pemberian tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui aplikasi e-kita.
12. Melakukan perumusan definisi operasional dan formulasi pengukuran pada Indikator Kinerja utama Pemerintah pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah.
13. Melaksanakan asistensi Laporan Kinerja (LKj) SKPD dengan berfokus pada penajaman analisa terhadap pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki serta analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan.
14. Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD dengan menggunakan teknologi informasi yaitu SAKUNTALA (Sistem Akuntabilitas Tanah Laut) sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, diharapkan dengan adanya system ini kinerja SKPD dapat lebih ditingkatkan. berikut tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2024:



Tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2024

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
19	A	47,5	Memuaskan
19	BB	47,5	Sangat Baik
2	B	5	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2023

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
6	A	15	Memuaskan
25	BB	62,5	Sangat Baik
5	B	12,5	Baik
2	CC	5	Cukup Baik
1	C	2,5	Kurang
1	D	2,5	Sangat Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 sebagian besar SKPD atau sebesar 95% telah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB atau dengan nilai di atas 70. Terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2023 dimana pada Tahun 2023 terdapat 31 SKPD atau sebesar 77,5% dengan nilai SAKIP minimal BB, 5 SKPD dengan nilai SAKIP Baik, 2 SKPD dengan nilai SAKIP cukup baik, 1 SKPD dengan nilai SAKIP kurang dan 1 SKPD dengan nilai SAKIP sangat kurang.



Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. belum optimal pelaksanaan reviu pada target kinerja karena masih ditemukan beberapa target kinerja pada perencanaan tahun berjalan lebih rendah dibandingkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya;
2. penjenjangan kinerja yang dimiliki beberapa SKPD, masih perlu disempurnakan. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa kinerja pada level taktikal sampai ke operasional belum sepenuhnya mengawal secara optimal kondisi kinerja di atasnya;
3. hasil pengidentifikasian crosscutting kinerja yang telah dilakukan khususnya dalam menjawab isu strategis pemerintah daerah belum sepenuhnya terkawal pada pohon kinerja SKPD sehingga berpotensi tidak berjalan efektif dalam implementasinya.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya melihat keterkaitan hasil pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan terhadap ketercapaian target kinerja yang dimiliki oleh level strategis, terutama pada SKPD yang mengawal program strategis di Kabupaten Tanah Laut;
5. Pengukuran kinerja individu belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang seharusnya dikawal sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja organisasi/SKPD;
6. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi SKPD, dan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.
7. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh SKPD belum secara spesifik menyampaikan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja yang sudah diperoleh dengan target akhir dokumen perencanaan. Sehingga data perbandingan untuk melihat sejauh mana posisi kinerja yang ada dalam mendukung kondisi akhir perencanaan belum andal dan transparan;



8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya maupun, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.
9. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator internal dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal belum menginformasikan secara spesifik permasalahan maupun rekomendasi yang menjadi akar permasalahan dari implementasi SAKIP setiap SKPD.
10. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat beberapa kinerja yang capaiannya belum tercapai sesuai target yang diperjanjikan maupun nasional.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah:

1. Melaksanakan reviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan baik level kabupaten maupun SKPD.
2. Melaksanakan pendampingan dan perbaikan pada beberapa SKPD yang pohon kerjanya belum sempurna untuk memastikan kinerja pada level taktikal dan operasional mengawal kinerja SKPD.
3. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan anggaran yang sesuai dengan porsinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.
4. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
5. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, dan hasil evaluasi dapat dijadikan untuk pemberian reward dan punishment bagi SKPD.
6. menciptakan pemahaman yang merata bagi APIP, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;



7. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja setiap pencapaian target SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2025-2029 yang didalam prosesnya akan di reviu lagi terkait penetapan target indikator kinerja berdasarkan kinerja perodesasi sebelumnya
2. Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2025-2029 yang didalamnya terdapat proses Reviu terhadap pohon kinerja level Kabupaten maupun SKPD
3. Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2025-2029 yang didalamnya terdapat proses Reviu terhadap pohon kinerja level Kabupaten maupun SKPD khususnya yang teridentifikasi crosscutting kinerja untuk menjawab isu strategis
4. Pelaksanaan Monev Kinerja Pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP
5. Pelaksanaan Monev Kinerja Pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang
6. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan penarapan E-Kinerjha dan evaluasi penerapan E- kinerja
7. Asistensi Peningkatan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
8. Melaksanakan reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah
9. Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2025-2029 yang didalamnya terdapat analisis evaluasi kinerja periode sebelumnya berdasarkan data dari LPPD dan Laporan Kinerja
10. Reviu penyusunan Perjanjian Kinerja level Pemerintah daerah dan level Perangkat Daerah
11. Melakukan pengembangan keahlian profesional, baik mengikuti diklat, bimtek, kaji tiru termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk menyelesaikan temuan dan perbaikan kinerja instansi pemerintah



12. Melakukan desk tindak lanjut hasil evaluasi akip tahun 2024, dan melakukan monev / verifikasi pada e sikip terhadap kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.
13. Melakukan perubahan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator yang salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh dikarenakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi saat ini sudah tidak dilakukan penilaian pada level SKPD.
14. Pengukuran kinerja individu (SKP) akan diintegrasikan dengan hasil pengukuran organisasi (PK) yaitu dengan menurunkan rencana aksi menjadi sasaran kinerja pegawai sehingga akan terlihat keterkaitan hasil pelaporan aktivitas dalam capaian kinerja.
15. Melakukan pendampingan penyusunan dan perbaikan laporan AKIP ke seluruh SKPD.
16. Monev terhadap hasil Tindak lanjut dan memastikan apakah hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
17. Melakukan pendampingan/ consulting untuk meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP SKPD

**Analisa Capaian Sasaran Strategis
Bagian Organisasi**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi RB General Dengan Baik	Persentase SKPD Yang Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja SKPD	Persentase SKPD Dengan Nilai Komponen Pelaporan Minimal 11	90%	87,5%	97,22%	
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

**Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase SKPD Yang Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi	%	-	100%	100%	100%	100%
2	Persentase SKPD Dengan Nilai Komponen Pelaporan Minimal 11	%	-	55%	90%	87,5%	97,22%
3	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	%	-	-	80%	80%	100%
	Rata – Rata Capaian						99,07%

Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82.5	82.45	99,93%

Pelaksanaan Indikator Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel diawali dengan :

1. Mengikuti sosialisasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3/3655/ORG/2024 Tanggal 9 Desember 2024.



2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.8.3/3745/ORG/2024 Tanggal: 14 Desember 2024 Hal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD
3. Dilanjutkan rapat intern dengan Tim Kinerja Sekretariat Daerah pada tanggal 9 Januari 2024 dengan agenda rapat :
 - Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Desember 2024 di Ruang Rapat Lantai III Sekretariat Daerah.



Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,45 dengan predikat “A”, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan”, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai AKIP
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15	12,75
d. Evaluasi Internal	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		82,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

- Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Desember 2024 di Ruang Rapat Lantai III Sekretariat Daerah.



4. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2024 telah disampaikan ke Bagian Organisasi pada tanggal 20 Januari 2024.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurang memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja
- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami sepenuhnya Sistem AKIP;
- Anggota Tim Penyusunan SAKIP dari Bagian-Bagian dalam menyampaikan data tidak tepat waktu; dan
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun Laporan Kinerja;
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen Laporan Kinerja; dan
- Intensitas komunikasi melalui WhatsApp Group dengan “Tim Kinerja” Sekretariat Daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan
- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja secara berkala;
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten; dan



- FGD

Pada Tahun Anggaran 2024 ini, Pelaksanaan Administrasi Bidang Perencanaan meliputi :

1. Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Tahun Anggaran 2025
2. Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah :
 - a. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1311/Perenc Makro/2024 Tanggal 3 Juni 2023 perihal Perubahan Renja SKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah dimulai dari bagian-bagian melakukan rumusan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerjanya. Kemudian rumusan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dihimpun dan diformalkan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disampaikan ke Tim RKPD BAPPEDA.
 - b. Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 oleh Tim RKPD BAPPEDA berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1311/Perenc Makro/2024 Tanggal 3 Juni 2023 perihal Perubahan Renja SKPD Tahun 2024, Hal Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan Eselon IV / Penanggungjawab Tupoksi Sekretariat Daerah dengan pembahasan : 1. Urgensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Prioritas Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 yang sifatnya wajib 2. Penyesuaian target Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Penyesuaian Pagu Anggaran.
 - c. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/1490/Perenc.Makro/2024 Tanggal 2 Juli 2024 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2024, maka dilaksanakan Rapat Intern Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan Eselon IV pada Tanggal 4 Juli 2023. Agenda rapat Penyampaian Pagu Anggaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023
 - d. Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 100.1.4.4/630/DPRD/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten



Tanah Laut terkait pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 2 Agustus 2024. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV/Penanggungjawab Tupoksi lingkup Sekretariat Daerah.

- e. Dilanjutkan pembahasan dan Reviu rumusan Program Kegiatan dan Sub kegiatan Perubahan Renja TA 2024 oleh Tim APIP di Ruang Kerja Irban IV Inspektorat Kabupaten
 - f. Hasil Reviu rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Daerah TA 2024 tertuang dalam Laporan Hasil Reviu sebagai berikut :
 - g. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 19 September 2024.
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 :
Sedangkan untuk pelayanan administrasi perencanaan dilaksanakan melalui :
- a. Menyiapkan bahan - bahan Renja APBD Murni dan APBD Perubahan (RKA dan Pagu KUA-PPAS) baik saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut maupun saat pembahasan dengan Tim RKPD BAPPEDA dan Tim TAPD BPKAD serta Tim APIP Inspektorat Kabupaten.
 - b. Menyusun konsep Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah untuk Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFU dan JFT.
 - c. Menyusun konsep Indikator Kinerja (IKU) dan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah untuk Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya kemampuan melakukan proyeksi kegiatan secara efektif
- Pedoman atau regulasi Penyusunan Rancangan Perencanaan Awal Kegiatan cenderung belum tervalidasi sampai ke sub kegiatan yang ada di SKPD.
- Pelaksanaan pada SIPD sering terkendala akibat gangguan server

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu penetapan pedoman atau regulasi dalam penyusunan Rancangan perencanaan awal sesuai dengan aturan terbaru.
- Sistem pada SIPD agar lebih disempurnakan lagi



- Melakukan koordinasi secara intens terkait penyusunan perencanaan dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Selalu melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan SOP
- Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan secara berkala
- Bimtek tentang teknik penyusunan perencanaan dengan BAPPENAS

Dalam Rangka pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah diawali dengan menetapkan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1469-KUM/2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, Mempunyai tugas :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah
- b) Menyusun Dokumen Pengesahan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- d) Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- h) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM)
- i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- k) Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- l) Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
- m) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
- n) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan atau menetapkan sebagian kewenangannya kepada :

1. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/1-KUM/2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung dan Surat Perintah Membayar – Tambah Uang;
 - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
 - h) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; dan
 - i) Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/3/KEP-SEKDA/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM);
 - c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;



- d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e) Menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - f) Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPM) atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
 - g) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPM)
3. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/4/KEP-SEKDA/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan tugas sebagai berikut:
- a) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaanteknis Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - b) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai barang/jasa
 - d) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - e) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
 - g) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - h) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
 - i) Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - j) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab pada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran



- k) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengamil alih mandat yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Menetapkan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1472-KUM/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan tugas sebagai berikut :
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung
 - Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU)
 - Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya
 - Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik
 - Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehubungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 9 (Sembilan) Bagian dengan anggaran yang cukup besar maka harus ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2 / 2 - KUM/2024 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) bagi SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/4- KUM/2024 Tentang Penetapan Besaran uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.



Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/3037/BPKAD/XI/2024 tentang Langkah – langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, hal ini dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2024 terkait perihal Belanja, Penatausahaan Aset, Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, dan Akuntansi.

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan Penatausahaan Keuangan yang tersaji pada tabel dibawah ini :

REKAPITULASI KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024		
NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Uang Persediaan (UP)	1 Kali
2	Ganti Uang (GU)	16 Kali
3	LS Gaji PNS	23 Kali
4	LS Gaji PPPK	15 Kali
5	LS Gaji PTT	12 Kali
6	LS TPP PNS & PPPK	15 Kali
7	LS Operasional KDH/WKDH	12 Kali
8	LS IWP 4%	12 Kali
9	LS Pihak ketiga	251 Kali
10	LS Honorarium	14 Kali
11	LS Belanja Hadiah	2 Kali
12	LS Beasiswa	1 Kali
13	LS Uang Harian	1 Kali
14	LS Perjalanan Dinas	1 Kali
15	LS Ongkos Naik Haji	1 Kali
16	LS Insentif Retribusi	1 Kali
TOTAL		378 Kali



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.000.000,00	172.775.000,00	150,24	121.675.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	115.000.000,00	172.775.000,00	150,24	121.675.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	115.000.000,00	172.775.000,00	150,24	121.675.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	115.000.000,00	172.775.000,00	150,24	121.675.000,00
5	BELANJA DAERAH	112.696.491.964,00	104.722.942.552,00	92,92	78.850.708.747,00
5.1	BELANJA OPERASI	98.560.193.681,00	91.758.263.762,00	93,10	77.828.908.691,00
5.1.01	Belanja Pegawai	25.136.642.676,00	23.312.635.364,00	92,74	20.854.190.451,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.331.551.005,00	58.440.717.398,00	92,28	48.176.731.776,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.092.000.000,00	10.004.911.000,00	99,14	8.797.986.464,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	98.560.193.681,00	91.758.263.762,00	93,10	77.828.908.691,00
5.2	BELANJA MODAL	14.136.298.283,00	12.964.678.790,00	91,71	1.021.800.056,00
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	8.900.220.885,00	7.955.269.000,00	89,38	1.021.800.056,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.236.077.398,00	5.009.409.790,00	95,67	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	14.136.298.283,00	12.964.678.790,00	91,71	1.021.800.056,00
	JUMLAH BELANJA	112.696.491.964,00	104.722.942.552,00	92,92	78.850.708.747,00
	SURPLUS/DEFISIT	(112.581.491.964,00)	(104.550.167.552,00)	92,87	(78.729.033.747,00)

Laporan LRA Tahun Anggaran 2024

1. Menetapkan Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/58-KUM/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
 - b) Menyimpan seluruh penerimaan
 - c) Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
 - d) Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank
 - e) Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya



- f) Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp. 115.000.000 dari hasil Retribusi Pemakaian Ruangan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp. 50.000.000
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp. 65.000.000
		Rp. 115.000.000

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan Sekretariat Daerah dilakukan melalui :

1. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2024.
2. Rapat Intern dengan pengelola pendapatan dan pelaksana pendapatan terkait strategi peningkatan pendapatan.
3. Menaikkan tarif sewa Gedung dan sewa BUS dengan diusulkannya Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- A. Tarif retribusi pemakaian ruangan yang baru dan lama dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Jenis Barang	Perda No 1 Tahun 2013	Perbup Nomor 24 Tahun 2023
1	Kursi	Rp. 1.000/buah	Rp. 5.000/buah
2	Sound System	Rp. 100.000/buah	Rp.500.000/buah
3	Balairung Tuntung Pandang	Rp. 400.000/siang	Rp.750.000/siang



		Rp. 500.000/malam	Rp.850.000/malam
4	Gedung sarantang Saruntung	Rp. 300.000/siang	Rp. 650.000/siang
		Rp. 400.000/malam	Rp. 750.000/malam
5	Sewa Kantin	Rp. 50.000/Bulan	Rp. 350.000/Bulan
6	Fasilitas ruang rapat Barakat	-	Rp. 350.000/siang
			Rp 450.000/malam
7	Gedung PKK	-	Rp. 400.000/siang
			Rp 500.000/malam

B. Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024 S/D Tahun 2026

No	Objek Retribusi	Tahun (Rp)				
		2023	2024	2025	2026	
1	Retribusi Pemakaian Ruang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Ged. Balairung, Ged.SS, R. Barakat, Gedung PKKI dan Kantin Setda
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000	65.000.000	100.000.000	100.000.000	BUS, ELP
	JUMLAH	110.000.000	115.000.000	150.000.000	150.000.000	

Dalam rangka sinkronisasi pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tanah Laut yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, maka perlu dilaksanakan kegiatan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 21 s.d 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Nomor 900/297/BPKAD-AKT/III/2024 perihal Undangan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV Tahun 2023.



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023

Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/730/BPKAD-AKT/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan I Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024



Selanjutnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 dan pemantapan proyeksi pendapatan tahun 2025 maka diadakan rapat monitoring tersebut pada tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan Badan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.3.2/263/BAPENDA tanggal 29 April 2024 Perihal Rapat Undangan Capacity Building, dengan agenda rapat :

1. Evaluasi Realisasi Pendapatan Tahun 2024.
2. Pemantapan Proyeksi Tahun 2025.
3. Pembahasan Insentif.
4. Penyampaian Kemajuan Implementasi Transaksi Non Tunai dan IBB.
5. Hal – Hal lain yang dianggap perlu.



*Dokumentasi Undangan Capacity Building
Tahun Anggaran 2024*

Terkait dengan pelaporan pendapatan Sekretariat Daerah dilakukan melalui :

1. Rekon Pendapatan Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
2. Laporan Bulanan Pendapatan Sekretariat Daerah yang disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah
3. Laporan Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2023

Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/944/BPKAD-AKT/IX/2024 Tanggal 09 September 2024.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan II Tahun 2024

Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 07 Nopember 2024 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/1121/BPKAD-AKT/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan III Tahun 2024

Adapun realisasi pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terinput dalam aplikasi SIPD dan SIKAT Pendapatan melebihi target tahunan yaitu sebesar 150,24%, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000	98.750.000	



2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	65.000.000	74.025.000	
	TOTAL	115.000.000	172.775.000	150.24%

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu terkadang kurang teliti dalam hal Penginputan SPj kedalam aplikasi SIPD-RI.
2. Kurangnya fitur pada aplikasi SIPD khususnya terkait fitur Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Terjadi pemborosan waktu karena terkait laporan Penatausahaan Keuangan Daerah dilakukan 2 (dua) kali penginputan yaitu, data laporan Penatausahaan Keuangan Daerah di input terlebih dahulu kedalam SIPD selanjutnya di input kembali ke dalam aplikasi Financial Management Information System (FMIS) BPKP. Dan penginputan sistem ini akan berlaku juga untuk tahun selanjutnya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Diadakan pembekalan mengenai mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat secara berkesinambungan.
- Agar dilengkapinya fitur dalam aplikasi SIPD
- Aplikasi SIPD dan FMIS BPKP di integrasikan agar memudahkan penginputan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Agar dilakukan FGD
- *Sharing Knowledge* antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan dengan admin SIPD



Analisa Capaian Sasaran Strategis
Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISAS I 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Yang Benar dan Tepat Waktu	Nilai Komponen Perencanaan AKIP Sekretariat Daerah	24 Nilai	24.60	102.5%	
		Nilai Komponen Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Daerah	20 Nilai	20.50	102.5%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah Yang Sesuai Dengan Sistem AKIP	Nilai komponen Pelaporan AKIP Sekretariat Daerah	11 Nilai	12.57	114.27%	
3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Tepat Waktu	100%	100%	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan
terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2024	
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Komponen Perencanaan AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	24.99	24,60	24 Nilai	24.60	102.5%
2	Nilai Komponen Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	21.675	20.50	20 Nilai	20.50	102.5%
3	Nilai komponen Pelaporan AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	12.495	12.3	11 Nilai	12.57	114.27%
4	Persentase Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian							104,8%

Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	79	82.60	104%

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) UKPBJ Kab. Tanah Laut memiliki target kinerja 79 di tahun 2024. Adapun hasil realisasi ITKPNya yaitu 82.60 di tahun 2024.

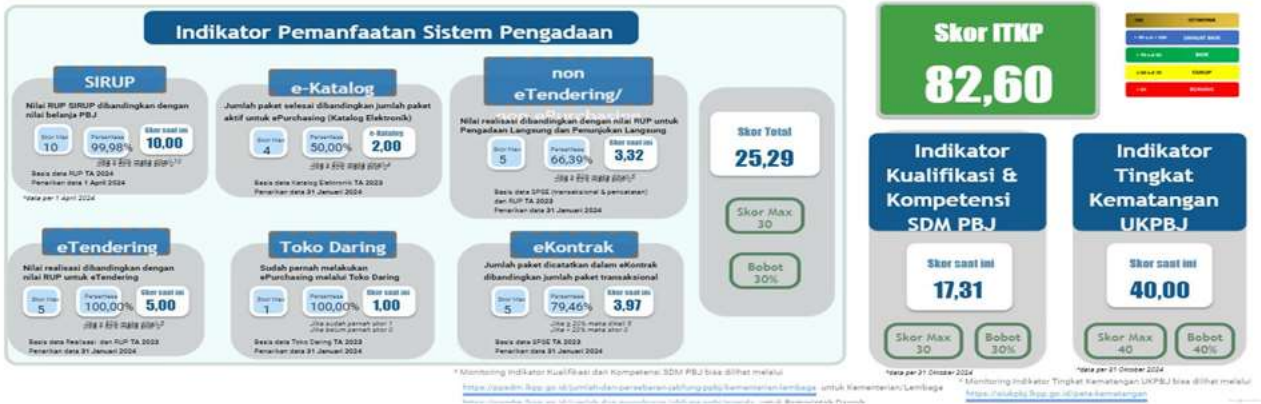
Hasil final penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Final ITKP 2023 UKPBJ Kabupaten Tanah Laut (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index>)

Hasil final penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut:

**HASIL FINAL
 INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN 2024**

 K/L/Pemda: Kabupaten Tanah Laut (1) ▾


Gambar 2. Hasil Final ITKP 2024 UKPBJ Kabupaten Tanah Laut
<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index>

Tabel 3.1 Perbandingan Hasil Final ITKP Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Penilaian	Penilaian Tahun 2023	Penilaian Tahun 2024
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan		
	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	10.00	10.00
	E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat)	3.09	5.00
	E-Purchasing	0.00	2.00
	Toko daring	1.00	1.00
	Non-E-Tendering	4.99	3.32
	e-Kontrak	4.44	3.97
	Total Pemanfaatan Sistem Pengadaan	23.52	25.29
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	17.31	17.31
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00	40.00
	TOTAL	80.83	82.60

Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan hasil final ITKP Tahun 2023 dan Tahun 2024 diketahui bahwa:

1. Terjadi peningkatan penilaian pada indikator pemanfaatan E-Tendering dan pemanfaatan e-purchasing.
2. Terjadi penurunan penilaian pada indikator pemanfaatan Non E-Tendering dan pemanfaatan E-kontrak.
3. Nilai tetap untuk Indikator pemanfaatan SiRUP, pemanfaatan toko daring, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dan tingkat kematangan UKPBJ.

Hasil final ITKP tahun 2024 yaitu 82.60, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu 80.83. Perhitungan capaian nilai ITKP yakni nilai realisasi 2024 dibanding nilai target kinerja 2024 dikali 100% diperoleh hasil sebesar 104% melebihi target sebesar 4%.

Analisis terhadap perolehan nilai ITKP tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Aplikasi SIRUP memberikan ruang bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dilakukan setelah penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.

Capaian nilai pemanfaatan SiRUP adalah 10.00 pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hal tersebut **menunjukkan konsistensi dalam pemanfaatan SiRUP** oleh SKPD dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Namun berdasarkan temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan informasi bahwa ada ketidaksesuaian pada Jadwal pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Paket Pengadaan beberapa SKPD, yang mana pada Dokumen Kontrak menyatakan Pemilihan Penyedia dilaksanakan pada triwulan 3 dan pelaksanaan kontrak pada triwulan 4. Sedangkan pada SRUP direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 1.

2. Pemanfaatan sistem E-Tendering

E-Tendering adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP. Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

Untuk pemanfaatan sistem E-Tendering, nilai UKPBJ Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dari nilai 3.09 di tahun 2023 menjadi 5.00 di tahun 2024.

Di tahun 2023, dengan perolehan nilai 3.09 diketahui bahwa jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE **tidak berkesesuaian** dengan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

Adapun di tahun 2024, perolehan nilai pemanfaatan sistem e-tendering mencapai angka 5.00, mendapatkan nilai maksimal dari ketentuan sebesar 5. Hal tersebut menunjukkan Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE **berkesesuaian** dengan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

3. Pemanfaatan sistem E-Purchasing

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Proses E-purchasing meliputi:

- a) Pembuatan Paket E-Purchasing;
- b) Negosiasi (bila ada) dan Persetujuan Paket E-Purchasing;
- c) Pembuatan Surat Pesanan/Kontrak;
- d) Pengiriman Barang/jasa;
- e) Serah Terima barang/jasa;
- f) Pembayaran; dan
- g) Penilaian kinerja Penyedia.

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima pada aplikasi katalog

paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

Untuk pemanfaatan sistem E-Purchasing nilai UKPBJ Kabupaten Tanah Laut **mengalami peningkatan** dari nilai 0.00 di tahun 2023 menjadi 2.00 di tahun 2024.

Di tahun 2023, diperoleh nilai 0.00 untuk pemanfaatan sistem E-Purchasing UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Hal ini menunjukkan bahwa banyak paket e-purchasing sudah selesai, namun (> 50%) SKPD belum menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 50% (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik.

Adapun di tahun 2024, perolehan nilai pemanfaatan sistem E-Purchasing UKPBJ Kabupaten Tanah Laut yaitu 2.00. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai > 50% (lebih dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dari jumlah paket pengadaan yang terumumkan di aplikasi SiRUP.

4. Pemanfaatan sistem Toko Daring

Capaian nilai pemanfaatan sistem Toko Daring adalah 1.00 pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dalam pemanfaatan sistem Toko Daring oleh SKPD dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun toko daring yang dimiliki oleh adalah Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut). Sosialita merupakan aplikasi yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang bersumber dari APBDes, BLUD, dan BUMD dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku dengan menggunakan aplikasi Sosialita.

Total transaksi pengadaan melalui Toko Daring Lokal "Sosialita", tertanggal 10 Desember 2024, yaitu Rp. 83.661.150.184,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Adapun pajak yang disetorkan setelah transaksi pengadaan melalui Toko Daring Lokal Sosialita yaitu sebesar Rp. 1.193.310.771,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

5. Pemanfaatan sistem Non e-Tendering

Ruang lingkup Non E-Tendering adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan. Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering pada aplikasi SiRUP.

Capaian nilai pemanfaatan sistem Non e-tendering adalah 4.99 pada tahun 2023 dan 3.32 tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan penilaian pada indikator pemanfaatan Non E-Tendering.

Adapun analisis terjadinya penurunan nilai dalam pemanfaatan sistem e-tendering yaitu:

- a. Tahun 2023 SKPD Kab. Tanah Laut sudah menerapkan > 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) Non E-Tendering melalui transaksional ataupun pencatatan berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, sehingga capaian sistem non e-tendering di tahun 2023 mencapai 4.99.
- b. Tahun 2024 SKPD Kab. Tanah Laut sudah menerapkan Non E-Tendering melalui transaksional ataupun pencatatan berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, namun jumlah SKPD yang sudah melakukan transaksional ataupun pencatatan masih < 50%, sehingga capaian pemanfaatan sistem non e-tendering di tahun 2024 hanya mencapai 3.32.
- c. Penurunan dalam pemanfaatan sistem non e-tendering berupa pencatatan di 2024 dikarenakan SKPD Kab. Tanah Laut banyak yang menunda melakukan pencatatan transaksional hingga akhir tahun, sehingga ketika penarikan data pemanfaatan sistem transaksional pencatatan masih rendah. UKPBJ Kab. Tanah Laut sering melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait sistem transaksional pencatatan, namun SKPD banyak yang tidak menindaklanjuti.

6. Pemanfaatan sistem E-Kontrak

E-Kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP. Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan harus dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Jika SKPD sudah menerapkan > 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian. Namun, jika

SKPD sudah menerapkan < 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, maka diberi nilai 0 (nol).

Capaian nilai pemanfaatan sistem adalah 4.44 pada tahun 2023 dan 3.97 tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan penilaian pada indikator pemanfaatan Sistem E-Kontrak. Adapun penyebabnya adalah hanya sedikit SKPD yang menerapkan E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE.

7. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP. Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP.

Berdasarkan Rekomendasi LKPP RI, jumlah JF PPBJ yang harus terpenuhi adalah 26 orang. Sedangkan jumlah JF PPBJ yang tersedia di Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut adalah 15 orang. Sehingga nilai pemenuhan ketersediaan formasi JF PPBJ untuk ITKP UKPBJ Kab. Tanah Laut yaitu 17.31, baik di tahun 2023 maupun 2024.

Agar dapat meningkatkan nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ pada UKPBJ Kab. Tanah Laut maka satu-satunya cara adalah menambah ketersediaan Fungsional Pengelola PBJ di Pemerintah Kab. Tanah Laut, sehingga nilai Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dapat meningkat.

8. Tingkat Kematangan UKPBJ

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 (empat) domain yaitu: Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Setiap domain tersebut memiliki variabel masing-masing yaitu:

- a. Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan variabel Tugas dan Fungsi.
- b. Domain SDM dengan variabel Perencanaan SDM dan variabel Pengembangan SDM.

- c. Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, variabel Manajemen Penyedia, variabel Manajemen Kinerja dan variabel Manajemen Risiko, dan
- d. Domain Sistem Informasi dengan variabel Sistem Informasi.

Setiap Pemerintah Daerah wajib membentuk UKPBJ, yang mana UKPBJ diwajibkan memenuhi Tingkat Kematangan level 3 Proaktif.

Tingkat Kematangan UKPBJ Kab. Tanah Laut telah mencapai level 3 Proaktif, sehingga memperoleh nilai maksimal 40.00.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian ITKP adalah sebagai berikut

1. Kegiatan Pendampingan Penginputan RUP di aplikasi SiRUP bagi Admin SiRUP SKPD oleh UKPBJ Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan penginputan RUP oleh Admin SiRUP di aplikasi SiRUP

2. Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kontrak dalam PBJ Pemerintah bagi PA, KPA, PPK SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kontrak dalam PBJ Pemerintah bagi PA/KPA, PPK SKPD

3. Kepesertaan dalam Bimbingan Teknis Implementasi dan Strategi Pengadaan melalui E-Purchasing pada E-Katalog Versi 6 untuk Pemerintah Daerah.



Gambar 5. Bimbingan Teknis Implrmentasi dan Strategi Pengadaan melalui E-Purchasing pada E-Katalog Versi 6 untuk Pemerintah Daerah di Hotel Novotel Banjarbaru

4. Kegiatan Pendampingan Pencatatan Realisasi PBJ Pemerintah bagi Admin SiRUP SKPD oleh UKPBJ Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 6. Kegiatan Pendampingan Pencatatan Realisasi PBJ Pemerintah bagi Admin SiRUP SKPD oleh UKPBJ Kabupaten Tanah Laut

Kendala dalam pencapaian ITKP adalah sebagai berikut:

1. SKPD belum melakukan proses penilaian kinerja penyedia pada aplikasi e-purchasing.
2. SKPD belum melakukan pencatatan pada SPSE untuk paket pengadaan langsung dan penunjukkan langsung, yang tidak dilakukan secara transaksional atau dilakukan di luar SPSE.
3. SKPD belum menginput e-kontrak pada SPSE untuk paket tender, seleksi, tender cepat, pengadaan langsung dan penunjukkan langsung yang dilakukan secara transaksional atau di dalam sistem SPSE.
4. Tidak terpenuhinya jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan jumlah yang tertera pada rekomendasi LKPP RI.

Saran dalam pencapaian nilai ITKP yaitu:

1. Harus memperhatikan tanggal penting dalam penilaian ITKP.
2. Untuk meningkatkan indikator e-purchasing, segera lakukan proses penilaian kinerja penyedia yang sudah dilakukan kontrak, pengiriman, serah terima dan pembayaran.
3. Untuk meningkatkan indikator e-purchasing, segera lakukan pembatalan paket untuk paket e-purchasing yang batal/tidak terlaksana.
4. Untuk indikator non e-tendering dan non e-purchasing, maka segera lakukan pencatatan pada SPSE, untuk paket pengadaan langsung dan penunjukkan langsung, yang tidak dilakukan secara transaksional atau dilakukan di luar SPSE.

5. Untuk meningkatkan indikator e-kontrak maka segera input e-kontrak pada SPSE untuk paket tender, seleksi, tender cepat, pengadaan langsung dan penunjukkan langsung yang dilakukan secara transaksional atau di dalam sistem SPSE.
6. Perlunya penerimaan ASN dengan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan jumlah yang tertera pada rekomendasi LKPP RI.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan, guna meningkatkan nilai capaian ITKP yaitu

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap SKPD terkait penginputan SIRUP, penilaian kinerja pada e-purchasing, penginputan non e-tendering dan non e-purchasing melalui pencatatan pada SPSE dan penginputan e-kontrak pada SPSE.
2. Memberikan penghargaan bagi SKPD yang tertib dalam pelaksanaan input SiRUP, e-purchasing, pencatatan transaksional non e-tendering dan e-purchasing dan penginputan e-kontrak.
3. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM guna membuka lowongan ASN (PNS dan PPPK) dengan jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan jumlah rekomendasi LKPP RI terkait ketersediaan JF PPBJ.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kematangan UKPBJ dengan Indikator Level Kematangan UKPBJ**

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 (empat) domain yaitu: Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Setiap domain tersebut memiliki variabel masing-masing yaitu:

- a. Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, variabel Manajemen Penyedia, variabel Manajemen Kinerja dan variabel Manajemen Risiko,
- b. Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan variabel Tugas dan Fungsi.
- c. Domain SDM dengan variabel Perencanaan SDM dan variabel Pengembangan SDM.
- d. Domain Sistem Informasi dengan variabel Sistem Informasi.

Ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yang terdiri dari :

1. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
2. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
3. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
4. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
5. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu PROAKTIF untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence). Dan UKPBJ Kab Tanah Laut telah mencapai level 3 Proaktif.

Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP BJ) terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, sebagai berikut:

- a. PKP-BJ Proaktif;
- b. PKP-BJ Strategis; dan
- c. PKP-BJ Unggul.

UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan paling kurang Proaktif dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi PKP-BJ. Adapun Permohonan penetapan PKP-BJ dapat diajukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah pencapaian tingkat kematangan. UKPBJ yang dinyatakan layak sebagai PKP-BJ oleh LKPP akan diberikan sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ.

UKPBJ Kab. Tanah Laut telah mencapai tingkat kematangan level 3 proaktif, namun belum menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ). Untuk itu UKPBJ Kab. Tanah Laut harus berupaya menjadi PKP-BJ.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan oleh UKPBJ Kab. Tanah Laut untuk menjadi PKP BJ adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan LKPP RI terkait syarat untuk menjadikan UKPBJ Kab. Tanah Laut sebagai PKP BJ.
2. Memenuhi bukti dukung dan persyaratan guna menjadikan UKPBJ Kab. Tanah Laut sebagai PKP BJ.
3. Mengajukan permohonan kepada LKPP untuk ditetapkan menjadi PKP-BJ.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE. Untuk memastikan keabsahannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://office.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://certificat.lkpp.go.id/kcsd/ver>

Token: nGCMIS
Nomor Tiket: GA202403080001

GAMBAR 6

Piagam Penghargaan UKPBJ Kabupaten Tanah Laut capai Tingkat Kematangan Level 3 Proaktif tahun 2024



**Analisa Capaian Sasaran Strategis
Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Level Kematangan UKPBJ	%	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	100%



Analisa Capaian Sasaran Strategis

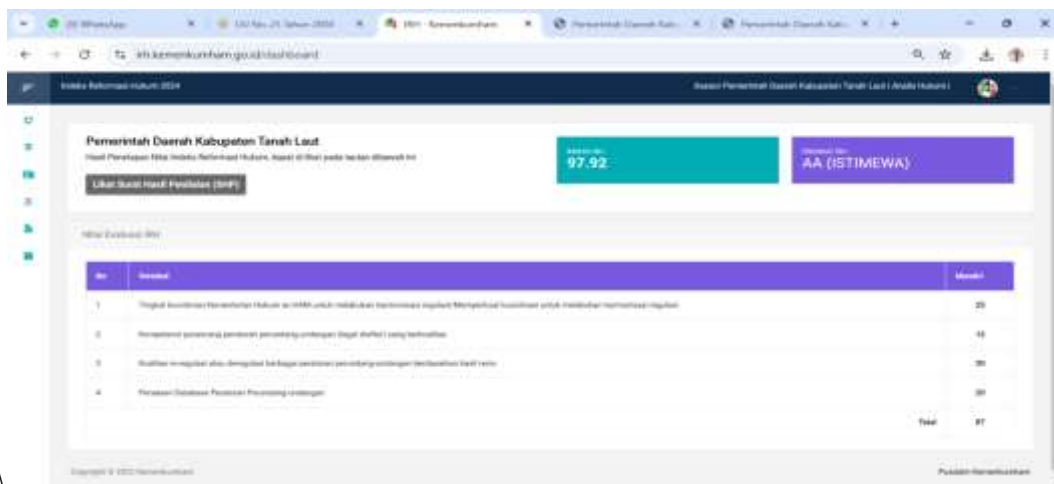
No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	80	97.92	122,4%

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah hukum yang ada di masyarakat

Indeks Reformasi Hukum merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam pengukuran Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk Kabupaten Tanah Laut dan mendapatkan nilai akhir 97.92 dengan kategori AA (Istimewa) dengan capaian 122,4 %. Dari 13 Kabupaten/Kota Se-kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut menduduki peringkat 5 dengan nilai tertinggi Se-Kalimantan Selatan.





(Screenshot website <http://irh.kemenkumham.go.id/dashboard>)



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimil : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemenkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-485 11 November 2024
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Bupati Tanah Laut
di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah **97.92** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
i	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25

(Screenshot website <http://irh.kemenkumham.go.id/dashboard>)



1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	18
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	7
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	18.5
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	3.5
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	3
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	12
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	29.1
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	5.1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/ yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	17
1	Pengelolaan JDH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	17
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	89.6

(Screenshot website <http://irh.kemenkumham.go.id/dashboard>)



Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	89.60
2	Nilai Apresiasi	8.32
3	Nilai Akhir	97.92

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

Tembusan:

1. Menteri Hukum
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Screenshot website <http://irh.kemenkumham.go.id/dashboard>)



❖ Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap *draft* rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan. Dan khusus untuk Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Untuk Tahun 2024 ada sebanyak 12 Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan sebelumnya telah dilakukan fasilitasi dan harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 66 Peraturan Bupati, 1534 Keputusan Bupati dan 12 Instruksi Bupati. Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat direalisasikan 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama terutama rancangan peraturan daerah yang terkadang terkendala dalam proses di DPRD
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap draft dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik) serta materi muatan yang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke kementerian / lembaga terkait atau pakar hukum atau tenaga ahli.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke bagian hukum

- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.
- Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber.
- Penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.



(Dokumentasi Kegiatan FGD Diseminasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa)



(Dokumentasi Kegiatan Kuliah Umum Hukum KUHP Baru)



(Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah)



(Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah)



(Screenshot website <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>)



(Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah)



(Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah)



(Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah)



❖ **Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang terselesaikan**

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemberian layanan bantuan hukum bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah berjumlah 3 (tiga) kasus/perkara hukum yang telah dibantu penanganannya oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah melalui Sub Kegiatan Bantuan Hukum. Kasus/Perkara hukum yang telah ditangani terdiri dari 3 (tiga) perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 631/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (turut tergugat II) melawan PT.Perintis Embee yang saat ini masih dalam tahapan proses banding. Kemudian 1 (satu) perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Register Perkara 2/Pdt.G/2024/PN Dpk antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tergugat IV) melawan Hj. Indah Varliyani yang saat ini dalam tahapan proses banding, serta 1 (satu) perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.G/2024/PN Pli antara drh. Bambang Trigunadi (Direktur PT.Bimo Taksoko Gono) melawan PD.Baratala Tuntung Pandang (Tergugat I) yang saat dalam proses tahapan persidangan tingkat pertama.

Dalam fasilitasi penanganan kasus/perkara tidak dapat diprediksi kapan kasus tersebut selesai, karena masih ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak sehingga waktu atau proses hukum akan tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa telah dilakukan fasilitasi bantuan hukum terhadap semua kasus yang telah dimintakan pendampingan, sehingga persentase kasus/perkara hukum yang ditangani dengan target 100% yang telah dibuat sebelumnya telah terealisasi semua (100%) sehingga capaiannya sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan indikator tersebut terdapat kendala diantaranya :

Kurang tanggapnya Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas-berkas atau dokumen dokumen terkait yang diperlukan untuk kepentingan penerima kuasa untuk membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan dan hadir pada saat proses mediasi dan siding pemeriksaan setempat.



Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemberi kuasa agar berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait dapat dilengkapi.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam tahapan persiapan sampai dengan tahapan penanganan perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.



(Dokumentasi Penanganan Perkara Perdata dengan Nomor Register
631/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel)



(Dokumentasi Penanganan Perkara Perdata dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Dpk)



(Dokumentasi Penanganan Perkara Perdata dengan Nomor Register 55/Pdt.G/2024/PN Plj)

Analisa Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan	Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Penyelesaian Kasus/Perkara Hukum di Pemerintah Daerah	Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang terselesaikan	100%	100%	100%	

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Hukum dari 2 (Dua) indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase informasi produk hukum pada Tahun 2024 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
- 2) Persentase produk hukum yang harmonis pada Tahun 2024 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata – Rata Capaian						100%



Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81	91,78	113,30 %

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat ini menjadi instrumen untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) yang terbagi dalam tiga sub bagian, menjadi terbantu dengan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat, karena dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Bagian Prokopim, serta kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan.

Adanya data dan informasi dapat membantu kualitas pelayanan, dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif antar bagian penyelenggaraan pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. Serta menjadi sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Bagian Prokopim.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Publikasi Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah dengan Indikator Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP**

Indikator persentase penyebaran informasi kegiatan pimpinan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media sesuai SOP dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan, dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terpublikasikan melalui media elektronik, media online maupun media sosial dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program



Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, pada sub kegiatan fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Kendala yang dihadapi adalah :

- Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui web dan media sosial, SDM-nya kurang tanggap terhadap informasi yang harus dipublikasikan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM agar lebih tanggap mengelola informasi yang dipublikasikan melalui web dan media sosial.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM melalui bimtek agar lebih tanggap dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah melalui web dan media sosial yang dikelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



PROKOPIM
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut



Prokopim Kab. Tanah Laut

1,4 rb pengikut • 0 mengikuti

Mengikuti

Kirim pesan

Cari

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Reels Foto Lainnya

Intro

Media Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dikelola Oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Halaman Facebook ini adalah lanjutan dari halaman facebook Humas Kab. Tanah Laut.

- Halaman Organisasi Pemerintah
- Pelaihari, South Kalimantan
- 0818-0820-3557
- pemberitaansetdata@gmail.com
- prokopimtala
- setda.tanahlautkab.go.id
- Belum dinilai (0 Ulasan)

Foto

Lihat Semua Foto



Postingan

Filter

Prokopim Kab. Tanah Laut

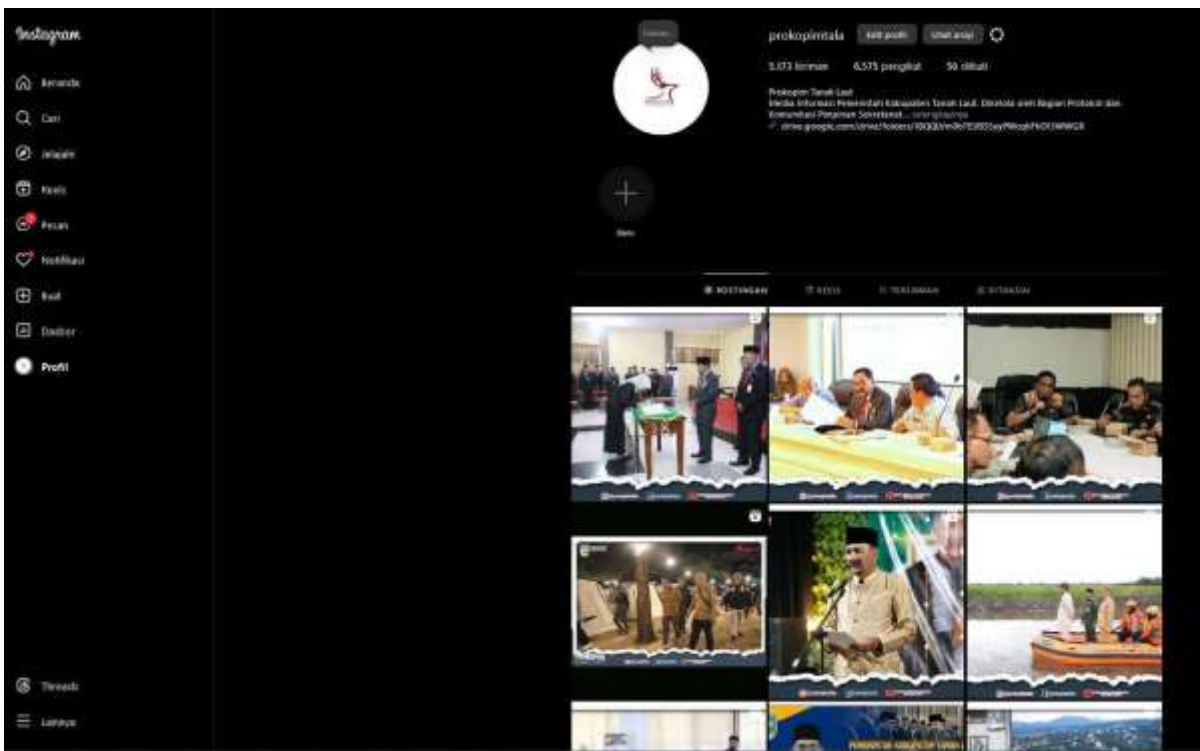
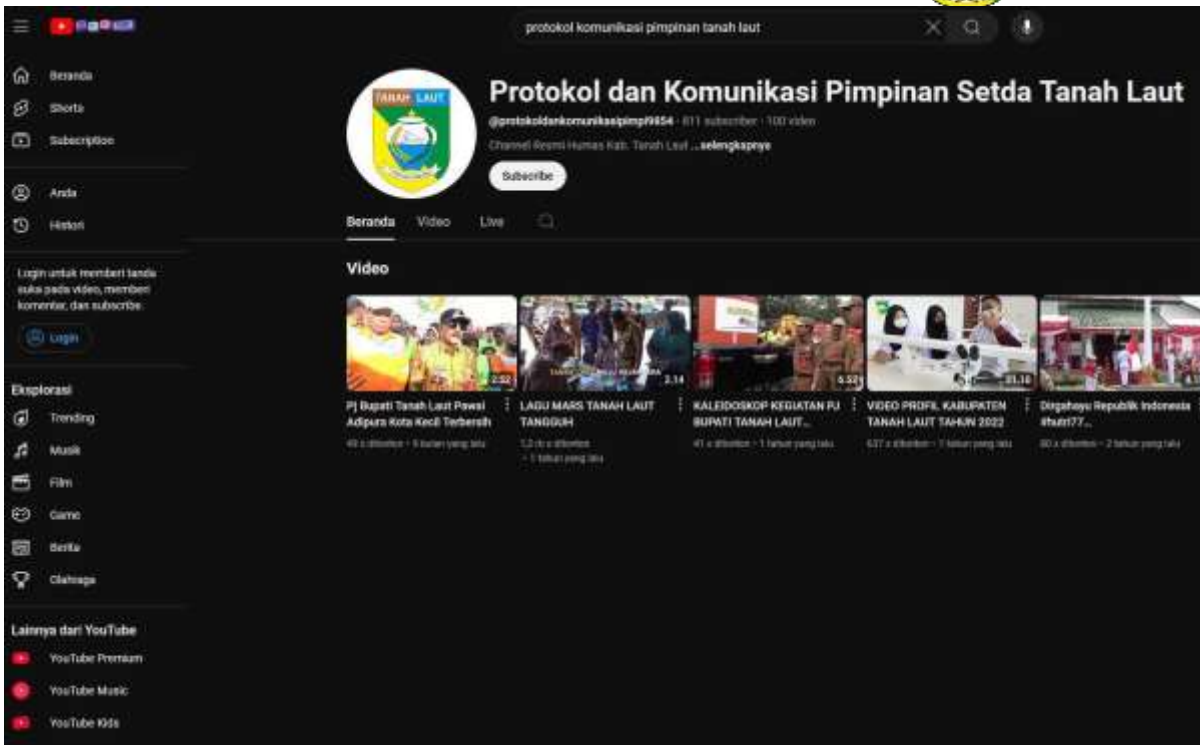
1 Januari pukul 15.55

Objek Wisata Pantai Batakan dan Takisung Kondusif Untuk Pengunjung

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut (Sekda Tala) Ismail Fahmi, pastikan situasi objek wisata Pantai Takisung dan Batakan kondusif untuk pengunjung dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2025. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan Monitoring Malam Pergantian di Objek Wisata Pantai Batakan Kecamatan Panyipatan, Selasa (31/12/2024).

"Sesuai kondisi yang terpantau saat ini masyarakat sangat tertib ... Lihat selengkapnya







Syamsir Harap Kontingen FORDA Tala Tembu...

Pj Bupati Tanah Laut (Tala) H Syamsir Rahman berharap kontingen Festival Olahraga Daerah (FORDA) Tala dapat mewakili Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Festival Olahraga Nasional ...

BERITA PILIHAN



Tala Terima Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih

Pj Bupati Tanah Laut (Tala) H. Syamsir Rahman menerima Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih, pada

BERITA UTAMA



PIN Polio Sasar 49.852 Anak di Bumi Tuntung Pandan...

Meningkatnya kembali kasus penyakit polio di Indonesia membuat kementerian kesehatan selengkapinya

Syamsir Harap Kontingen FORDA Tala Tembus Nasional

Pj Bupati Tanah Laut (Tala) H Syamsir Rahman berharap kontingen Festival Olahraga Daerah (FORDA) selengkapinya

Bank Kalsel Harus Jadi yang Terdepan

08 Agu 2024, 09:31:52

Pj Bupati Serahkan Simbolis Kunci Mobil kepada Kap...

08 Agu 2024, 09:42:04

TERPOPULER

Foto: Media publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

❖ Analisa Peningkatan Pelayanan Informasi Dokumentasi Pimpinan Daerah dengan Indikator Presentase Kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH yang Terlayani Sesuai SOP

Indikator presentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani sesuai SOP dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terdokumentasikan dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kualitas sarana penyimpanan Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH yang masih kurang memadai.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendokumentasian Pimpinan dan Kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan KDH / WKDH pada Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan agar lebih memadai.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terdokumentasikan.





Foto: Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

❖ **Analisa Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Keprotokolannya Pimpinan Daerah dan Tamu Kepala Daerah dengan Indikator Presentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP**

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah tamu daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah tamu daerah yang terlayani keprotokolannya dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolannya

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan Sub Bagian Fasilitas Keprotokolannya.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Menginformasikan kepada pelaksana kegiatan agar terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Sub Bagian fasilitasi Keprotokolan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.





Foto: Beberapa kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi keprotokolannya

Analisa Capaian Sasaran Strategis Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Layanan Publikasi Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP	100%	93,63%	93,63%	
2	Meningkatnya Layanan Informasi Dokumentasi Pimpinan Daerah	Persentase Kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH Yang Terlayani Sesuai SOP	100%	91,93 %	91,93%	
3	Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tamu Kepala Daerah	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah Yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP	100%	94,13%	94,13%	

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja



Rata-rata capaian kinerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan belum mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indikator persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media terealisasi sebesar 93,63% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya kurang 6,37% dari 100%.
- 2) Indikator persentase kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani terealisasi sebesar 91,93% dari target 100%
- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya terealisasi sebesar 94,13% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya kurang 5,87% dari target.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2024	
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP	%	100	100	100	93,63	93,63
2	Persentase Kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH Yang Terlayani Sesuai SOP	%	100	100	100	91,93	91,93
3	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah Yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP	%	100	100	100	94,13	94,13
	Rata – Rata Capaian						

Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81	91,78	113,30 %

Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan berbagai program pelayanan kepada masyarakat dengan fokus dalam satu Kegiatan dan tiga Sub Kegiatan yang mencakup aspek keagamaan dan pendidikan. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, berikut adalah uraian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan:

1. Pelayanan Bantuan Hibah kepada Lembaga/Organisasi Keagamaan

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada lembaga dan organisasi keagamaan yang dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Bina Mental Spiritual, dimana pada tahun 2024 memberikan bantuan hibah kepada 170 Lembaga/Organisasi keagamaan di Kab. Tanah Laut.

Masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap beberapa aspek pelayanan. Prosedur pengajuan bantuan dinilai cukup mudah dipahami dengan alur yang jelas. Petugas pelayanan menunjukkan sikap yang responsif dan komunikatif dalam memberikan informasi terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan.

Transparansi dalam proses seleksi dan penetapan penerima bantuan menjadi salah satu indikator yang mendapat nilai tinggi dari masyarakat. Waktu pemrosesan berkas hingga pencairan dana hibah telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Namun, terdapat catatan untuk meningkatkan sosialisasi tentang ketersediaan bantuan hibah agar dapat menjangkau lebih banyak lembaga yang membutuhkan.

2. Pelayanan Pemberian Insentif kepada Tenaga Pengajar dan Penyuluh Agama

Program pemberian insentif kepada tenaga pengajar TPA/TKA, MADIN, dan PONPES serta penyuluh agama dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan menganggarkan pemberian insentif kepada 3.585 orang tenaga pengajar TPA/TKA, MADIN, dan PONPES serta penyuluh agama se Kab. Tanah Laut.

Kegiatan ini mendapatkan respon sangat positif dari para penerima manfaat. Ketepatan waktu pembayaran insentif menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat kepuasan. Prosedur verifikasi data penerima insentif berjalan dengan baik dan sistematis.

Petugas pelayanan dinilai sangat kooperatif dalam membantu proses administrasi dan memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban penerima insentif. Sistem pendataan yang terorganisir memudahkan proses pemutakhiran data penerima. Meski demikian, ada usulan untuk menambah nominal insentif sesuai dengan beban kerja dan kondisi ekonomi terkini.

3. Pelayanan Pemberian Bantuan Beasiswa Sekolah Keagamaan di Luar Negeri

Layanan pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan keagamaan di luar negeri dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan memberikan Bantuan Beasiswa kepada 54 orang penerima yang terdiri dari 7 orang penerima yang akan sekolah dan 47 orang penerima yang sudah sekolah.

Pelayanan bantuan beasiswa ini menunjukkan tingkat kepuasan yang baik dari para pemohon dan penerima beasiswa. Transparansi kriteria seleksi dan tahapan proses mendapat apresiasi khusus dari masyarakat. Pendampingan dari petugas pelayanan dalam proses pengajuan beasiswa sangat membantu para calon penerima beasiswa. Monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa sangat perlu dilakukan baik secara berkala dan terstruktur. Beberapa catatan perbaikan meliputi perlunya peningkatan kuota beasiswa dan perluasan negara tujuan studi.

Rekomendasi Pengembangan Layanan:

1. Mengembangkan sistem informasi terpadu untuk memudahkan monitoring dan evaluasi program
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi program kepada masyarakat
3. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap besaran bantuan
6. Memperluas jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri

Kesimpulan :

Secara keseluruhan, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat menunjukkan hasil yang positif. Masyarakat mengapresiasi komitmen dan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan. Beberapa catatan perbaikan yang ada dapat menjadi dasar untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan dengan indikator Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan**

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada sasaran Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan dan Indikator Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Mendapatkan Layanan, dilaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan rata-rata realisasi capaian 97,01% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp.38.695.412.596,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.536.884.508,- atau 97,01%, dengan rincian per Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Memberikan pelayanan pemberian bantuan hibah kepada Lembaga/organisasi keagamaan se Kab. Tanah Laut, dimana pengajuan proposal yang semakin banyak tahun demi tahun, ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi/kelembagaan sosial dan keagamaan yang memohon bantuan baik itu berupa fisik dan Sebagian kegiatan keagamaan.

Jumlah proposal pada Tahun 2024 sebanyak 170 proposal.

NO	URAIAN	JUMLAH PROPOSAL YANG MASUK	JUMLAH PROPOSAL YANG DITINDAK LANJUTI	JUMLAH PROPOSAL YANG TIDAK DITINDAK LANJUTI	CAPAIAN 2024
1	Jumlah Proposal Hibah	217 Proposal	170 Proposal	47 Proposal	78,34 %

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Bagi pengurus organisasi/kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah kebanyakan tidak atau belum memahami tata cara dan kelengkapan administrasi Proposal yang diajukan.
- Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan pengurus lembaga/ organisasi cenderung lambat dalam pengajuan kelengkapan administrasi pencairan dana hibah kepada Tim verifikasi di Bagian Kesra.



- Permintaan RAB proposal pencairan berbeda dengan RAB proposal awal sehingga terjadi beberapa kali perbaikan yang memakan waktu bagi pengurus lembaga/organisasi tersebut.
- Kurangnya pemahaman dalam meng SPJ kan dana hibah.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada pemohon hibah secara langsung dan meminta kepada aparat Desa dan Kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal mengajukan permohonan fisik maupun kegiatan kepada bagian kesejahteraan rakyat.
- Sebelum membuat permohonan proposal terlebih dahulu melakukan musyawarah pengurus dengan warga berkaitan dengan permintaan apa yang diinginkan.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.

Daftar Penerima Hibah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2024 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari Kec.Pelaihari	Kegiatan Operasional Baznas Kab. Tanah Laut Tahun 2024	Rp 650.000.000
2	Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kab. Tanah Laut	Desa Telaga Kec. Pelaihari	Penyelenggaraan PORSADIN 5 Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	Rp 400.000.000
3	Yayasan Noor Hasyim Bina Aswaja	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pengadaan Ruang Belajar Terbuka dan Perangkat Laboratorium Multimedia dan	Rp 300.000.000
4	Yayasan Pondok Pesantren Adda Watuttammah	Desa Telaga Kec. Pelaihari	Pembangunan Pagar	Rp 250.000.000
5	Pura TRITUNGAL SAKTI	Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari	Pembangunan Bale Banjar	Rp 250.000.000
6	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah	Kelurahan Pelaihari Kec.Pelaihari	Kegiatan Nahdlatul Ulama Tahun 2024	Rp 200.000.000
7	Pura Ulun Suwi Batu Pujud	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Pembangunan Pure	Rp 200.000.000
8	Mesjid Al.Khif	Desa Ujung Batu Kec.Pelaihari	Pembangunan Teras Masjid, dan Pasang Kramik	Rp 100.000.000
9	Masjid Thariqatul Jannah	Kelurahan Pelaihari Kec.Pelaihari	Pembuatan Teras Masjid (Korbil) dan Tempat Wudhu Masjid	Rp 100.000.000
10	Masjid Baiturrahman	Desa Ambungan Kec.Pelaihari	Renovasi dan Perluasan Masjid	Rp 100.000.000
11	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari Kec.Pelaihari	Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Laut Tahun 2024	Rp 100.000.000
12	Yayasan Al Fatih Tala Kalsei	Desa Panggung Kec.Pelaihari	Pembangunan Masjid	Rp 100.000.000
13	Masjid Istiqomah	Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	Pembangunan Masjid Istiqomah Rutan Kelas IIB Pelaihari	Rp 100.000.000
14	Masjid Nurul Qomar	Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	Pembangunan Teras Masjid	Rp 100.000.000
15	Masjid Hidayatussalikin	Desa Telaga Kec.Pelaihari	Renovasi Masjid	Rp 75.000.000
16	Masjid Darul Istiqlal	Desa Atu Atu Kec. Pelaihari	Rehab Masjid	Rp 140.000.000
17	Mesjid Attaqwa	Desa Ambungan Kec.Pelaihari	Pembangunan Masjid	Rp 50.000.000
18	Majelis Jemaat GKE Sumber Mulia	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Gereja GKE Jemaat Sumber Mulia	Rp 50.000.000
19	Langgar Miftahul Huda	Desa Sumber Mulia Kec.Pelaihari	Pembangunan Aula Langgar	Rp 20.000.000
20	Masjid Al-Azhar	Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	Pemasangan Keramik Dinding Masjid	Rp 50.000.000
21	Langgar Uswatun Khasanah	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Rehab Atap Langgar	Rp 20.000.000



NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
22	Langgar Al-Hikmah	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Rehab Atap Langgar	Rp 20.000.000
23	Langgar Nurul Hidayah	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Pembangunan Langgar	Rp 20.000.000
24	Langgar Rohmadnoor	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Rehab Atap Langgar dan Atap Teras Langgar	Rp 20.000.000
25	Mushalla Istiqamah	Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Rehap dan Perluasan Halaman Mushalla	Rp 20.000.000
26	Langgar Miftahul Jannah	Kelurahan Pabahanan Kec. Pelaihari	Pembangunan Langgar	Rp 20.000.000
27	Langgar Attaqwa	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pembangunan Teras, Kamar Mandi, dan Tempat Imam	Rp 20.000.000
28	Langgar Al Mujahiddin	Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Rehab Pintu WC	Rp 20.000.000
29	Langgar Ash Sholihin	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pemasangan Plafon dan Tempat Parkir Sepeda Motor Langgar	Rp 20.000.000
30	Maulid Al-Habsyi Al-Hijrah	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
31	Rukun Kematian At-Taqwa	Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
32	Majelis Ta'lim Anwarul Hawi	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Majelis Ta'lim	Rp 9.000.000
33	Grup Habsyi Al-Hijrah	Desa Telaga Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
34	Rukun Kematian Margo Rukun	Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
35	Maulid Habsy Amanah	Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
36	Rukun Kematian Darul Iman	Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
37	Kelompok Maulid Habsy Fatimah Az Zahra	Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
38	Perkumpulan Rukun Kematian Nurul Yaqin	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
39	Pengurus Maulid Habsy Nurul Yaqin Putra	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
40	Pengurus Maulid Habsy Nurul Yaqin Putri	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
41	Group Maulid Habsyi Srikandi	Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
42	Masjid Al-Mujahidin	Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati	Pembangunan Masjid	Rp 100.000.000
43	Yayasan Al Hikmah Tanggul Jaya	Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati	Rehab Ruang Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah Al Hikmah	Rp 100.000.000
44	Musholla Babussholihin	Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati	Pembangunan Musholla	Rp 100.000.000
45	Masjid Baitul Muhsinin	Desa Ujung Kec. Bati-Bati	Pembangunan Tempat Parkir dan Pintu gerbang Masjid	Rp 90.000.000



NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
46	Masjid Besar Baitul Abror	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	Pembelian Tanah, Pengecoran Halaman, dan Pembuatan Regol Masjid	Rp 80.000.000
47	Yayasan Pendidikan Islam Darul Musthofa	Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati	Pembangunan Pagar dan Pemasangan Atap Madrasah Tsanawiyah NU Daar El-Musthofa	Rp 50.000.000
48	Musholla Darul Ikhsan	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pembangunan Paving Blok dan Rehab Lantai Musholla	Rp 20.000.000
49	Musholla Baiturrahman	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pembangunan Teras Musholla	Rp 20.000.000
50	Musholla Darus Saadah	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pembangunan/Rehab Musholla	Rp 20.000.000
51	Musholla Nor Hasanah	Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati	Pembangunan Musholla	Rp 20.000.000
52	Majelis Ta'lim Ath-Tholibin	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	Renovasi Majelis Ta'lim	Rp 20.000.000
53	Persatuan Maulid Habsyi Minhajul Abidin	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
54	Rukun Kematian At-Taqwa	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
55	Rukun Kematian Azzakirin	Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
56	Kelompok Maulid Al-Habsyi Az Zahro	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
57	Kelompok Maulid Al-Habsyi Al-Abror	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
58	Kelompok Maulid Al-Habsyi Nurul Iman	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
59	Kelompok Maulid Al-Habsyi Asyifa	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
60	Kelompok Maulid Al-Habsyi Al-Ikhlash	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
61	Kelompok Maulid Al-Habsyi Al-Anshor	Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
62	Barisan Pertahanan Adat Suku Asli Kalimantan (BAPASAK)	Desa Padang Kec. Bati-Bati	Kegiatan Tabligh Akbar	Rp 25.000.000
63	Masjid Nurul Huda	Desa Kayu Abang Kec. Tambang Ulang	Pembangunan Masjid	Rp 100.000.000
64	Masjid Al-Falah	Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	Pembangunan Mesjid	Rp 75.000.000
65	Mesjid Al-Anshar	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Penyelesaian Pembangunan Masjid	Rp 75.000.000
66	Majelis Ta'lim Al-Hijrah	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Kelanjutan Pembangunan Aula Majelis	Rp 50.000.000
67	Mushalla Darul Huda	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Pembuatan Pagar Mushalla	Rp 20.000.000
68	Mushalla Nurul Ikhwan	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Rehab Mushalla	Rp 20.000.000
69	Langgar Darul Ibadah	Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	Rehab Langgar	Rp 15.000.000
70	Majelis Barokatul Musthofa	Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Majelis Ta'lim	Rp 10.000.000
71	Grup Maulid Habsyi Nurul Mahabbah	Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000



NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
72	Perkumpulan Rukun Kematian Hidayatul Muhajirin	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
73	Perkumpulan Rukun Kematian Darul Huda	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
74	Majelis Ta'lim Nisa Babulkhairat	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Perlengkapan Majelis Ta'lim	Rp 9.000.000
75	Perkumpulan Rukun Kematian Al Ikhwan	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
76	Group Habsyi Al Musyaffa	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
77	Grup Maulid Habsyi As-Syifa	Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
78	Grup Maulid Habsyi Raudhatul Shibyan	Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
79	Grup Maulid Habsyi Al-Rasyidah	Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
80	Grup Maulid Habsyi Al-Munawarah	Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
81	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Kurau	Desa Kurau Kec. Kurau	Pembangunan Asrama Santri	Rp 350.000.000
82	Masjid Syamsul Munir	Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau	Pembangunan Masjid	Rp 300.000.000
83	Masjid Nurul Azhar	Desa Kurau Kec. Kurau	Perbaikan Mesjid	Rp 300.000.000
84	Yayasan Puspa Hati Kurau	Desa Sungai Bakau Kec. Kurau	Pembangunan Madrasah	Rp 50.000.000
85	Majelis Taklim Al Mudzakarrah	Desa Kurau Kec. Kurau	Pengadaan Peralatan Majelis Ta'lim	Rp 50.000.000
86	Mesjid At-Taqwa	Desa Bawah Layung Kec. Kurau	Renovasi Toilet dan Plafon Mesjid	Rp 50.000.000
87	Langgar Hidayatul Baqa	Desa Tambak Karya Kec. Kurau	Pembangunan Langgar	Rp 50.000.000
88	Yayasan Muhammad Yusran Seman	Desa Kurau Kec. Kurau	Perluasan Halaman dan Pembangunan Pagar Madrasah Diniyah Takmiliah Al Aula	Rp 50.000.000
89	Langgar Darul Amilin	Desa Kurau Kec. Kurau	Rehab Langgar	Rp 20.000.000
90	Persatuan Maulid Al Habsyi Al Muhajirin	Desa Kali Besar Kec. Kurau	Pengadaan Perlengkapan Maulid Al Habsyi	Rp 8.000.000
91	Majelis Ta'lim Kunci Kabah	Desa Tambak Karya Kec. Kurau	Pengadaan Peralatan Majelis Ta'lim	Rp 9.000.000
92	Maulid Habsyi Al-Hikmah	Desa Bawah Layung Kec. Kurau	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
93	Yayasan Al Hidaayah Bumi Makmur	Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI Hidayatullah	Rp 150.000.000
94	Masjid Nurul Rahmah	Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur	Pembangunan Mesjid	Rp 175.000.000
95	Masjid Darul Falihin	Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur	Rehab Masjid	Rp 100.000.000
96	Langgar Miftahurridwan	Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur	Rehab Langgar	Rp 20.000.000
97	Langgar Raudhatul Rahim	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	Pembuatan Teras Langgar	Rp 20.000.000



NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
98	Langgar Sabilul Muttaqin	Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Peningkatan Langgar	Rp 20.000.000
99	Langgar AlMuhajirin	Desa Sungai Rasau Kec.Bumi Makmur	Pembangunan Teras, WC, dan Tempat Wudhu	Rp 20.000.000
100	Langgar Raudhatul Jannah	Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Rehab Lantai Langgar	Rp 20.000.000
101	Majelis Ta'lim Al-Qurbah	Desa Handil Maluka Kec.Bumi Makmur	Paving Blok dan Pemasangan Keramik Majelis	Rp 20.000.000
102	Kelompok Maulid Al Habsyi Inayatul Habib	Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
103	Grup Habsyi Miftahul Ulum	Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
104	Group Habsyi Al-Karamah	Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
105	Rukun Kematian Al-Amin	Desa Sungai Rasau Kec.Bumi Makmur	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
106	Perkumpulan Maulid Al-Hidayah	Desa Handil Gayam Kec.Bumi Makmur	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
107	Perkumpulan Maulid Uswatun Hasanah	Desa Handil Gayam Kec.Bumi Makmur	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
108	Langgar Nurul Huda	Desa Sungai Rasau Kec.Bumi Makmur	Kelengkapan Sound System Langgar	Rp 9.000.000
109	Yayasan Miftahul Ulum Tirta Jaya	Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin	Pembangunan Gedung TPA	Rp 100.000.000
110	Masjid Nurul Amaliah	Desa Tanjung Kec.Bajuin	Pembangunan Masjid	Rp 75.000.000
111	Masjid Miftahul Jannah	Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin	Pembangunan Teras (Kanopi)	Rp 40.000.000
112	Musholla Baiturrohman	Desa Tebing Siring Kec. Bajuin	Pembangunan Plafon, Rehab Tempat Wudhu, dan Toilet	Rp 25.000.000
113	Langgar Nurussalam	Desa Tebing Siring Kec. Bajuin	Pemasangan Keramik dan Pengecatan Tempat Wudhu dan Toilet	Rp 20.000.000
114	Langgar Misbahul Khair	Desa Kunyit Kec. Bajuin	Pembangunan Teras, Tempat Wudhu, dan Toilet	Rp 20.000.000
115	Langgar Nurul Huda	Desa Bajuin Kec. Bajuin	Pembangunan Langgar	Rp 20.000.000
116	Musholla Miftahul Huda	Desa Tanjung Kec. Bajuin	Pembangunan Pagar Teras dan Plafon	Rp 20.000.000
117	Langgar Wali Songo	Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin	Pembangunan Pagar	Rp 20.000.000
118	Masjid Jami Raudhatul Muttaqien	Desa Tanjung Kec. Bajuin	Pembangunan WC dan Kamar Mandi	Rp 30.000.000
119	Maulid Habsyi Miftahul Jannah Putri	Desa Tanjung Kec.Bajuin	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
120	Majelis Ta'lim Raudatul Jannah Putri	Desa Tanjung Kec.Bajuin	Pengadaan Peralatan Majelis Ta'lim	Rp 9.000.000
121	Group Maulid Habsyi Hidayatus Syifa	Desa Tanjung Kec.Bajuin	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
122	Group Maulid Al-Habsyi Syifa Ul-Qolby	Desa Tanjung Kec. Bajuin	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
123	Rumah Ibadah Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Tanjung	Desa Tanjung Kec. Bajuin	Pembuatan Teras Rumah Ibadah Jemaat GPDI	Rp 9.000.000



NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
124	Group Maulid Habsyi Miftahul Qolbi	Desa Tanjung Kec. Bajuin	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
125	Yayasan Rahmatan Lil'alamiin	Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar	Pembangunan Gedung Ruang Kelas PonPes dan Gedung Majelis Ta'lim dan Dzikir Rahmatan Lil'alamiin	Rp 100.000.000
126	Masjid Attaqwa	Desa Jilatan Kec. Batu Ampar	Melanjutkan Pembangunan Masjid	Rp 50.000.000
127	Wanita Hindu Dharma Githa Siladharna	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Perlengkapan Peralatan Tempat Sesajen dan Busane Pure	Rp 100.000.000
128	Masjid Al-Muttaqin	Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar	Pembangunan Masjid	Rp 75.000.000
129	Masjid Al-Mujahid	Desa Ambawang Kec. Batu Ampar	Pembangunan Pagar Keliling dan Gerbang Masjid	Rp 75.000.000
130	Majelis Jemaat GKE Damit	Desa Damit Kec. Batu Ampar	Pembangunan Aula Sekolah Minggu Jemaat GKE Damit	Rp 50.000.000
131	Musala Ar-Raudhah	Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	Pembangunan Musala	Rp 20.000.000
132	Habsyi Azzahra	Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
133	Rukun Kematian (RUKEM) Al- Hijrah	Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 10.000.000
134	Mushola Nurul Amin	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Plavon Mushola	Rp 25.000.000
135	Yayasan Darussalam Aswaja	Desa Asam Jaya Kec. Jorong	Pembangunan Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah	Rp 200.000.000
136	Masjid Al-Muhajirin	Desa Sabuhur Kec. Jorong	Pembangunan Masjid	Rp 100.000.000
137	Yayasan AlQamar	Desa Asam-Asam Kec. Jorong	Pembangunan Pagar Pondok Pesantren	Rp 70.000.000
138	Masjid Nurul Iman	Desa Asri Mulya Kec. Jorong	Pembangunan Masjid	Rp 75.000.000
139	Langgar Al-Falah	Desa Jorong Kec. Jorong	Rehab Bangunan Langgar	Rp 20.000.000
140	Langgar At-Taqwa	Desa Jorong Kec. Jorong	Pembangunan Menara Langgar	Rp 20.000.000
141	Maulid Habsyi Nurul Huda	Desa Swarangan Kec. Jorong	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
142	Maulid Habsyi Al-Hidayah	Desa Sabuhur Kec. Jorong	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
143	Maulid Habsyi Miftahul Jannah	Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
144	Masjid Fathul Jannah	Desa Batalang Kec. Jorong	Rehab Masjid	Rp 75.000.000
145	Masjid Al Muhajirin	Desa Sumber Makmur Kec. Takisung	Pembangunan Kubah Masjid	Rp 100.000.000
146	Yayasan Baratib Baamal Tanah Laut	Desa Tabanio Kec. Takisung	Peralatan Multimedia dan Sound System	Rp 75.000.000
147	Musholla Da'watul Khair	Desa Tabanio Kec. Takisung	Renovasi Pembangunan Musholla	Rp 25.000.000
148	Langgar ARRAHMAN	Desa Sumber Makmur Kec. Takisung	Pembangunan Teras Langgar	Rp 20.000.000
149	Langgar Al-Ikhsan	Desa Pagatan Besar Kec. Takisung	Pembangunan Kubah Langgar	Rp 20.000.000



NO.	NAMA	ALAMAT	ALOKASI DANA	JUMLAH BANTUAN
150	Langgar Da'watul Khair	Desa Pagatan Besar Kec.Takisung	Rehab Langgar	Rp 20.000.000
151	Langgar Baiturrahman	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	Pembuatan Tempat Wudhu dan WC	Rp 20.000.000
152	Kelompok Habsyi Khoirun Nisa	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
153	Kelompok Maulid Al-Habsy Nurur Rohimah	Desa Sumber Makmur Kec.Takisung	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
154	Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI Kec. Kintap	Desa Sungai Cuka Kec.Kintap	Pembangunan Gedung TPA	Rp 500.000.000
155	Yayasan Miftahul Ulum Sumber Jaya Kintap	Desa Sumber Jaya Kec. Kintap	Pembangunan Gedung Madrasah Ponpes Miftahul Ulum	Rp 200.000.000
156	Yayasan Hidayatul Athfal Kintap	Desa Kintapura Kec.Kintap	Pembuatan Ruang Belajar	Rp 150.000.000
157	Masjid Jami Al-Muhajirin	Desa Sungai Cuka Kec.Kintap	Pembangunan Masjid	Rp 150.000.000
158	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	Desa Bukit Mulia Kec.Kintap	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPIT	Rp 100.000.000
159	Yayasan Darussana Sei Cuka	Desa Sungai Cuka Kec.Kintap	Pembangunan Ruang Kelas PonPes dan TPA Darussana Unit	Rp 100.000.000
160	Masjid Jami Darul Muttaqin	Desa Pandan Sari Kec. Kintap	Rehab Pembangunan Mesjid	Rp 100.000.000
161	Yayasan Raudhatul Mustarsyidin	Desa Kintap Kecil Kec.Kintap	Pembangunan Musholla	Rp 20.000.000
162	Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Batu Mulya	Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan	Pembangunan Gedung Asrama Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum	Rp 100.000.000
163	Masjid Nurul Yaqin	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	Renovasi Masjid	Rp 75.000.000
164	Langgar Nurul Iman	Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan	Rehabilitasi Langgar	Rp 50.000.000
165	Langgar Hidayatussaalikin	Desa Batakan Kec.Panyipatan	Pembangunan Langgar	Rp 20.000.000
166	Yayasan Hidayatul Ikhwan	Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan	Pembangunan TKA/TPA Hidayatul Ikhwan Unit 055	Rp 25.000.000
167	Langgar Darul Mujahidin	Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan	Pembangunan Langgar	Rp 20.000.000
168	Musholla Al-Anshor	Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan	Renovasi Musholla	Rp 20.000.000
169	Kelompok Maulid Habsyi Hidayatul Ikhwan	Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan	Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi	Rp 8.000.000
170	Rukun Kematian At-Taqwa	Desa Panyipatan Kec.Panyipatan	Pengadaan Perlengkapan Rukun Kematian	Rp 9.000.000
TOTAL				Rp 10.092.000.000

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 2 KEGIATAN :

1. Sosialisasi Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Hibah



2. Kegiatan UKS



PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH :

1. Penandatanganan NPHD dan SPJ Pencairan Dana Hibah



2. Monitoring dan Evaluasi





2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyaknya bangunan sekolah-sekolah keagamaan dan juga tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, dan Pondok Pesantren. Jumlah tenaga pengajar se Kabupaten yang diberikan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat tahun 2024 berjumlah 3.585 orang. Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.585 orang, ada insentif yang dikembalikan ke kas Daerah sebanyak 63 orang disebabkan berhenti, meninggal dunia dan mengundurkan diri karena lulus sebagai tenaga P3K di Kab. Tanah Laut.

Adapun daftar tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, dan Pondok Pesantren serta Penyuluh Agama yang diberikan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH UNIT TPA	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH UNIT MADIN	JUMLAH GURU MADIN	PONPES	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRSITEN
1	PELAIHARI	71	428	7	35	12	240	48	4	7
2	BAJUIN	27	133	-	-	1	22	16	-	3
3	PANYIPATAN	22	141	13	71	2	34	20	-	3
4	TAKISUNG	32	184	6	54	1	13	18	-	-
5	BATU AMPAR	40	234	1	7	1	27	16	4	5
6	JORONG	31	180	12	66	3	73	12	-	-
7	KINTAP	38	231	6	68	3	72	20	4	-
8	TAMBANG ULANG	20	124	3	26	2	27	14	-	-
9	KURAU	23	113	3	20	1	12	10	-	-
10	BUMI MAKMUR	29	135	6	61	-	-	10	-	-
11	BATI BATI	28	205	14	102	5	211	22	-	-
JUMLAH		361	2108	71	510	31	731	206	12	18

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, tetapi ada ditemukan beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah serta supervisor dan Koordinator Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Tenaga Pengajar di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Supervisor serta Koordinator BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH.
- Meningkatkan koordinasi antara DPK dan DPD BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar setiap permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.
- Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, dan Ponpes agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.
- Setiap penandatanganan insentif tenaga pengajar dan penyuluh agama dihadiri oleh Pengurus BKPRMI dan Madin kecamatan dan Kabupaten serta bagian kesejahteraan rakyat pada saat rapat rutin dan melampirkan photo penandatanganan persekolahan.
- Bagi Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama penandatungannya dimasing masing pondok dan Kantor KUA kecamatan masing-masing yang dilampiri dengan photo seluruh tenaga pengajar pondok dan penyuluh agama masing masing.

FOTO KEGIATAN

1. KEGIATAN STUDI TIRU FASILITASI PENYULUH AGAMA KRISTEN KE SEMARANG



2. FASILITASI KEGIATAN MUNAQASAH BKPRMI KAB. TANAH LAUT



3. FASILITASI KEGIATAN BATAMAT DAN WISUDA SANTRI TPA/TKA SE KAB. TANAH LAUT





4. MONITORING DAN EVALUASI TENAGA PENGAJAR DAN PENSYULUH AGAMA SE KAB. TANAH LAUT



5. KEGIATAN STUDI TIRU PENYULUH AGAMA HINDU KE BALI



❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Keagamaan Masyarakat dengan indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan**

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi/lembaga keagamaan dan SKPD terkait pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 yang meningkat dari tahun 2024 yakni mengalami kenaikan sebesar 0,59% yakni dari 83,01% menjadi 83,60%, tetapi memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Kegiatan yang bersifat even tahunan tidak dapat terjadwal sesuai rencana awal sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terfasilitasi dengan maksimal karena jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meningkatkan koordinasi yang baik dengan organisasi/lembaga keagamaan maupun dengan instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.

FOTO KEGIATAN

1. PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1445 H



2. SAFARI RAMADHAN PJ. BUPATI TANAH LAUT



3. TAUSIYAH LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANAH LAUT



4. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KAB. TANAH LAUT TAHUN 2024



5. PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA BIDANG AGAMA





**DAFTAR PENERIMA
DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN BEASISWA
BAGI SANTRI, USTADZ/ USTADZAH, DAN MAHASISWA (BIDANG AGAMA) KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

No	N a m a	Sekolah	Alamat	Jumlah Rp.
1.	Muhammad Ahsin Sakho	Darul Mustafa (Yaman)	Jl. Perintis No. 48 RT. 17 RW. 06 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	35.000.000
2.	Ramadhani Ridhatul Rizky	Darul Mustafa (Yaman)	Jl. A. Yani KM. 115 RT. 14 RW. 04 Desa Asam-Asam Kec. Jorong	35.000.000
3.	Muhammad Nur Baidoni	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. A. Yani RT. 06 RW. 01 Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	35.000.000
4.	Muhammad Fathir Saurie	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Jl. H.M. Jafri No. 01 RT. 03 RW. 01 Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	35.000.000
5.	Mahrida Syifa Ramadhani	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. Kol. Soepirman Komp. Griya Hamparan Blok E RT. 11 RW. 02 Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	35.000.000
6.	Muhammad Emir Chairil Ridlo	Al Wasathiah (Yaman)	Jl. Sawahan RT. 19 RW. 06 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	35.000.000
7.	Mulkan	Al Wasathiah (Yaman)	Desa Kuala Tambangan RT. 08 RW. 03 Kec. Takisung	35.000.000
8.	Ahmad Yasir	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. A. Yani RT. 012 RW. 004 Desa Jorong Kec. Jorong	10.000.000
9.	Muhammad Rifki	Rubath Tarim (Yaman)	Jl. A. Yani RT. 02 RW. 02 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati	10.000.000
10.	Muhammad Yahya	Rubath Al Ilmi Al Syarif - Hadramaut (Yaman)	Jl. Boer Anwar RT. 06 Desa Pemuda Kec. Pelaihari	10.000.000
11.	M. Alvin Shafari	Al Lisan Al Umm Tarim (Yaman)	Jl. Pesantren RT. 008 RW. 003 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	10.000.000
12.	Nisa Susmini	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Jl. Simpang Swarangan RT. 012 RW. 004 Kec. Jorong	10.000.000
13.	Muhammad Dzaky Almer	Darus Sholihin (Yaman)	Jl. Griya Persada Asri Komplek Griya Persada Asri Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	10.000.000
14.	Ahmad Farid Ma'ruf	Darus Sholihin (Yaman)	Jl. Ambawang Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	10.000.000
15.	Ridho Anugerah Fama	Universitas Al Wasathiyah (Yaman)	Jl. Gembira RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
16.	Najwa Fahrinda	Darul Hadits (Yaman)	Jl. H. Boejasin RT. 022 RW. 001 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	10.000.000
17.	Helmi Yunus	Darus Sholihin (Yaman)	Jl. Pintu Air RT. 024 RW. 006 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	10.000.000
18.	Muhammad Yunus	Rubath Tarim (Yaman)	Desa Pamalongan RT. 01 Kec. Bajuin	10.000.000
19.	Achmad Naseh	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Desa Sungai Cuka Kec. Kintap	10.000.000



No	N a m a	Sekolah	Alamat	Jumlah Rp.
20.	Jam'ani	Universitas Al Azhar (Mesir)	Desa Ranggung RT. 004 RW. 002 Kec. Takisung	10.000.000
21.	Abi Yazid Bustami	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. Murung Kenanga RT. 004 RW. 002 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	10.000.000
22.	Putri Ananda Septariana	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Jl. Matah II Nomor 13 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	10.000.000
23.	M. Gumilang Ramadhan	Ma'had Al-Idrus (Yaman)	Jl. Fathurrahman RT. 21 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	10.000.000
24.	Nur Ma'rifah Zahro	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Jl. Al Fatah RT. 27 No. 23 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
25.	Nezha Nisfi Asy-Syafiqah	Universitar Al Azhar (Mesir)	Jl. A. Syairani Komp. Kijang mas Permai E/10 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	10.000.000
26.	Akbar Thabrani	Universitar Al Azhar (Mesir)	Desa Tajau Pecah RT. 1 RW. 1 Kec. Batu Ampar	10.000.000
27.	Nor Hayri	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. Pesantren RT. 007 RW. 002 Desa Padang Kec. Bati-Bati	10.000.000
28.	Siti Nur Husna	Ma'had Ar Rusyd (Yaman)	Jl. A. Yani Desa Ujung RT. 001 RW. 001 Kec. Bati-Bati	10.000.000
29.	Luthfi Anshari	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Desa Bentok Darat RT. 01 RW. 01 Kec. Bati-Bati	10.000.000
30.	Amalia Sholehah	Darul Faqih (Yaman)	Komp. Bajuin Raya Jl. Kihung No. 6 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
31.	M. Hasanudin	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. Datu Daim RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
32.	Miftahur Rahmah	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. Abadi Gang Berlian RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
33.	Muhammad Fauzan	Universitas Al Wasathiyah (Yaman)	Jl. Pariwisata RT. 01 RW. 01 Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	10.000.000
34.	Fardhan Yuliannor	Universitas Al Azhar (Mesir)	Jl. Purnawirawan Komp. Sejahtera Mandiri Blok C No. 5 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	10.000.000
35.	M. Adabun Jamil	Ma'had Darul Mustafa - Tarim (Yaman)	Jl. Sebelas Maret Desa Alur RT. 08 Dusun 2 Kec. Jorong	10.000.000
36.	Fatia Rizkiyana	Universitar Al Azhar (Mesir)	Jl. Atilam RT. 08 RW. 04 Gg. Tambrin No. 2 Kelurahan Pabahanan Kec. Pelaihari	10.000.000
37.	Yuliani	Universitar Al Azhar (Mesir)	Jl. Pusaka RT. 003 RW. 001 Kintap	10.000.000
38.	Sarifah Habibah	Darul Faqih (Yaman)	Jl. Pusaka RT. 008 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
39.	Muhammad Hadi Luthfian Noor	Darul Uloom Miftahul Falaah - Afrika Selatan	Jl. Hidayah RT. 15 RW. 05 Desa Tanjung Kec. Bajuin	10.000.000

No	N a m a	Sekolah	Alamat	Jumlah Rp.
40.	Muhammad Ridho Bigkusri	Darus Sholihin (Yaman)	Teluk Baru RT. 08 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari	10.000.000
41.	Muhammad Fikri Arrahman	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Jl. A. Yani Rt. 03 RW. 01 Desa Ujung Kec. Bati-Bati	10.000.000
42.	Muhammad Rifqy	Al Lisan Al Umm Tarim (Yaman)	Perumahan Ponpos Al Hasyimiyah Jl. A. Yani KM. 138 RT. 02 RT. 01 Desa Pasir Putih Kec. Kintap	10.000.000
43.	Muhammad Luthfi Hafie	Darus Sholihin (Yaman)	Desa Bentok Kampung RT. 03 RW. 01 Kec. Bati-Bati	10.000.000
44.	Muhammad Maulana	Darus Sholihin (Yaman)	Jl. A. Yani RT. 02 RW. 01 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap	10.000.000
45.	Muhammad Saleh	Darus Sholihin (Yaman)	Jl. A. Yani RT. 05 RW. 01 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap	10.000.000
46.	Raffa Rewantha	Ma'had Al Yusra (Yaman)	Jl. A. Yani RT. 02 RW. 01 Desa Kintapura Kec. Kintap	10.000.000
47.	Sayyid Ahmad Hafi	Ma'had Al Yusra (Yaman)	Ponpes Al Hasyimiyah Jl. A. Yani RT. 01 RW. 01 Desa Pasir Putih Kec. Kintap	10.000.000
48.	H. Muhammad Arief Hidayat	Darul Mustafa (Yaman)	Desa Tajau Pecah RT. 10 Kec. Batu Ampar	10.000.000
49.	Madinatun Nafisah	Ma'had Ar Rusyud (Yaman)	Desa Tajau Pecah RT. 09 RW. 02 Kec. Batu Ampar	10.000.000
50.	Ahmad Musthofa	Ma'had Al Yusra (Yaman)	Desa Tajau Pecah RT. 03 RW. 01 Kec. Batu Ampar	10.000.000
51.	Zahratussyifa	Ma'had Ar Rusyud (Yaman)	Desa Tajau Pecah RT. 03 RW. 01 Kec. Batu Ampar	10.000.000
52.	Nur Riyadh Aulia	Universitar Al Azhar (Mesir)	Jl. Perintis Tengah RT. 029 RW. 06 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	10.000.000
53.	Muhammad Syarif	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Jl. Pintu Air RT. 024 RW. 006 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	10.000.000
54.	Syarifah Nabila Huda Alkaf	Darul Zahra (Yaman)	Jl. A. Yani RT. 02 RW. 01 Desa Pasir Putih Kec. Kintap	10.000.000

6. ABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN TINGKAT KAB. TANAH LAUT







7. PEKAN OLAH RAGA SANTRI ANTAR DINIYAH TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN TINGKAT NASIONAL





8. PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1445 H



9. SHALAT HAJAT PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN INDONESIA DAN SHALAT HAJAT HARI JADI KAB. TANAH LAUT TAHUN 2024





10. PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL



11. TABLIGH AKBAR DALAM RANGKA HARI JADI KE-59 KAB. TANAH LAUT TAHUN 2024



Analisa Capaian Sasaran Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan	Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan	100%	97,01%	97,01%	
2	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	100%	83,60%	83,60%	

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada indikator Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan, dilaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya dapat terlaksanan dengan baik dan lancar, dengan rata-rata realisasi capaian 97,01% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp.38.695.412.596,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.536.884.508,- atau 97,01%, dengan rincian per Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual berupa fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi sosial keagamaan pada prinsipnya berjalan baik dan lancar dengan realisasi capaian 99,55% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.223.341.951,- terealisasi sebesar Rp. 10.177.212.198,- atau 99,55%, tetapi memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu antara lain masih kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi penerima hibah dalam hal administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah, dengan rincian sebagai berikut :

- Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual secara fisik dapat terealisasi 100%, yaitu terlaksananya :
 - a) Sosialisasi Pencairan dan Pelaporan Dana Hibah Daerah TA. 2024.
 - b) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hibah.
 - c) Kegiatan UKS dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

dengan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp.131.341.951,- terealisasi Rp.93.212.198,- atau 70,97%.

- Proposal hibah lembaga/organisasi keagamaan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah pada TA. 2024 sebanyak 170 Proposal dan terealisasi sebanyak 169 Proposal dengan capaian sebesar 99,41%, dengan realisasi keuangan dari Pagu Rp.10.092.000.000,- terealisasi Rp.10.004.911.000,- atau 99,14% karena ada pengembalian dari dana hibah sebesar Rp.87.089.000,-



b. Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya dapat terlaksana sesuai yang direncanakan dengan realisasi capaian sebesar 96,06% dan realisasi keuangan dari Pagu Anggaran sebesar Rp.28.472.070.645,- terealisasi sebesar Rp.27.359.672.310,- atau 96,09%, yang terdiri dari terlaksananya 5 (lima) kegiatan dan terbayarnya insentif kepada Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - a) Kegiatan Studi Tiru Fasilitas Penyuluh Agama Kristen ke Semarang.
 - b) Fasilitas kegiatan Munaqasah BKPRMI Kab. Tanah Laut
 - c) Fasilitas kegiatan Batamat dan Wisuda Santri TPA/TKA se Kab. Tanah Laut.
 - d) Monitoring dan evaluasi Tenaga pengajar dan Penyuluh Agama se Kab. Tanah Laut
 - e) Kegiatan Studi Tiru Penyuluh Agama Hindu ke Bali.
- Jumlah Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama yang mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berjumlah 3.585 orang dengan besaran Rp.600.000,- /Orang/Bulan, yang terdiri dari guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPA berjumlah 2.108 orang, Madin/MIS berjumlah 510 orang, Pondok Pesantren berjumlah 731 orang dan Tenaga Penyuluh Agama berjumlah 236 orang.

Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.585 orang, ada insentif yang dikembalikan ke Kas Daerah sebanyak 63 orang disebabkan berhenti, meninggal dunia dan lulus sebagai Tenaga P3K Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut.

2) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, pada dasarnya dapat terlaksana dengan realisasi capaian 83,60% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp.4.613.338.510,- dapat terealisasi sebesar Rp.3.856.666.218,- atau 83,60%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya 11 Kegiatan Keagamaan dari 11 Kegiatan yang direncanakan yaitu :
- 1) Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H.
 - 2) Safari Ramadhan Pj. Bupati Tanah Laut.
 - 3) Shalat Idul Fitri dan Idul Adha berjamaah bersama Pj. Bupati serta Halal Bihalal.
 - 4) Tausiyah lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut.
 - 5) Penyelenggaraan Ibadah Haji Kab. Tanah Laut Tahun 2024.
 - 6) Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Bidang Agama.
 - 7) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Kab. Tanah Laut
 - 8) Pekan Olah Raga Santri Antar Diniyah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional.
 - 9) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H.
 - 10) Shalat Hajat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Shalat Hajat Hari Jadi Kab. Tanah Laut Tahun 2024.
 - 11) Tabligh Akbar dalam rangka Hari Jadi ke-59 Kab. Tanah Laut Tahun 2024.
- b. Fasilitasi kegiatan Lembaga/Organisasi Keagamaan, terdiri dari :
- 1) Fasilitasi kegiatan LPTQ Kabupaten Tanah Laut berupa Pelantikan dan Orientasi Dewan Hakim MTQ Tingkat Kab. Tanah Laut dan Fasilitasi pada MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta Tingkat.
 - 2) Fasilitasi kegiatan FKDT Kabupaten Tanah Laut pada PORSADIN Tk. Provinsi Kalimantan Selatan dan Tk. Nasional.
 - 3) Fasilitasi kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.
 - 4) Fasilitasi kegiatan BHR Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan Ru'yatul Hilal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1445 H serta Pengukuran arah Kiblat tempat Ibadah (Masjid/Langgar/Mushala) di Kab. Tanah Laut.



Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian
Kesejahteraan Rakyat terhadap capaian tahun sebelumnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan	%	98,45%	97,45%	100%	97,01%	97,01%
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	%	89,65%	83,01%	100%	83,60%	83,60%
	Rata – Rata Capaian	%	94,04%	93,04%	100%	95,58%	95,58%



Analisa Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya stabilitas perekonomian	Indeks Harga Konsumen	106,16	99,56	106,63%

Indeks Harga Konsumen atau IHK adalah ukuran statistik yang digunakan untuk memantau perubahan dalam harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen dalam suatu periode waktu tertentu. IHK adalah salah satu indeks harga yang paling umum digunakan dan penting dalam analisis ekonomi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang atau jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Indeks harga konsumen memiliki beragam kegunaan yang penting dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan antara lain:

1) Mengukur tingkat inflasi

Dengan melacak perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, IHK membantu para pembuat kebijakan, analis ekonomi, dan masyarakat umum untuk memahami perubahan daya beli uang dan stabilitas harga.

2) Penyesuaian Upah dan Dana Pensiun

Indeks harga konsumen digunakan untuk menyesuaikan penghasilan, upah, dan dana pensiun agar tetap sejalan dengan perubahan biaya hidup. Ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan dan dana pensiun seseorang tetap memadai dalam menghadapi perubahan harga barang dan jasa

3) Pemantauan Kesejahteraan Ekonomi

Perubahan dalam indeks harga konsumen dapat memberikan indikasi tentang kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten yang dihitung IHK nya oleh Pemerintah Pusat sehingga Kabupaten Tanah Laut perlu menjaga tingkat inflasi dengan stabilisasi IHK. Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat kompleks



dan bervariasi tergantung pada tingkat inflasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu menjaga inflasi pada tingkat yang rendah (IHK yang stabil).

Pada tahun 2024 sebagai salah satu sasaran Renstra yang ada di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA adalah Terwujudnya Stabilitas Perekonomian dengan IKU Indeks Harga Konsumen (IHK). Target IKU pada tahun 2024 adalah 106,16 dan capaiannya pada tahun 2024 adalah 99,56 atau 99,60% dari target.

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian dengan Indikator Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan**

Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan merupakan akumulasi dari kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang melahirkan beberapa kebijakan dibidang perekonomian guna menyelesaikan permasalahan dibidang perekonomian dan administrasi pembangunan. Selain fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian dan administrasi pembangunan, juga kegiatan fasilitasi lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai tupoksi .

Capaian indikator kinerja utama Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian sebesar 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2022 yaitu 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Beberapa rumusan kebijakan telah disusun dan direkomendasikan untuk dilaksanakan guna menunjang peningkatan perekonomian daerah namun SKPD teknis tidak maksimal dalam menjalankan menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sempurna.
- Adanya aturan – aturan baru dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Dalam penerapan rekomendasi kebijakan dilakukan evaluasi setiap periode dan pada saat timbulnya masalah akibat penerapan kebijakan tersebut.
- Penerapan kebijakan menyesuaikan dengan aturan – aturan yang terbaru.

- Koordinasi dengan SKPD Teknis terkait pelaksanaan kebijakan lebih dimaksimalkan terutama dalam hal pemenuhan data dan pelaporan

Rencana aksi yang diperlukan

- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
- Identifikasi permasalahan yang telah muncul dan kemungkinan yang akan muncul
- Melakukan pengumpulan data dan analisa terhadap hasil dari pelaksanaan kebijakan serta terhadap permasalahan yang muncul.



FGD Terkait Penyusunan 2 Kajian Bagian Perekonomian



HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah



Rapat Koordinasi terkait Penyertaan Modal Pemerintah

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat dengan Indikator Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Penghasilkan PAD**

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam berikutnya yaitu Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing pada Tahun 2024 sebesar 66,67% lebih kecil dari pada capaian Tahun 2023 yaitu 95%, ada beberapa kendala dan permasalahan sehingga tidak mencapai target tersebut antara lain :

- Tidak dapat direalisasikannya penyertaan modal kepada BUMD PT. BPD Kalimantan Selatan dan PT. Air Minum Berkah Banua karena adanya edaran dari Pemerintah Pusat tentang kebijakan pelaksanaan APBD P 2024 yang tidak memungkinkan pelaksanaan penyertaan modal kepada kedua BUMD tersebut.
- Kinerja BUMD PD. Baratala tidak maksimal karena belum adanya direktur utama yang definitif.
- Belum tersedianya kajian analisis investasi penyertaan modal kepada PD Baratala.

- Draft Raperda penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut masih belum dibahas pada tingkat legislatif.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengajukan draft perubahan raperda penyertaan modal kepada PT. BPD Kalimantan Selatan dan PT Air Minum Berkah Banua pada tahun 2025
- Melakukan koordinasi dengan pihak penyusun kajian analisa agar dapat dilakukan update kajian agar sesuai dengan kondisi real BUMD ditahun 2025
- Proses rencana rekrutmen direksi PD. Baratala akan dilakukan pada tahun 2025
- Pengajuan ulang draft raperda penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut untuk masuk propemperda tahun 2025 di DPRD.

Rencana aksi yang diperlukan

- Memfasilitasi pengajuan draft perubahan raperda penyertaan modal kepada PT. BPD Kalimantan Selatan dan PT Air Minum Berkah Banua pada tahun 2025
- Memfasilitasi dan koordinasi dengan pihak penyusun kajian analisa agar dapat dilakukan update kajian agar sesuai dengan kondisi real BUMD ditahun 2025
- Menyusun rencana rekrutmen direksi PD. Baratala
- Memfasilitasi proses pengajuan draft raperda penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut untuk masuk propemperda tahun 2025 di DPRD



FGD Terkait Pembahasan Program Peraturan Daerah Tahun 2025



❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Sasaran Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat dengan Indikator Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik**

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA yang berikutnya yaitu Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat pada Tahun 2024 sebesar 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Belum semua BLUD menyampaikan laporannya secara teratur;
- Koordinasi dengan BLUD masih belum maksimal.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Membentuk group WA yang beranggotakan para pimpinan BLUD
- Melakukan koordinasi secara intens dengan para kepala BLUD agar secara konsistem mengrimkan data laporannya

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun time schedule untuk monitoring proses penyampaian laporan oleh BLUD
- Monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi



Rapat Koordinasi dengan SKPD Pembina UMKM

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Monev Kebijakan Perekonomian dengan Indikator Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev**

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yang terakhir yaitu Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev pada Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian Tahun 2023 yaitu 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut oleh SKPD;
- Data anggaran pembangunan fisik melalui program DAK yang dilaporkan oleh SKPD tidak sama antara nilai yang ada di Biro Adbang Provinsi dengan yang dilaporkan kepada Adm Pembangunan di Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada SKPD tentang waktu pelaporan terkait administrasi pembangunan yang dilaksanakan SKPD
- Melakukan pemilahan data pelaporan yang diampaikan oleh SKPD
- Melakukan koordinasi untuk mendapatkan data DAK yang sinkron dengan data DAK yang ada di Biro Adbang Provinsi Kalsel

Rencana aksi yang diperlukan

- Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala
- Koordinasi dan konsultasi tentang progres pembangunan fisik melalui dana DAK dengan Biro Adbang Provinsi Kalsel.



Rapat koordinasi Adm Pembangunan



Analisa Capaian Sasaran Strategis

Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat	Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Penghasilan PAD	75%	50%	66,67 %	
		Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik	80%	80%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Monev Kebijakan Perekonomian	Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev	100%	100%	100%	

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Rata-rata capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA dari target indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan capaian kinerja adalah 100%.
- 2) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan tunggakan dan perumusan kebijakan dalam rangka penyelesaian penyaluran Kredit **Program Gapura Karomah** capaian kinerjanya adalah 100%.
- 3) Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Penghasilan PAD capaian kinerjanya adalah 66%. Hal ini dikarenakan dari empat BUMD hanya dua yang berkinerja positif dan menghasilkan laba, sedangkan PD. Baratala pada tahun 2024 ini mengalami kerugian dan PT. Tanah Laut Manuntung masih belum operasional
- 4) Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik capaian kinerjanya adalah 100%.



- 5) Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev capaian kinerjanya adalah 100%.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terhadap Capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2024	
			2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	%	100%	98%	100%	100%	100%
2	Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Penghasilkan PAD	%	75%	95%	75%	50%	66,67%
3	Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik	%	75%	0	80%	80%	100%
4	Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev	%	80%	100%	100%	100%	100%
	Rata – Rata Capaian						91,67%



2. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2026	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6
Eselon II					
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	80	-	97.92	97.92%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor LPPD	3.100	-	2,900	93.54%
Terwujudnya stabilitas perekonomian	Indeks Harga Konsumen	106.16	-	99,56	106,63
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	79	80,83	82.60	104%
Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General	Nilai komponen rencana aksi	2.3	-	Belum rilis oleh KemenpanRB	-
Meningkatnya Kualitas Pelaporan SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP	11	-	11,05	100,45
Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82.5	82	82.45	99.93%
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	81	89,98	91.78	113.30%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2026	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6
Eselon III					
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan Dengan Baik	Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP	100%		100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda	100%		100%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP	100%		100%	100%
Meningkatnya Administrasi Batas Kewilayahan	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	100%	83,67%	75%	75%
	Persentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	100%	-	100%	100%
Meningkatnya Pemenuhan IKK	Persentase Pemenuhan IKK	100%	100%	95%	95%
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati	100%	114%	108%	108%
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti	100%	83%	75%	75%
	Persentase Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten Yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi RB General Dengan Baik	Persentase SKPD Yang Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja SKPD	Persentase SKPD Dengan Nilai Komponen Pelaporan Minimal 11	90%	55%	87,5%	97,22%



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2026	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	80%	-	80%	80%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Yang Benar dan Tepat Waktu	Nilai Komponen Perencanaan AKIP Sekretariat Daerah	24 Nilai	24,60	24,60	102,5%
	Nilai Komponen Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Daerah	20 Nilai	20,50	20,50	102,5%
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah Yang Sesuai Dengan Sistem AKIP	Nilai komponen Pelaporan AKIP Sekretariat Daerah	11 Nilai	12,3	12,57	114,27%
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	100%
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan	Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelesaian Kasus/Perkara Hukum di Pemerintah Daerah	Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Layanan Publikasi Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP	100%	100%	93,63%	93,63%
Meningkatnya Layanan Informasi Dokumentasi Pimpinan Daerah	Persentase Kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH Yang Terlayani Sesuai SOP	100%	100%	91,93%	91,93%
Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tamu Kepala Daerah	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah Yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP	100%	100%	94,13%	94,13%
Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan	Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan	100%	97,45%	97,01%	97,01%



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2026	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	100%	83,01%	83,60%	83,60%
Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	100 %	98%	100%	100%
Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat	Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Penghasilkan PAD	75%	95%	50%	66,67%
	Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik	80%	0	80%	100%
Meningkatnya Kualitas Monev Kebijakan Perekonomian	Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev	100%	100%	100%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024*

**3. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024**

Laporan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam hal pencapaian kinerja untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi Tahun 2024 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	-	80	-	-	-	97.92	97.92	122,4%	82	119,41	Hukum
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor LPPD	-	3.100	2,900				2,900	93.54%	3.150	92,06%	Pemerintahan
3	Terwujudnya stabilitas perekonomian	Indeks Harga Konsumen	-	106.16	104,91	105,61	104,82	106,62	106.62	100.43%	109,16	97.67%	Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	80.83	79	-	-	80.83	82.60	82.60	104%	81	102%	Pengadaan Barang Jasa
5	Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General	Nilai komponen rencana aksi	-	2.3					Belum rilis LHE RB Tahun 2024	Belum rilis LHE RB Tahun 2024	2.5		Organisasi
6	Meningkatnya Kualitas Pelaporan SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP	-	11	-	-	11,01	-	11,01	100,09%	12		Organisasi
7	Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	82.5	-	82.45	-	-	82.45	99.93%	83	99.33	Perencanaan dan Keuangan



No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi Tahun 2024 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	89.98	81	90.97	91.43	91.96	92.76%	91.78	113.30%	83	110,57%	Umum

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

CAPAIAN IKU ESELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (10/12)	14
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan	Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	Hukum
2	Meningkatnya Penyelesaian Kasus/Perkara Hukum di Pemerintah Daerah	Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang terselesaikan	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	Hukum
3	Meningkatnya Administrasi Batas Wilayah	Presentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	83,67%	100%	25%	25%	12.5%	12.35	72.72%	72.72%	100%	72.72%	Pemerintahan
		Presentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	Pemerintahan
4	Meningkatnya Pemenuhan IKK	Persentase Pemenuhan IKK	100%	100%	25%	25%	22.3%	22.5%	95%	95%	100%	95%	Pemerintahan



5	Meningkatnya Kerjasama Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati	114%	50 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen	14 Dokumen	54 Dokumen	108%	56 Dokumen	-	Pemerintahan
6	Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	98%	100%	20%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
7	Meningkatnya BUMD dan BLUD Yang Sehat	Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Penghasilan PAD	95%	75%	50%	50%	50%	50%	66,67%	50%	75%	66,67%	Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
		Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik	0	80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
8	Meningkatnya Kualitas Monev Kebijakan Perekonomian	Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Monev	100%	100%	20%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
9	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level 3 proaktif	3 Level	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	100	Level 3 proaktif	Level 3 proaktif	100	PBJ
10	Meningkatnya SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi RB General Dengan Baik	Persentase SKPD Yang Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Organisasi
11	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja SKPD	Persentase SKPD Dengan Nilai Komponen Pelaporan Minimal 11		90%	-	88%	-	-	-	97,78%			Organisasi
12	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Yang Ditindaklanjuti		80%									Organisasi



13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Yang Benar dan Tepat Waktu	Nilai Komponen Perencanaan AKIP Sekretariat Daerah		24 Nilai	-	24.60	-	-	24.60	-	24	102,5%	Perencanaan dan Keuangan
		Nilai Komponen Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Daerah		20 Nilai	-	20.50	-	-	20.50	-	20	102,5%	Perencanaan dan Keuangan
14	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah Yang Sesuai Dengan Sistem AKIP	Nilai komponen Pelaporan AKIP Sekretariat Daerah		11 Nilai	-	12.75	-	-	12.75	-	11	115,9%	Perencanaan dan Keuangan
15	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Tepat Waktu	100%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan
16	Meningkatnya Layanan Publikasi Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP	100%	100%	25%	25%	22%	21,6%	93,63%	93,63%	100%	93,63%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
17	Meningkatnya Layanan Informasi Dokumentasi Pimpinan Daerah	Persentase Kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH Yang Terlayani Sesuai SOP	100%	100%	25%	25%	22%	19,93%	91,93%	91,93%	100%	91,93%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
18	Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keprotokolanan Pimpinan Daerah dan Tamu Kepala Daerah	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah Yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP	100%	100%	25%	25%	23%	21,13	94,13%	94,13%	100%	94,13%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
19	Meningkatnya Layanan Lembaga Sosial dan Keagamaan	Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang	97,45%	100%	19,67%	29,27%	26,34%	21,52%	97,01%	97,01%	100%	97,01%	Kesejahteraan Rakyat



		Mendapatkan Layanan											
20	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Keagamaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	83,01%	100%	8,21%	20,81%	18,74%	35,84%	83,60%	83,60%	100%	83,60%	Kesejahteraan Rakyat
21	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan Dengan Baik	Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	Umum
22	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	Umum
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	Umum
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Presentasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti	83%	100%	25%	25%	12.5%	12.3%	72.72%	72.72%	100%	72.72%	Pemerintahan
		Presentasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten Yang diselenggarakan	100%	100%	10%	10%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan

**B. Akuntabilitas Keuangan****1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024**

Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 112.696.491.964**

Tabel Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal dan Realisasi APBD
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	2.125.390.545	1.842.604.623	86,69%
2	Hukum	2.936.715.053	2.363.734.913	80,49%
3	Organisasi	759.104.607	660.472.055	87,01%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	943.744.634	756.966.858	80,21%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.911.783.582	1.822.447.228	95,33%
6	Kesejahteraan Rakyat	43.308.751.106	41.314.461.726	95,40%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.491.878.833	2.324.209.429	93,27%
8	Umum	33.013.021.639	30.269.391.256	91,69%
9	Perencanaan dan Keuangan	25.206.101.965	23.368.654.464	92,71%
JUMLAH		112.696.491.964,00	104.722.942.552,00	92,93%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024*

Anggaran Belanja Tahun 2024 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	115.000.000	172.775.000	150,24%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	115.000.000	172.775.000	150,24%



	Restribusi Daerah	115.000.000	172.775.000	150,24%
2	BELANJA	112.696.491.964	104.722.942.552	92,92%
	BELANJA OPERASI	98.560.193.681	91.758.263.762	93,10%
	Belanja Pegawai	25.136.642.676	23.312.635.364	92,74%
	Belanja Barang dan Jasa	63.331.551.005	58.440.717.398	92,28%
	Belanja Hibah	10.092.000.000	10.004.911.000	99,14%
3	BELANJA MODAL	14.136.298.283	12.964.678.790	91,71%
	Belanja Peralatan dan Mesin	8.900.220.885	7.955.269.000	89,38%
	Belanja Bangunan dan Gedung	5.236.077.398	5.009.409.790	95,67
	Jumlah Belanja	112.696.491.964	104.722.942.552	92,92
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(112.581.491.964)	(104.550.167.552)	92,87

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024*

Untuk Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 dari target **Rp 115.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp 172.775.000,00**.

2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Untuk anggaran belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 85.460.903.356,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 78.850.708.747,00 (92,27%)**, sedangkan untuk anggaran belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 112.696.491.964,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 104.722.942.552,00 (92,92%)**, terjadi kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar **0,65%**. Perbandingan anggaran dan realisasi tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan Tahun 2023	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian Pemerintahan						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	38.537.563.532	1.805.049.720	94,22%	85,04%
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	671.925.147	803.268.682	95,04%	81,92%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	270.501.270	299.994.634	80,53%	76,60%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	301.768.194	701.786.404	89,93%	92,22%
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	259.475.265	320.340.825	92,03%	96,02%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	259.475.265	320.340.825	92,03%	96,02%
Bagian Organisasi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	522.274.530	759.104.607	83,42%	87,01%



	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.472.697	150.824.591	93,56%	90,61%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	124.754.512	234.368.269	68,31%	83,55%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	373.911.747	86,29%	87,72%
Bagian Hukum						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	2.229.556.766	2.936.715.053	72,92%	80,49%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	902.546.592	1.091.543.825	81,33%	84,29%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	938.580.578	1.245.177.501	61,58%	78,75%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	388.429.596	463.045.536	80,79%	77,18%
Bagian Pengadaan Barang/Jasa						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.392.152.439	1.911.783.582	77,88%	95,33%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	670.026.599	662.038.082	66,03%	93,08%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	285.598.545	787.945.000	97,90%	97,04%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	436.527.295	418.245.396	82,97%	95,53%



Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	678.568.979	887.256.247	79,59%	80,46%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	297.915.910	257.711.714	63,88%	57,30%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	143.226.359	192.697.270	88,40%	83,08%
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	237.426.710	436.847.263	94,00%	92,96%
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	45.760.600	56.488.387	98,73%	76,30%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	45.760.600	-	98,73%	-
	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	56.488.387	-	76,30%
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	34.804.336.890	43.308.751.106	95,73%	95,40%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	9.285.373.530	10.223.341.951	96,09%	98,78%



	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	21.392.598.317	28.472.070.645	98,04%	96,09%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.137.404.825	4.417.275.164	82,95%	83,60%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.329.521.582	2.491.878.833	91,55%	93,27%
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	487.150.560	1.058.455.294	91,37%	94,13%
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	376.842.278	595.638.960	92,82%	93,63%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	465.528.744	837.784.579	90,72%	91,93%
Bagian Umum						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	368.137.250	0,00%	65,06%
	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	168.137.250	-	98,92%
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	30.000.000	50.000.000	0,00%	58,60%
	-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	1.000.000	-	0,00%



-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	149.000.000	-	29,46%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.423.530.835	6.621.155.597	92,36%	94,66%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	86.705.585	252.079.738	94,65%	95,83%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.159.669	364.792.064	93,56%	89,15%
Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga	124.240.667	249.960.691	77,71%	95,98%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	67.624.914	113.323.104	89,33%	78,88%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	18.000.000	98,80%	99,44%
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	16.200.000	-	38,73%	-
-	Sub Kegiatan Penyedia Bahan/Material	-	50.000.000	-	79,30%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	4.814.600.000	5.573.000.000	92,57%	95,35%
-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	8.289.315.707	-	89,06%
-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	2.649.903.000	-	85,57%
-	Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3.597.701.640	-	90,71%
-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	501.831.708	-	88,23



-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.539.879.359	-	91,51%
-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0	-	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.498.771.543	6.215.328.608	94,15%	90,76%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.623.920.000	95,02%	86,38%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.129.581.560	621.540.000	86,41%	87,34%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.695.189.983	3.969.868.608	98,21%	93,09%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.741.278.645	8.889.384.477	99,81%	93,83%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.793.000	205.000.000	99,11%	89,59%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.746.620.000	2.073.473.476	99,99%	86,48%
Sub Kegiatan Peralatan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Peralatan Mesin Lainnya	306.654.064	288.428.400	99,44%	93,38%
-	Sub Kegiatan Pemelihara Mabel	-	53.280.000	-	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.211.581	6.269.202.601	99,90%	96,37%
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	162.200.000	87,28%	62,98%



	Sub Kegiatan Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	112.200.000	87,28%	91,05%
	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	50.000.000	-	0,00%
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.700.500.000	2.467.500.000	91,68%	93,02%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	789.940.000	850.000.000	86,24%	99,44%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	1.617.500.000	81,76%	89,65%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	-	1.490.570.000	-	97,35%	-
Bagian Perencanaan dan Keuangan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.862.518	45.459.450	77,41%	77,72%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.862.989	25.462.800	75,23%	76,37%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529	19.996.650	80,43%	79,44%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.676.428.057	24.523.942.515	89,06%	92,69%
	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	22.661.218.512	24.499.942.676	89,07%	92,70%



	Sub Kegiatan Pelaksaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.209.545	23.999.839	73,48%	86,20%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	817.592.612	636.700.000	94,44%	94,45%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	817.592.612	636.700.000	94,44%	94,45%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 112.696.491.964,- dengan jumlah Program 3 (Tiga) 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Terkait realisasi keuangan atas pelaksanaan sasaran dan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
1.	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.936.715.053,0 0	Rp.2.363.734.913,0 0	80,49%	12	<ul style="list-style-type: none"> - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (3 orang) - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (1 orang)
			- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp.599.993.727,00	Rp.463.045.536,00	77,18%	5	
			- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.936.715.053,0 0	Rp.2.363.734.913,0 0	80,49%	12	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
								-PTT (1 orang)
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp.1.091.543.825,0 0	Rp.920.109.651,00	84,29%	3	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (1 orang) -PTT (1 orang)
			- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.936.715.053,0 0	Rp.2.363.734.913,0 0	80,49%	12	- Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang) - Penyuluh Hukum Ahli Pertama (1 orang) - PTT (2 orang)
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.1.245.177.501,0 0	Rp.980.579.726,00	78,75%	4	- Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang) - Penyuluh Hukum Ahli Pertama (1 orang)



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET	
								- PTT (2 orang)	
2.	Skor LPPD	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan						
			- Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	701.786.404	647.182.652	92,22	4 (empat) orang		
			- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan						
			- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	299.994.634	229.790.320	76,60	4 (empat) orang		
			- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan						
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	803.268.682	658.038.455	81,92	4 (empat) orang		
			- Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah						
			- Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	320.340.825	307.593.196	96,02	4 (empat) orang		
3.	Indeks Harga Konsumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	436.847.263	406.095.065	92.96%	4 Orang	1 PNS dan 3 PTT	
			- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	257.711.714	147.669.012	57.30%	2 Orang	1 PNS dan 1 PTT	
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	192.697270	160.098.881	83.08%	4 Orang	2 PNS, 1 PPPK dan 1 PTT	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	56.488.387	43.103.000	76,30%	4 Orang	2 PNS, 1 PPPK dan 1 PTT
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
			- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	662.038.082	616.256.832	93	1 Kasubbag, 15 JF PPBJ, 2 Perancang Kebijakan PBJ dan 1 Pengelola ULP	3 PTT
			- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
			- Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	811.951.500	787.945.000	97	1 (Sub Koordinator) dan 3 Staf LPSE	2 PTT
			- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
			- Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	437.794.000	418.245.396	95,5	1 (Sub Koordinator) dan Bendahara Pembantu.	3 PTT
5.	Nilai Komponen Rencana Aksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kegiatan Penataan Organisasi					
6.	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.824.591	136.658.107	90,61	3 orang	
			- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	234.368.269	195.825.090		4 orang	
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	373.911.747	327.988.858	87,72	3 orang		
7.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET	
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					<ul style="list-style-type: none">- Sub Koordinator Perencanaan- Pengelola Perencanaan- Perencana Ahli Pertama- PTT (1 Orang)		
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.462.800	19.446.600	76,37%		
			- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					<ul style="list-style-type: none">- Kabag Perencanaan dan Keuangan- Sub Koordinator Keuangan- Verifikator Keuangan- Bendahara Pengeluaran- Pengadministrasi Keuangan- Pengadministrasi Penerimaan PTT (3 Orang)	
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		24.499.942.676	22.711.891.636	92,70%		
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		23.999.839	20.687.500	86,20%		
			- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	636.700.000	601.380.000	94,45%		
			- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Pelaporan - PTT (1 Orang)	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.792.064	320.735.000	87,92%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.323.104	89.393.140	78,88%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	18.000.000	17.900.000	99,44%		
			- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.649.903.000	2.267.500.000	85,57%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.567.701.640	3.263.379.000	90,71%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	501.831.708	442.765.000	88,23%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.539.879.359	1.409.100.000	91,51%	3 Orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0%	3 Orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.623.920.000	1.397.859.592	86,08%	3 Orang	
			- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	850.000.000	774.250.000	91,09%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.617.500.000	1.367.547.300	84,55%	3 Orang	
			- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	252.079.738	241.573.700	95,83%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	249.960.691	239.910.500	95,98%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	9.650.000	19,30%	3 Orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621.540.000	394.845.700	63,53%	3 Orang	
			- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.000.000	151.537.781	73,92%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.073.473.476	1.596.975.362	77,02%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	53.280.000	53.280.000	100%		
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	288.428.400	269.348.000	93,38%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.269.202.601	2.926.109.320	46,67%	3 Orang	
			- Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah					
			- Sub Kegiatan Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.573.000.000	4.987.679.592	89,50%	3 Orang	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.969.868.608	3.402.263.190	85,70%	3 Orang	
			- Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah					
			- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	50.000.000	29.300.000	58,60%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	168.137.250	166.315.000	98,92%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	0	0%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.000.000	43.890.000	29,45%	3 Orang	
			- Kegiatan Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			- Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.200.000	110.000.000	98,04%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	0	0%	3 Orang	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	- Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	595.638.960	557.684.653	93,63	6	
			- Sub Kegiatan Fasilitas Dokumentasi	837.784.579	770.155.096	91,93	10	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	%	SDM	KET
		KABUPATEN/KOTA	- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	1.058.455.294	996.369.680	94,13	8	
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	43.308.751.106	41.393.550.726	95,58%		
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.223.341.951	10.177.212.198	99,55%	4	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	28.472.070.645	27.359.672.310	96,09%	5	
			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.613.338.510	3.856.666.218	83,60%	6	

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj bagi Sekretariat Daerah mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan dikuatkan dengan data dukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian Tahun 2024, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA secara umum.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang telah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2024, yang mencakup penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu untuk indikator sasaran Eselon II yang belum tercapai 2 (Dua) indikator, hal ini dikarenakan program dan kegiatan sebagai penunjang indikator sasaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



Demikian laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pelaihari, 20 Januari 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

ISMAIL FAHMI, SE, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731128 199803 1 008